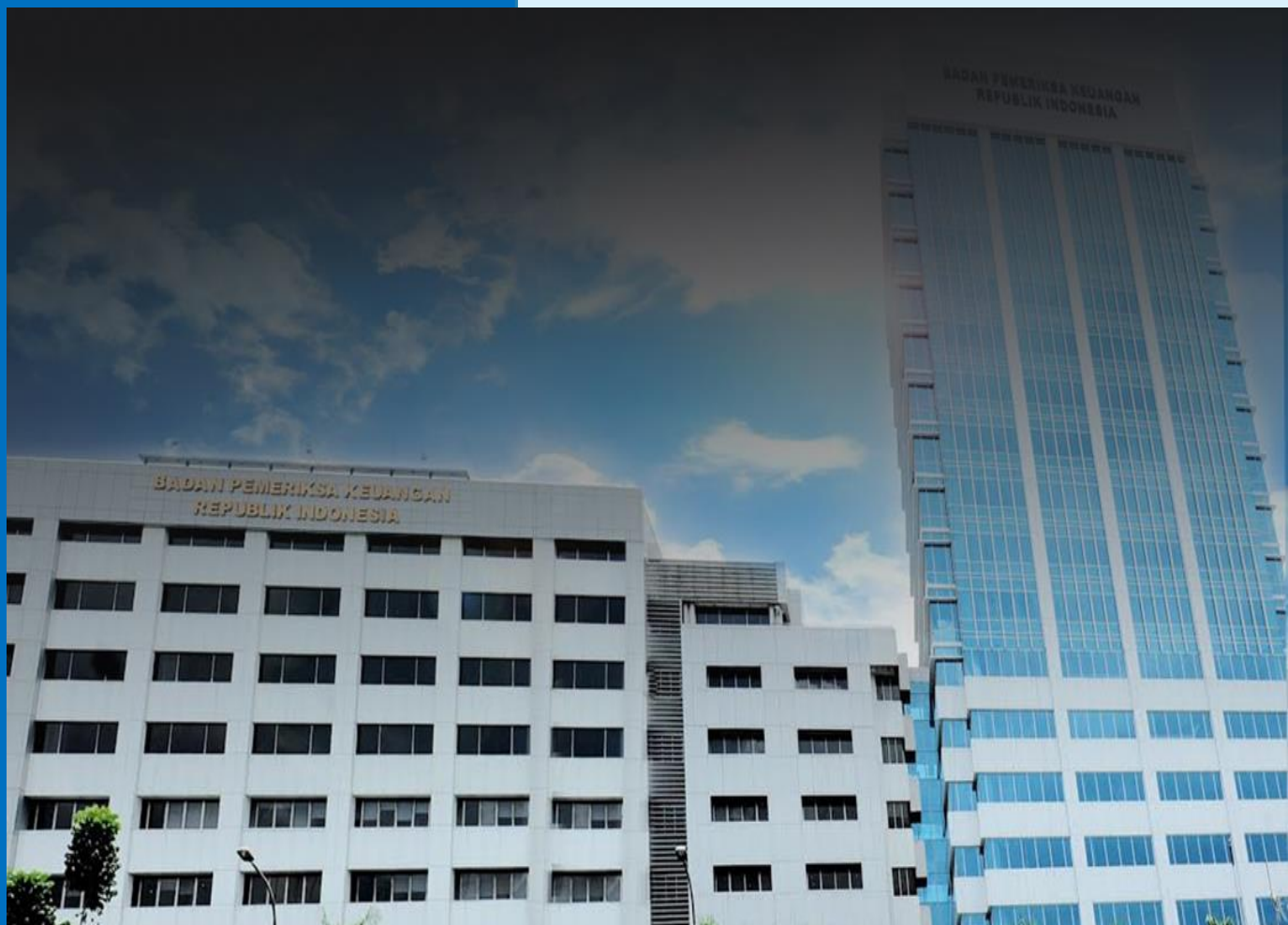




# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2017



**BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

## **KATA PENGANTAR**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs web BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK merupakan salah satu tanggung jawab dari Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK. PIK BPK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti website, e-mail, surat dan faksimili, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2017 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2017, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Tahun 2017. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta,   Maret 2018

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 .....</b>	<b>3</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK .....</b>	<b>4</b>
<b>B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>6</b>
<b>C. REKAPITULASI PELAYANANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 .....</b>	<b>8</b>
1. Pelayanan Permintaan Informasi .....	9
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat .....	12
3. Keberatan atas Informasi .....	14
<b>D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>15</b>
<b>E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>16</b>
<b>F. RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>16</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>17</b>
Lampiran 1 : Keputusan Sekjen No.272/K/X-X.III.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
Lampiran 2 : Keputusan Sekretaris Jenderal No.551/K/X-XIII.2/11/2016 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK	
Lampiran 3 : Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait Sampain 31 Desember 2017	
Lampiran 4 : Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2017	

**RESUME**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2017**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Informasi Publik:</b>	<b>Total: 1.565</b>
	a) Permintaan informasi	: 1.057
	b) Pengaduan masyarakat	: 507
	c) Keberatan atas informasi	: 1
<b>2.</b>	<b>Mayoritas Jenis/Topik:</b>	
	a) Permintaan Informasi	: Laporan hasil pemeriksaan (619 permintaan)
	b) Pengaduan Masyarakat	: Pengaduan terkait entitas pemeriksaan BPK (287 pengaduan)
	c) Keberatan atas Informasi	: Keberatan terkait permintaan informasi LHP Hasil Audit Investigasi dan atau Pemeriksaan Keuangan
<b>3.</b>	<b>Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Keberatan atas Informasi yang Masih Dalam Proses:</b>	
	a) Permintaan Informasi	: -
	b) Pengaduan Masyarakat	: 47 pengaduan dalam proses (terlampir)
	c) Keberatan atas Informasi	: 1
	(1)	Keberatan informasi atas permintaan hasil audit investigasi dan atau Pemeriksaan Keuangan pada pengadaan sepeda motor pemadam kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Pemprov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 yang dikerjakan penyedia jasa atau pemenang tender PT Makarti, pengadaan 110 unit sepeda motor pemadam kebakaran yang dibagikan untuk 55 kelurahan di DKI Jakarta.

## A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, yang di dalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat. Pembentukan PPID dan PIK di BPK dilakukan melalui proses konsultasi dengan Komisi Informasi serta studi banding ke beberapa instansi/kementerian yang telah memiliki PPID dan PIK terlebih dahulu.

PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No.272/K/X-XIII.2/6/2015 (perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal No. 430/K/X-XIII.2/11/2011) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di Perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID (**Lampiran 1**). Perubahan Keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala Perwakilan dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal No.272/K/X-XIII.2/6/2015 tersebut, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa PIK BPK terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan. Dalam pelaksanaan tugas teknisnya, struktur organisasi PIK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal No.438/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Struktur Organisasi Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi, yang menjabarkan mengenai struktur organisasi pengelola PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK. Dalam struktur organisasi BPK, pelaksanaan pelayanan informasi publik yang mencakup fungsi PPID dan PIK dilaksanakan oleh Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk, sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID dan satuan kerja (satker) terkait di BPK, untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai *database* informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis melainkan dinamis, selalu berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi, serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK telah melakukan dua kali uji konsekuensi, yaitu pada tahun 2014 dan 2015 yang dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2014, uji konsekuensi menghasilkan informasi yang dikecualikan yang kemudian di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan BPK. Kemudian, akhir tahun 2015, daftar informasi yang

dikecualikan tersebut kembali diuji melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh Pembina, Atasan PPID, seluruh PPID Perwakilan dan PPID Pusat. Uji konsekuensi tersebut kemudian divalidasi bertepatan pada pelaksanaan Rapat PPID BPK Tahun 2016, yang menghasilkan Surat Keputusan Sekjen No. 551 Tahun 2016 tentang Daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan BPK (**Lampiran 2**), sebagai pengganti Surat Keputusan sebelumnya. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik di BPK meliputi tiga jenis kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi  
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat  
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat, maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan komplain atas informasi BPK  
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain, *website* BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun komplain atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran, yaitu:

1. *website*;
2. *e-mail*;
3. telepon dan fax;
4. surat;
5. po box; dan
6. datang langsung ke PIK.

Selain itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;

3. Formulir Pengaduan Masyarakat; dan
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen.

## B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain:

### 1. Situs web BPK

Situs web BPK adalah laman BPK dengan alamat [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah, Pimpinan BPK, dan bidang tugas Pimpinan BPK, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK tengah membangun *website* BPK baru yang lebih inovatif dan informatif.

### 2. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK

BPK melalui Biro Humas dan Kerja Sama Internasional telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik di Lantai 1, Gedung Arsip BPK, dengan nama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK. PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Sarana dan prasarana PIK BPK terdiri dari:

- **Ruang *Front Office***



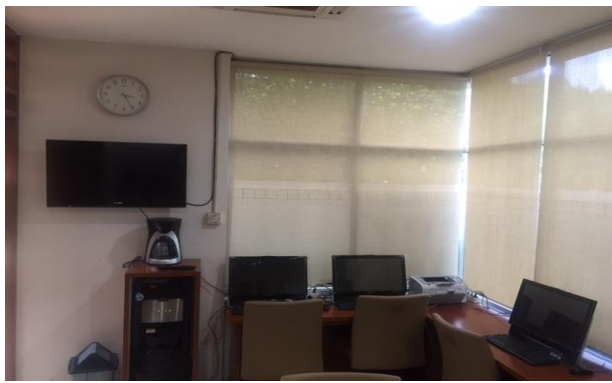
Berfungsi sebagai tempat penerimaan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

- **Ruang Tamu**



Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses.

- **Ruang Akses Internet**



Berfungsi sebagai tempat bagi publik/masyarakat untuk mengakses informasi.

- **Ruang Back Office**



Berfungsi sebagai tempat diprosesnya permintaan informasi atau pengaduan masyarakat kepada satuan kerja terkait yang menguasai informasi yang diminta maupun yang membawahi pengaduan masyarakat dimaksud, serta sebagai tempat untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi/pengaduan yang masuk melalui *e-mail* dan kolom pengaduan masyarakat pada *website* BPK.



- **Ruang penerimaan pengaduan masyarakat/demo**



Berfungsi sebagai tempat rapat/audiensi penerimaan demonstrasi/ pengaduan masyarakat apabila berjumlah lebih dari lima orang

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, saat ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menugaskan 2 (dua) orang petugas PIK dengan dibantu oleh satu orang tenaga PKL.

Selain kedua saluran komunikasi tersebut, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi  
Biro Humas dan Kerjasama InternasionalBPK-RI  
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta

2. Melalui telepon: 021-25549000 ext. 3912 dan fax: 021-57950288

3. Melalui e-mail: [ksbhumas@bpk.go.id](mailto:ksbhumas@bpk.go.id)

4. Melalui Po Box 4330 JKT 10043

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan *hardcopy* dokumen dalam jumlah besar, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Biro Humas dan Kerja Sama Internasional pada Subbagian Layanan Informasi.

### C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017, jumlah pelayanan informasi publik di BPK, baik yang diterima melalui *website*, *e-mail*, surat, fax, maupun datang langsung ke PIK BPK ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Jumlah Pelayanan Informasi Publik BPK**

<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>Jumlah</b>
Permintaan Informasi	1.057
Pengaduan Masyarakat	507
Keberatan atas Informasi	1
<b>Total</b>	<b>1.565</b>

Dari Tabel 1 diketahui bahwa terdapat sebanyak 1.057 permintaan informasi yang masuk ke BPK dan 507 pengaduan masyarakat. Selain itu, terdapat satu buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.

## 1. Pelayanan Permintaan Informasi

### a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi: (1) informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain di luar jenis informasi yang ada.

Pada tahun 2017, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Jenis Permintaan Informasi**

Jenis Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Berkala	619	58,7%
Serta Merta	0	0%
Setiap Saat	6	1%
Dikecualikan	3	0,3%
Informasi lain-lain	429	40%
<b>Total</b>	<b>1.057</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 1.057 permintaan informasi yang masuk, sebanyak 619 merupakan permintaan atas jenis informasi berkala (58,7%), sebanyak 6 (1%) merupakan informasi setiap saat, sebanyak 3 (0,3%) permintaan atas informasi dikecualikan, serta sebanyak 429 (40%) informasi lain-lain di luar jenis informasi yang ada.

Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Tahun 2017 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau thesis), pemberitaan, kajian, bahan telaahan, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, pemberitaan, publikasi, peliputan, penelitian, bahan menyusun program pemeriksaan, penyelidikan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pemantauan, sumber bacaan, serta untuk di jadikan *database*

Sementara permintaan informasi lain-lain yang diterima BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK. Permintaan informasi lain-lain ini antara lain seperti permintaan informasi terkait pertanyaan tentang informasi seputar penerimaan CPNS atau lowongan kerja di BPK tahun 2017, permintaan menjadi narasumber, untuk dapat menerima kunjungan dari berbagai instansi ke BPK, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui BPK, prosedur permintaan data di BPK, prosedur pengaduan, prosedur magang, prosedur kunjungan pelajar/mahasiswa, prosedur Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPK, *fieldtrip*, permohonan penelitian, pertanyaan tentang kerahasiaan identitas dalam permintaan informasi atau pengaduan, pertanyaan terkait tata cara pemberian masukan kepada BPK, pertanyaan terkait seminar/*workshop*, serta permintaan informasi lain yang sifatnya bukan merupakan tanggung jawab BPK seperti permohonan konsultasi terkait kontrak kerja sama, konsultasi hukum dari perseorangan atau badan hukum swasta, dan lain sebagainya. Pada tahun 2017, seluruh informasi yang masuk ke BPK dan diterima oleh PIK seperti undangan menghadiri seminar, *workshop*, FGD, atau undangan sebagai narasumber atau pemateri, dicatat dan dilaporkan sebagai informasi lain-lain.

Dengan demikian, berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa **jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada BPK adalah jenis informasi berkala dan informasi lain-lain.**

b. Media permintaan informasi

Pada tahun 2017, jumlah permintaan informasi dan komplain atas informasi yang diterima oleh BPK melalui *website*, *e-mail*, surat/fax/po box maupun datang langsung ke PIK BPK adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3 Media Penyampaian Permintaan Informasi**

Media Permintaan Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
<i>Website</i>	10	1%
<i>E-mail</i>	409	39%
Surat/fax/Po Box	172	16%
PIK	466	44%
<b>Total</b>	<b>1.057</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat total sebanyak 1.057 permintaan informasi yang masuk melalui saluran *website*, *e-mail*, surat, fax, po box maupun datang langsung melalui PIK BPK. Terdapat sebanyak 10 permintaan yang masuk melalui *website* BPK atau sebesar 1%, sebanyak 409 permintaan masuk melalui *e-mail* (39%), serta terdapat sebanyak 172 permintaan informasi yang masuk melalui surat/fax/po box ataupun datang langsung ke PIK BPK (16%).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian permintaan informasi kepada BPK yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah dengan datang langsung ke PIK BPK maupun surat/fax/po box yang dikirimkan ke PIK.**

c. Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi, LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan, dan (3) Topik Lain-Lain. Dari permintaan informasi yang masuk ke BPK, dengan kategori topik permintaan informasi sebagai berikut:

Pada tahun 2017, jumlah permintaan informasi berdasarkan topik ditunjukkan oleh Tabel 4.

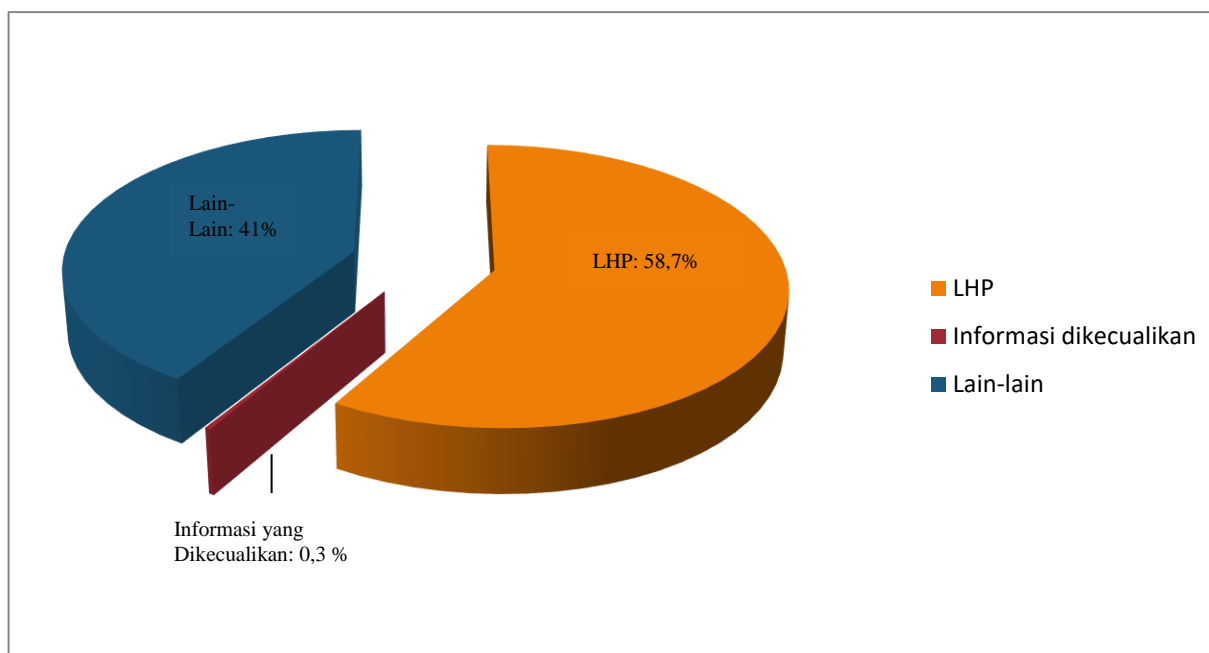
**Tabel 4 Topik Permintaan Informasi**

No.	Topik		Jumlah		Persentase	Pemohon Informasi per Semester II Tahun 2017
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	LHP LK	442	619	58,7%	619
		LHP Kinerja	37			
		LHP PDTT	58			
		IHPS	74			
		Informasi Publik Lainnya	8			
2	Informasi yang dikecualikan		3		0,3%	3
	Lain-lain	Undangan	53	435	41%	435
		Kepegawaian Secara Umum	2			
		Kunjungan	44			
		Penerimaan CPNS/Pembukaan Lowongan	56			
		Magang/PKL	44			
		Klasifikasi Lainnya	236			
<b>JUMLAH</b>			<b>1.057</b>		<b>100%</b>	<b>1.057</b>

Dari total 1.057 permintaan informasi yang masuk berdasarkan jumlah orang pada tahun 2017 melalui saluran website, e-mail, surat/po box/fax maupun datang langsung dapat dirinci sebanyak 619 permintaan terkait laporan hasil pemeriksaan BPK, 3 informasi yang dikecualikan, dan 435 permintaan atas informasi lain-lain di luar kategori topik permintaan informasi yang ada.

Sebaran ragam topik permintaan informasi secara lebih jelas ditunjukkan oleh Gambar 1.

**Gambar 1 Ragam Topik Permintaan Informasi kepada BPK**



Sesuai Gambar 1, dapat diketahui bahwa **topik informasi yang paling banyak diminta pada bulan ini adalah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (58,7%) dan topik lain-lain (41%).**

d. Tanggapan terhadap permintaan informasi

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memproses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan Informasi, maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam.

Pada tahun 2017, seluruh permintaan informasi yang masuk telah selesai ditindaklanjuti. Terdapat 1 (satu) buah keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK pada topik informasi yang dikecualikan dan sudah masuk dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Statusnya sudah diputuskan melalui mediasi *a quo* dan semua pihak (pemohon dan termohon) sepakat mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

## 2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Media pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni website, e-mail, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK. Pada tahun 2017, jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh Tabel 5.

**Tabel 5 Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat**

Media Penyampaian	Jumlah Diterima	Persentase
<i>website</i>	122	24%
<i>e-mail</i>	63	12%
surat/Po Box	305	60%
PIK	17	3%
<b>Total pengaduan</b>	<b>507</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 5 diketahui bahwa terdapat total 507 pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2017. Terdapat sebanyak 122 pengaduan yang masuk melalui *website*, sebanyak 63 pengaduan masuk melalui *e-mail*, sebanyak 305 pengaduan yang masuk melalui surat, serta terdapat sebanyak 17 pengaduan yang disampaikan melalui PIK. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah surat (60%).**

b. Jenis pengaduan masyarakat

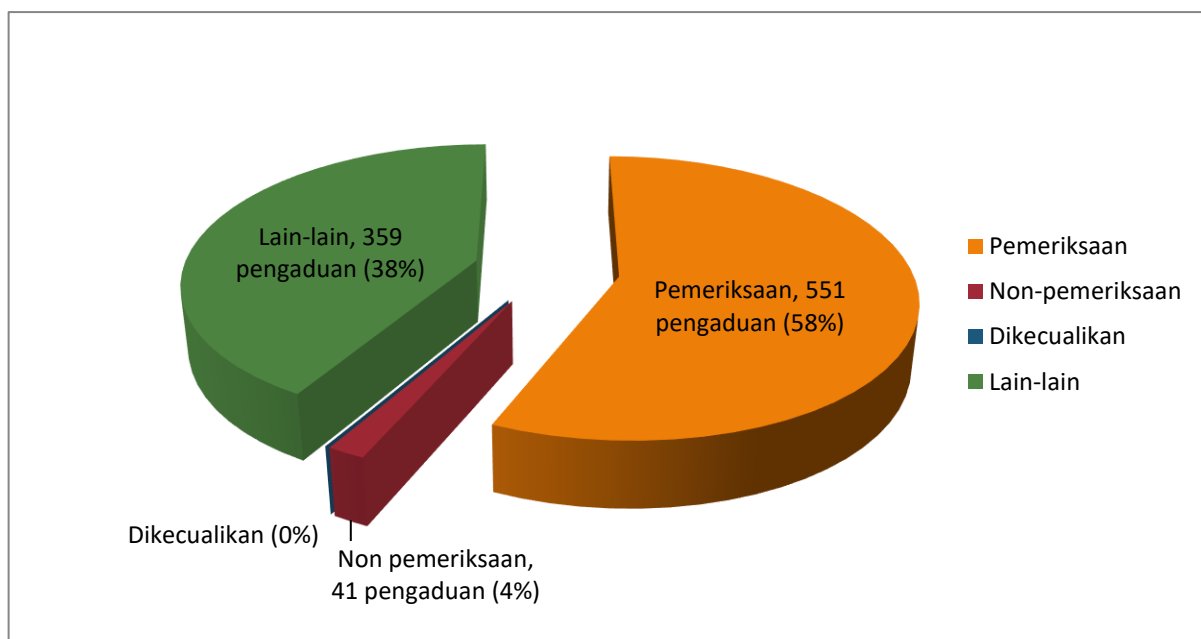
Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non-pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada tahun 2017, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh Tabel 6.

Tabel 6 Jenis Pengaduan Masyarakat

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Persentase
Pemeriksaan	287	57%
Non-pemeriksaan	9	2%
Dikecualikan	0	0%
Lain-lain	211	42%
<b>Total Pengaduan Masuk</b>	<b>507</b>	<b>100%</b>

Dari total 507 pengaduan masyarakat yang masuk, sebanyak 287 pengaduan merupakan pengaduan yang terkait dengan permohonan pemeriksaan (57%), baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap entitas tertentu. Sebanyak 9 pengaduan (2%) yang masuk merupakan pengaduan jenis non pemeriksaan. Pengaduan-pengaduan ini terkait dengan laporan dugaan permasalahan kepegawaian BPK, disiplin pegawai BPK, serta permasalahan non pemeriksaan lain pada BPK. Sementara itu, terdapat total 211 pengaduan (42%) yang diterima BPK merupakan pengaduan yang bukan merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan BPK menurut undang-undang, sehingga dikategorikan sebagai pengaduan jenis lainnya. **Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas jenis pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK pada tahun 2017 adalah pengaduan masyarakat terkait bidang tugas pemeriksaan BPK.** Sebaran ragam pengaduan masyarakat yang diterima BPK juga dapat digambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Ragam Jenis Pengaduan Masyarakat



c. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 507 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memroses seluruh pengaduan masuk, baik diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan Informasi, maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, terdapat 47 pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tindak lanjut pada satuan kerja terkait di BPK. Hal ini terus dimonitor tahap penanganannya agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

### 3. Keberatan atas Informasi

Pada tahun 2017, terdapat satu buah keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK. Keberatan atas informasi tersebut sebagai berikut:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Nama pemohon                                     | : | LSM Pemantauan Keuangan Negara (PKN)  |
| Isi permohonan                                   | : | Permintaan informasi berupa Hasil Audit Investigasi dan atau Pemeriksaan Keuangan pada pengadaan sepeda motor pemadam kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Pemprov DKI Jakarta Tahun 2011  |
| Surat keberatan pemohon                          | : | Pemantauan Keuangan Negara (PKN) menyampaikan surat kepada Ketua BPK dengan No. 40/PKN/SK/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang isinya surat keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi. Surat ditandatangani oleh Sdr. Iskandar, S.H. selaku Ketua Umum PKN. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, KPK, dan KIP.  |
| Jawaban BPK                                      | : | BPK menyampaikan tanggapan secara langsung oleh petugas PIK yang menyatakan bahwa permintaan informasi yang dimaksud sudah diberikan kepada Pemohon dengan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik Nomor 385/PI-PD/PIK/11/2015 tertanggal 19 November 2015.  |
| Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi | : | Surat dari PKN kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) No.40/PKN/SK/XI/2015 tanggal 23 November 2015 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terkait permohonan Hasil Audit Investigasi dan atau Pemeriksaan Keuangan pada Pengadaan Sepeda Motor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Pemprov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 yang dikerjakan penyedia jasa atau pemegang tender PT Makarti. |
| Proses penyelesaian                              | : | Penyelesaian keberatan atas informasi ini dilakukan melalui sidang sengketa informasi publik dengan surat panggilan sidang dari Panitera KIP No.024/II/KIP-RLS/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan register No. 006/II/KIP-PS/2016.  |

#### D. SENSKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK telah bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK. Hal ini berarti bahwa pengelolaan informasi di lingkungan BPK selalu tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, seluruh permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun keberatan atas informasi khususnya yang masuk pada tahun 2017 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi ataupun pengadu.

Pada tahun 2017, terdapat 1 (satu) kasus pengajuan sengketa informasi terhadap BPK oleh LSM Pemantauan Keuangan Negara (PKN) melalui surat Nomor No.40/PKN/SK/XI/2015, 23 November 2015 dengan proses penyelesaian sebagai berikut.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Nama Pemohon                              | : | Pemantauan Keuangan Negara (PKN)   |
| Pihak Termohon                            | : | BPK, yang dalam hal ini diwakili oleh : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adelina Silalahi, S.E., MBA.</li> <li>2. Herry Riyadi, S.H., M.Si.</li> <li>3. Niken Widorini, S.H.</li> <li>4. Agnes Pembriarni, S.H.</li> <li>5. Gilang Gumilar, S.I Kom</li> <li>6. Waskito Tri Endroputra</li> </ol>   |
| Surat permohonan sengketa informasi       | : | Surat Nomor 40/PKN/SK/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang isinya surat keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi. Surat ditandatangani oleh Sdr. Iskandar, S.H. selaku Ketua Umum PKN. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, KPK, dan KIP  |
| Surat panggilan sidang sengketa informasi | : | Surat panggilan sidang dari Panitera Komisi Informasi Pusat Nomor. 024/II/KIP-RLS/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan agenda pemeriksaan awal pada 28 Februari 2017 di Graha PPI, Lt.5. JL. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat.  |
| Proses sengketa informasi                 | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sidang pertama dilaksanakan pada 28 Februari 2017 dengan agenda pemeriksaan awal.</li> <li>2. Sidang kedua dilaksanakan pada 3 Maret 2017 dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan.</li> <li>3. Sidang ketiga dilaksanakan pada 6 Maret 2017 dengan agenda sidang mediasi.</li> <li>4. Sidang keempat dilaksanakan pada 16 Maret 2017 dengan agenda pembacaan keputusan.</li> </ol> |
| Penyelesaian                              | : | Setelah melakukan 4 (empat) kali persidangan, Majelis Hakim Komisioner dari KIP memutuskan melalui bahwa termohon sudah memberikan informasi tersebut kepada pemohon dengan tanda terima   |



Penyerahan Dokumen Informasi Publik Nomor 385/PI-PD/PIK/11/2015 tertanggal 19 November 2015, dan pemohon telah menerimanya. Keputusan tersebut diberikan melalui Putusan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 006/II/KIP-PS-A-M/2016 yang memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 024/II/KIP-RLS/2017. Sehubungan dengan putusan KIP tersebut, BPK dan pemohon menerima keputusan tersebut.

#### **E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2017, BPK, dalam hal ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, menemui beberapa kendala antara lain:

1. Tindak lanjut dari satuan kerja terkait di BPK terkadang memerlukan waktu lama karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK;
2. Banyaknya peminta informasi dan pengadu yang tidak menyertakan data secara lengkap.

#### **F. RENCANA TINDAK LANJUT**

BPK berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat yang telah kami buat untuk masyarakat lebih dekat, respon cepat mendapatkan informasi dan biaya hemat. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

1. Melakukan studi banding berkelanjutan ke Kementerian/Lembaga yang telah memiliki sarana dan prasarana PIK serta prosedur dan pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
2. Melaksanakan Rapat PPID secara rutin untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik baik di BPK pusat maupun BPK perwakilan;
3. Melaksanakan uji konsekuensi terkait informasi publik BPK secara rutin untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan PIK pada seluruh kantor BPK Perwakilan;
5. Memaksimalkan penggunaan media sosial BPK;
6. Membuat aplikasi layanan pengaduan berbasis android yang memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduannya;
7. Melakukan koordinasi internal BPK untuk menjajaki kerja sama dengan APIP terkait penyelesaian pengaduan yang berada di luar tugas dan fungsi serta kewenangan BPK;
8. Menyusun *database* pengaduan masyarakat yang diterima BPK baik Pusat dan Perwakilan; dan
9. Melakukan peningkatan kompetensi petugas PIK secara berkelanjutan.

Sebagai rangkuman, rekapitulasi data pelayanan informasi publik BPK selama tahun 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1:**

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

\



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 272/K/X-XIII.2/6/2015**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi publik yang tertib merupakan salah satu upaya BPK untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat;
  - b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 430/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur ketentuan pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan BPK;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.**

**Pasal 1**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK yang selanjutnya disingkat PPID BPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK.

**Pasal 2**

- (1) PPID BPK terdiri dari:
  - a. PPID Pusat yang berkedudukan di Jakarta; dan
  - b. PPID Perwakilan yang berkedudukan di BPK Perwakilan.
- (2) PPID dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID.

**Pasal 3**

- (1) PPID Pusat dan PPID Perwakilan bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
- (2) Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.

- (3) Struktur PPID BPK baik PPID Pusat maupun PPID Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 4**

- (1) PPID Pusat melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap PPID Perwakilan.
- (2) PPID Perwakilan menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dengan tembusan kepada PPID Pusat berupa:
  - a. monitoring dan evaluasi pelayanan permintaan informasi;
  - b. komplain atas informasi; dan
  - c. pengaduan masyarakat.
- (3) PPID Pusat mengompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pemantauan kegiatan PPID BPK.

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan.

**Pasal 6**

Susunan PPID Pusat dan PPID BPK Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 7**

Uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID di lingkungan BPK tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 8**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 430/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

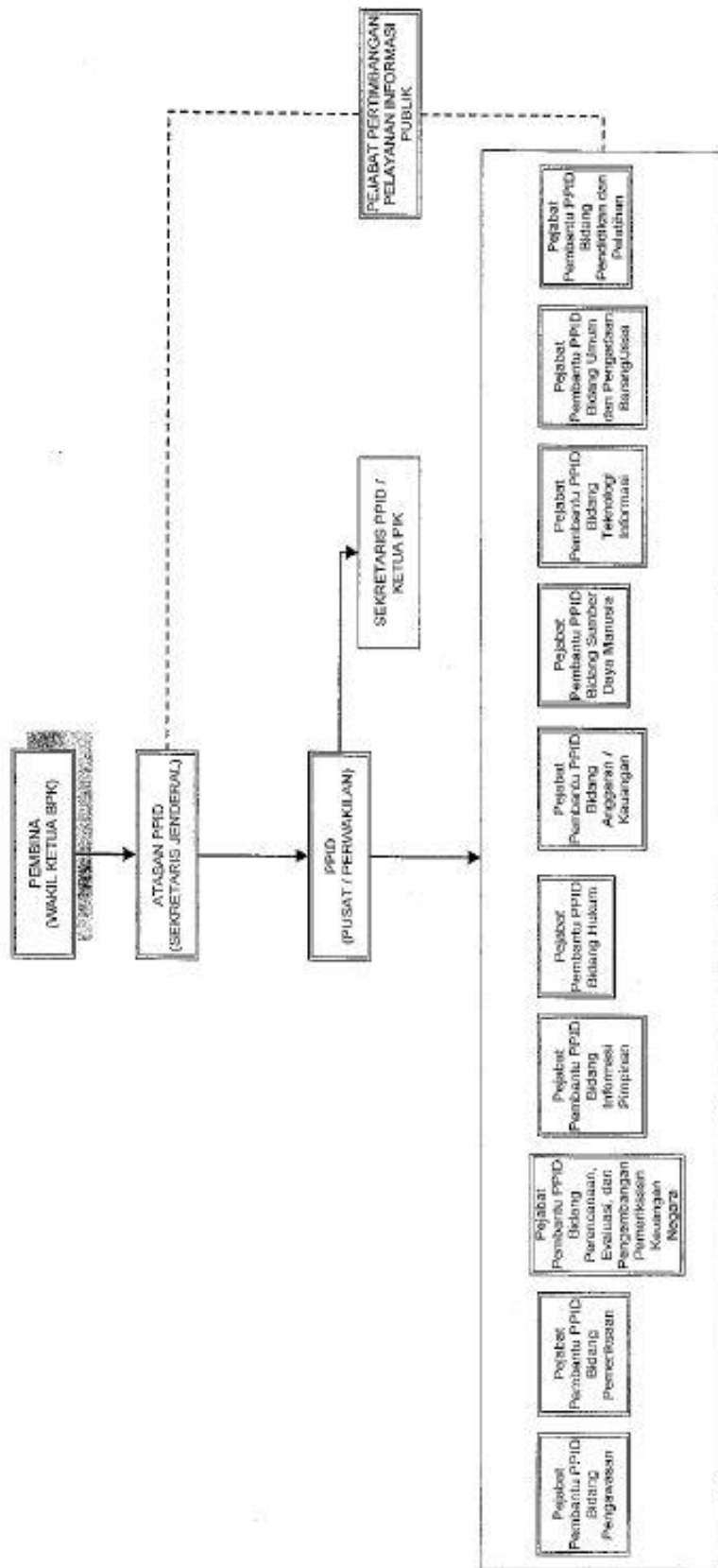
**HENDAR RISTRIAWAN**  
**NIP 195803211978021001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEK.JEN BPK-RI  
 NOMOR : 272/KO-XIII.2/6/2015  
 TANGGAL : 5 JUNI 2015

**STRUKTUR PPID BPK**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
 Pemeriksaan Keuangan Negara.

*Nizam Burhanuddin*  
 Nizam Burhanuddin  
 NIP 195803211978021001

**SEKRETARIS JENDERAL  
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA**

ttd.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-R3  
 NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015  
 TANGGAL : 5 JUNI 2015

**SUSUNAN PPID PUSAT DI LINGKUNGAN BPK**

No.	Jabatan	Kedudukan
1.	Wakil Ketua BPK	Pembina PPID
2.	Sekretaris Jenderal	Atasan Pejabat PPID
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektur Utama</li> <li>- Kepala Ditama Binbangkum</li> <li>- Kepala Ditama Revbang</li> <li>- Auditor Utama KN I</li> <li>- Auditor Utama KN II</li> <li>- Auditor Utama KN III</li> <li>- Auditor Utama KN IV</li> <li>- Auditor Utama KN V</li> <li>- Auditor Utama KN VI</li> <li>- Auditor Utama KN VII</li> </ul>	Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik
4.	Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional	PPID
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu</li> <li>- Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan</li> <li>- Inspektur Penegakan Integritas</li> </ul>	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pengawasan
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum</li> <li>- Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah</li> </ul>	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum

No.	Jabatan	Kedudukan
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja</li> <li>- Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan</li> <li>- Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>	Pejabat Pembantu PPID Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sekretariat AKN I</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN II</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN III</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN IV</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN V</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN VI</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN VII</li> </ul>	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan
9.	Kepala Biro Sekretariat Pimpinan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan
10.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembantu PPID Bidang Sumber Daya Manusia
11.	Kepala Biro Keuangan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Anggaran/Keuangan
12.	Kepala Biro Teknologi Informasi	Pejabat Pembantu PPID Bidang Teknologi Informasi
13.	Kepala Biro Umum	Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai dan calon pegawai di lingkungan BPK dan bagi pihak di luar BPK

No.	Jabatan	Kedudukan
15.	Kepala Bagian Pengelolaan Informasi atau Pejabat lain yang ditunjuk	Sekretaris/ Ketua PIK

SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HENDAR RISTRIAWAN  
NIP 195803211978021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI  
 NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015  
 TANGGAL : 5 JUNI 2015

**SUSUNAN PPID PERWAKILAN DI LINGKUNGAN BPK**

No.	Jabatan	Kedudukan
1.	Kepala Perwakilan	PPID
2.	Kepala Sekretariat Perwakilan	Sekretaris/Ketua PIK
3.	Kepala Subauditorat Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan
4.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembantu PPID Bidang Sumber Daya Manusia
5.	Kepala Subbagian Keuangan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Keuangan/ Anggaran
6.	Kepala Subbagian Hukum	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum
7.	Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Teknologi Informasi
8.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan dan Hubungan Masyarakat
9.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hubungan Masyarakat
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan

Salinan sesuai dengan aslinya  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
 Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
 Nizam Burhanuddin

**SEKRETARIS JENDERAL  
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA**

tid.

**HENDAR RISTRIAWAN**  
 NIP 195803211978021001

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI  
NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015  
TANGGAL : 5 JUNI 2015

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN PPID  
DI LINGKUNGAN BPK**

**A. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pembina PPID**

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID melalui atasan PPID.
2. Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID dari Atasan PPID.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID.
4. Memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik.

**B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan PPID**

1. Menetapkan dan mengangkat PPID.
2. Menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.
3. Mereviu konsep jawaban yang disiapkan oleh PPID yang akan dikirim kepada pemohon informasi.
4. Menyetujui jawaban yang disiapkan oleh PPID untuk dikirim kepada pemohon informasi.
5. Memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID untuk ditindaklanjuti oleh PPID.
6. Mewakili BPK di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada PPID.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPID.
8. Melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPK kepada Pembina setiap semester.

**C. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik**

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Memberikan masukan kepada Atasan PPID yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Mengkaji permintaan pertimbangan dari Pejabat Pembantu PPID sesuai dengan kewenangannya.
4. Memberikan arahan/persetujuan kepada Pejabat Pembantu PPID terkait informasi publik yang akan disampaikan kepada PPID.

**D. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID**

1. Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi.
2. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
  - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - d. informasi yang dikecualikan.
3. Mengoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Mengoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang efektif.
5. Mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Pejabat Pembantu PPID.
6. Mengoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Pejabat Pembantu PPID.
8. Mengomunikasikan hasil pengujian konsekuensi kepada pemohon informasi publik.
9. Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
10. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
11. Menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya setiap semester.

**E. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pembantu PPID Bidang Pengawasan, Bidang Hukum, Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bidang Pemeriksaan, Bidang Informasi Pimpinan, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Anggaran/Keuangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai dan Calon Pegawai di Lingkungan BPK dan bagi Pihak di Luar BPK**

1. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di unit/satuan kerja.
2. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik di unit/satuan kerja yang meliputi:
  - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - d. informasi yang dikecualikan.

3. Mendata informasi di unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Menyampaikan Daftar Informasi Publik dan dokumen pendukung yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5. Melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada PPID dengan persetujuan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.

**F. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Sekretaris PPID**


1. Menjabat sebagai Ketua PIK.
2. Mengoordinasikan tugas-tugas teknis yang dilaksanakan oleh PIK.
3. Mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi *database* informasi.
4. Mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.

**SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**HENDAR RISTRIAWAN**  
**NIP 195803211978021001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
Nizam Burhanuddin

**Lampiran 2:**

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 551/K/X-XIII.2/11/2016 tentang Daftar Informasi Publik yang  
Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan





**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 551/K/X-XIII.2/11/2016**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Badan Publik wajib melaksanakan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 sudah tidak sesuai dan harus diganti;
- d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
  5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.**

**Pasal 1**

Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 2**

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan acuan dalam Pelayanan Informasi Publik BPK.

**Pasal 3**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 November 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd

**HENDAR RISTRIAWAN  
NIP 195803211978021001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
Nizam Burhanuddin

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Utama;
2. Kaditama Revbang;
3. Kaditama Binbangkum;
4. Tortama Keuangan Negara I s.d. VII;
5. Para Kepala Biro;
6. Kepala Pusdiklat;
7. Para Kepala Perwakilan;
8. Kepala Direktorat LPBH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI  
 NOMOR : 551/K/X-XIII.2/11/2016  
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2016

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pegawai
2.	Rincian tagihan persatker
3.	Nomor rekening pegawai
4.	Laporan Keuangan BPK <i>un-audited</i>
5.	<i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik
6.	Kesepakatan pertemuan tiga pihak
7.	Nomor rekening pihak ketiga
8.	Jumlah pajak yang dipungut dan dibayarkan oleh pegawai maupun pihak ketiga
9.	Topologi dan konfigurasi jaringan
10.	<i>Private Internet Protocol (IP) address</i> dan <i>range IP address</i> yang digunakan
11.	Konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i>
12.	Sistem keamanan elektronik
13.	Sistem Manajemen Basis Data ( <i>Database Management System</i> )
14.	<i>Bandwidth Management</i>
15.	<i>Source code</i> aplikasi
16.	Konfigurasi aplikasi
17.	Lokasi <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>
18.	Dokumen dan isi rekam medis
19.	Hukuman disiplin
20.	Hasil <i>assessment</i>
21.	Risalah Baperjakat
22.	Informasi kesehatan psikis pegawai
23.	Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai
24.	<i>Database Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM)</i>
25.	Risalah dan hasil rapat BPK dan Sidang BPK
26.	Seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa selama proses pelelangan/seleksi masih berlangsung
27.	Seluruh Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (Itama) pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan dan kertas kerja evaluasi atas pengaduan hasil pemeriksaan BPK</li> <li>2) Laporan dan kertas kerja reuiu kinerja pemeriksaan</li> <li>3) Laporan dan kertas kerja <i>reward</i></li> <li>4) Laporan hasil tindak lanjut dan kertas kerja pengawasan Itama</li> </ol> </li> <li>b) Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan dan kertas kerja pemeriksaan internal</li> <li>2) Laporan dan kertas kerja pemeriksaan kinerja</li> <li>3) Laporan reuiu dan kertas kerja atas Laporan Keuangan BPK</li> <li>4) Laporan reuiu dan kertas kerja atas Rencana Kerja dan Anggaran BPK</li> <li>5) Laporan reuiu dan kertas kerja atas Sistem Pengendalian Intern BPK</li> <li>6) Laporan dan kertas kerja reuiu kelembagaan</li> <li>7) Laporan dan kertas kerja <i>Fraud Risk Assessment (FRA)</i></li> <li>8) Kertas kerja <i>peer review</i></li> </ol> </li> </ol>

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
	c) Inspektorat Penegakan Integritas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LHP dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> <li>2) Laporan hasil penelitian dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran kode etik</li> <li>3) Risalah rapat, risalah sidang, dan putusan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE)</li> <li>4) Kertas kerja penilaian zona integritas</li> <li>5) Pengaduan (dari masyarakat, <i>auditee</i>, rekan sejawat)</li> <li>6) Kertas Kerja penelitian atas Satyalancana Karya Satya (SLKS), Satyalancana Wira Karya (SLWK)</li> <li>7) Laporan IntoSAINT</li> </ol>
28.	Pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Prosedur Operasional Standar (POS), dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur ( <i>regeling</i> ) internal BPK)
29.	Laporan pendampingan proses hukum terhadap pelaksana BPK
30.	Laporan pendampingan keterangan ahli pemeriksa BPK atas perhitungan kerugian negara
31.	Hasil analisis hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, proses evaluasi, LHP, serta evaluasi BPK yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) rahasia negara</li> <li>b) hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan <i>fraud forensic</i></li> </ol>
32.	Hasil analisis hukum yang berkaitan dengan konsep atau pedoman pemeriksaan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) rahasia negara</li> <li>b) hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan <i>fraud forensic</i></li> </ol>
33.	Dokumen yang terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang mengandung unsur pidana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang</li> <li>b) data tindak lanjut penanganan kasus oleh instansi yang berwenang</li> <li>c) kompilasi data LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang dan tindak lanjutnya</li> </ol>
34.	Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka tuntutan perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti rugi terhadap bendahara
35.	Hasil pendapat hukum atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang diminta oleh pelaksana BPK dan dokumen pendukung (sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)
36.	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Kertas Kerja Pemantauan Tindak Lanjut, dan Kertas Kerja Penyelesaian Kerugian Negara
37.	LHP yang belum diserahkan ke lembaga perwakilan
38.	LHP yang diserahkan kepada Instansi Penegak Hukum oleh BPK
39.	LHP Investigatif
40.	Laporan perhitungan kerugian negara dalam rangka memenuhi permintaan Instansi Penegak Hukum

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
41.	Informasi terkait identitas akuntan publik dan pemeriksa pada KAP yang terdaftar di BPK
42.	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang disusun sesuai dengan hasil pemeriksaan AKN II terhadap data dan informasi perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
43.	Data dan informasi perpajakan yang dikategorikan rahasia sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang dimasukkan dalam aplikasi dan sistem informasi pendukung pemeriksaan BPK
44.	Perangkat lunak terkait pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan

SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDAR RISTRIAWAN  
NIP 195803211978021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
Nizam Burhanuddin

**Lampiran 3:**

Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait  
sampai 31 Desember 2017

**Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2017**

No.	Tanggal Pengaduan	Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Tanggal Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Rincian Pengaduan	Satker Terkait	Posisi Terakhir
1	11 Jan 2017	No.76/ND/X.2/01/2017	23 Jan 2017	Pengaduan terkait permohonan audit atas dugaan KKN ADD berdasarkan hasil pemeriksaan tim inspektorat Kabupaten Muara Enim dari LSM BPKK	AKN V	Auditorat V.B
2	17 Jan 2017	No.56/ND/X.2/01/2017	19 Jan 2017	Dugaan penyimpanan dalam pelaksanaan pekerjaan Jaringan Gas Kota Prabumulih Sumatera Selatan	AKN V	Auditorat V.B
3	20 Jan 2017	No.83/ND/X.2/01/2017	23 Jan 2017	Pengaduan terkait permintaan kepada BPK untuk memeriksa dana yang dikeluarkan Kementerian ESDM untuk membayar advocatnya	AKN IV	Auditorat IV
4	20 Jan 2017	No.80/ND/X.2/01/2017	23 Jan 2017	Pengaduan terkait Dugaan penyelewengan anggaran di Bappeda Provinsi. Papua serta yang berindikasi pada tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan juga kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua	AKN VI	Auditorat VI.B
5	20 Jan 2017	No.123/ND/X.2/01/2017	27 Jan 2017	Pengaduan terkait dugaan kongkalikong antara dewan direksi dan tim pemeriksa BPK pada LPP TVRI TA 2015	Inpektorat Penegakan Integritas	Inpektorat Penegakan Integritas
6	23 Jan 2017	No.127/ND/X.2/01/2017	27 Jan 2017	Permohonan arahan dari BPK terkait temuan BPK mengenai Pembangunan Gedung Kuliah Utama (GKU) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	AKN III	Auditorat III.C
7	26 Jan 2017	No.157/ND/X.2/01/2017	31 Jan 2017	Pengaduan Mengenai Permintaan Melakukan Audit atas Konflik Tanah antara Masyarakat Lampung dengan PT. KAI	AKN VII	Auditorat VII.B



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

8	27 Jan 2017	No.158/ND/X.2/01/2017	31 Jan 2017	Pengaduan adanya Indikasi Kerugian Negara terkait Pengadaan Barang/jasa Pada Pokja Satker PSPAM Provinsi Jawa Tengah	AKN IV	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh AKN IV
9	30 Jan 2017	No.154/ND/X.2/01/2017	31 Jan 2017	Pengaduan ke-2 tentang dugaan penyelewengan dana KUBE di desa Mano'an	AKN III	Auditorat III.B
10	31 Jan 2017	No.87/ND/X.2/01/2017	23 Jan 2017	Permohonan audit investigasi terhadap PT. Pembangunan Perumahan untuk proyek apartemen Paladian Park Kelapa Gading Jakarta Utara	AKN V	Auditorat V.B
11	31 Jan 2017	No.87/ND/X.2/01/2017	23 Jan 2017	Penyampaian pengaduan mengenai permohonan penjelasan terkait tanah ex Balai Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dari Sri Rahajeng Widiastuti S.H.	AKN V	Auditorat V.B
12	24 Feb 2017	No.301/ND/X.2/03/2017	6 Mar 2017	Penyimpangan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang	AKN V	Auditorat V.B
13	6 Mar 2017	No.345/ND/X.2/03/2017	10 Mar 2017	Informasi Perubahan Investasi dalam Kerjasama Tanpa SK Direksi pada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Kantor Pusat, Cabang Tanjung Perak Surabaya	AKN VII	Auditorat VII.B
14	8 Mar 2017	No.341/ND/X.2/03/2017	10 Mar 2017	Penyampaian surat pengaduan terkait permohonan audit terhadap Proyek DAK 96 Kota Cirebon	AKN V	Auditorat V.B
15	16 Mar 2017	No.409/ND/X.2/03/2017	21 Mar 2017	Dugaan Penyelewengan Anggaran di Pemerintah Kabupaten Mimika Prov. Papua yang Berindikasi pada Tindak Pidana Korupsi	AKN VI	Auditorat VI.B

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

16	17 Mar 2017	No.408/ND/X.2/03/2017	21 Mar 2017	Dugaan Korupsi dana Basnos TA.2016 pemkot manado, yang di duga di gunakan untuk anggaran pilkada manado TA.2016	AKN VI	BPK Perwakilan Prov. Sulutr
17	23 Mar 2017	No.455/ND/X.2/03/2017	29 Mar 2017	Pengaduan terkait pelaksanaan pekerjaan Proyek Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun Anggaran 2016	AKN III	Auditorat III.A
18	24 Mar 2017	No.440/ND/X.2/03/2017	29 Mar 2017	Permohonan penjelasan Dana Silpa Kabupaten Sukabumi Tahun 2014	AKN V	Auditorat V.B
19	27 Mar 2017	No.442/ND/X.2/03/2017	29 Mar 2017	Pengaduan terkait dugaan penyimpangan pada proyek paket pekerjaan peningkatan jalan Sudimampir-Tinumpuk Kec. Balongan Kab. Indramayu dari APBD 2016 Kab. Indramayu	AKN V	Auditorat V.B
20	5 April 2017	No.516/ND/X.2/04/2017	10 April 2017	Tindak pidana korupsi di STAIN Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.	AKN V	Auditorat V.A
21	10 April 2017	No.520/ND/X.2/04/2017	11 April 2017	Permohonan audit forensik pada Proyek Peningkatan Jalan Kedaung Kam Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.	AKN V	Auditorat V.B
22	11 April 2017	No.518A/ND/X.2/04/2017	11 April 2017	Pengaduan terkait penggunaan dana desa di Kab. Siak yang tidak jelas senilai Rp77.108.631.000	AKN II, AKN III, AKN V	Auditorat II.B, Auditorat III.B, Auditorat V.A
23	8 Juni 2017	No.806/ND/X.2/06/2017	15 Juni 2017	Pengaduan adanya dugaan mark-up pembelian aset tanah kantor BANK BRI Cabang Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	AKN VII	Auditorat VII.D
24	13 Juni 2017	No.810/ND/X.2/06/2017	15 Juni 2017	Permintaan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan aset milik TNI AL	AKN I	Auditorat I.A

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

25	13 Juni 2017	No.802/ND/X.2/06/2017	15 Juni 2017	Pengaduan mengenai beberapa pelaksanaan pekerjaan atas kawasan Kota Lama Semarang, ada yang belum sesuai.	AKN V	Auditorat V.B
26	14 Juni 2017	No.815/ND/X.2/06/2017	15 Juni 2017	Pengaduan terkait permintaan sikap hukum resmi dari BPK atas opini WTP yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	AKN V	BPK Perwakilan Prov. Riau (untuk mempelajari dan menyiapkan tanggapan)
27	16 Juni 2017	No.852/ND/X.2/06/2017	22 Juni 2017	Perpanjangan masa kerja anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2012-2017 yang diduga tidak tepat dan menyebabkan kerugian negara	AKN III	Auditorat III.C
28	4 Juli 2017	No.836/ND/X.2/07/2017	6 Juli 2017	Permasalahan pada pembelian tanah oleh MTs Negeri Lawang, Malang, Jawa Timur Tahun 2013	AKN V	Auditorat V.A
29	7 Juli 2017	No.888/ND/X.2/07/2017	11 Juli 2017	Permohonan pemeriksaan terkait penggunaan Anggaran dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 pada Desa Lalukoen, Kabupaten Rote Ndao	AKN II, III, V	Auditorat III.B dan VI.B
30	18 Juli 2017	No.979/ND/X.2/07/2017	27 Juli 2017	Permohonana Audit belum Dibayarkannya Dana Bantuan pada Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan “ Bina Usaha” oleh Pemerintah daerah kabupaten Kebumen	AKN V	BPK Perwakilan Prov. Jateng
31	18 Juli 2017			Permohonana Audit kegiatan Pembangunan Jalan antara Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lany Jaya	AKN IV	Auditorat IV.A
32	20 Juli 2017	No.978/ND/X.2/07/2017	27 Juli 2017	Permohonana Audit terkait Dana Kompensasi dari Kementerian Sosial Kepada Warga Negara Indonesia Eks Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi NTT yang tidak Tepat Sasaran	AKN III	Auditorat III.B
33	21 Juli 2017	No.977/ND/X.2/07/2017	27 Juli 2017	Permohonan pemeriksaan terkait aset berupa tanah milik LPP RRI Kupang	AKN III	Auditorat III.C
34	21 Juli 2017	No.1018/ND/X.2/08/2017	07 Agustus 2017	Permintaan pemeriksaan investigasi dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Rembang	AUI	AUI

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

35	28 Juli 2017	No.993/ND/X.2/07/2017	28 Juli 2017	Permohonan peninjauan kembali atas denda keterlambatan pada pengadaan bantuan pupuk NPK pada kegiatan pengembangan budidaya jagung di lahan khusus, Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	AKN IV	Auditorat IV.C
36	18 Agustus 2017	No.1100/ND/X.2/08/2017	22 Agustus 2017	Permohonan audit atas pembangunan jalur ganda dan stasiun kereta api di Desa Tegalsari	AKN I	Auditorat I.C
37	20 Agustus 2017	No.1301/ND/X.2/10/2017	2 Oktober 2017	Pengaduan terkait pembangunan DAM Kali Ngasinan Kiri di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kab. Tulungagung	AKN V	Auditorat V.B.
38	4 September 2017	No.1190/ND/X.2/09/2017	8 September 2017	Pengaduan terkait permohonan pemeriksaan investigatif terkait kinerja program kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumbagut Aceh dan Jawa Timur	AUI	AUI
39	4 September 2017	No.1191/ND/X.2/09/2017	8 September 2017	Pengaduan terkait permohonan pemeriksaan investigasi pembangunan Rumah Sakit Pratama Wonomulyo di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	AUI	AUI
40	11 September 2017	No.1210/ND/X.2/09/2017	14 September 2017	Permohonan Pemeriksaan terhadap BI, OJK dan Bank Mandiri	AKN II	AKN II
41	12 September 2017	No.1209/ND/X.2/09/2017	14 September 2017	Permohonan Pemeriksaan terhadap Kepala Desa Tragih	AKN V	Auditorat V.B
42	28 September 2017	No.1297/ND/X.2/10/2017	20 Oktober 2017	Pengaduan terkait sanggahan pada proses pelelangan paket pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	AKN V	AKN V

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

43	5 Oktober 2017	No.1399/ND/X.2/10/2017	23 Oktober 2017	Pengaduan dan permohonan pemeriksaan penyalahgunaan anggaran dana desa di Desa Majan Kedungwaru Tulungagung	AKN V	Auditorat V.B BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur
44	24 Ok 2017	No.1426/ND/X.2/10/2017	30 Ok 2017	Permohonan audit di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	AKN I	AKN IV
45	8 November 2017	No.1478/ND/X.2/11/2017	11 November 2017	Dugaan Penyalahgunaan Uang Pungutan Tiket Masuk Taman Wisata Alam Situ Patenggang oleh Pengelola (PT PRAKARSA MULYA) di Jawa Barat	AKN IV	AKN IV
46	8 November 2017	No.1538/ND/X.2/11/2017	30 November 2017	Dugaan Kerugian PNBPN (Wisata Alam) Kementerian Kehutanan sebesar 3 Milyar	AKN IV	AKN IV
47	13 November 2017	No.1496/ND/X.2/11/2017	16 November 2017	Pengaduan terkait Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pemasangan Paket Instalasi Rumah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bandung TA 2017	AKN V	AKN V

**Lampiran 4:**  
Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2017

## Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2017

## A. Permintaan Informasi

No.	Jenis Informasi	Isi Permintaan Informasi	Media				Satker Terkait	Tindak Lanjut		Keterangan	
			website	e-mail	Surat/ Po Box	PIK		Selesai	Proses		
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan</b>		<b>3</b>	<b>158</b>	<b>22</b>	<b>433</b>		<b>616</b>			
1	Januari	LHP BPK LKPD Provinsi, Kab, Kota Se- Banten TA 2010 s.d 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)	
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kab, kota Se-Jawa Barat TA 2010 s.d 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)	
		LHP BPK Kemenpora, AIRNAV, BMKG, Kemendag, BPN, PLN, Kemendikbud dan Jasa Marga TA 2014 s.d 2015				1	AKN III dan AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)	
		LHP BPK LKPD Kotawaringin Barat TA 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)	
		LHP BPK LK Kemenkumham dan Polri TA 2015				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)	
		LHP BPK LKPD Propinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia TA.2010-2015	1						1		Dibalas via email, diminta untuk melengkapi dokumen dengan surat pengantar universitas dan tanda terima dokumen
		LHP BPK LKPD Provinsi Aceh dan Kab. Aceh Utara TA 2012, Kab. Aceh Selatan TA 2014	1					AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Melalui Email)
		LHP BPK LKPD Kab. Aceh Barat Daya TA 2012, Kab. Aceh Singkil TA 2014 dan Kab. Aceh Selatan TA 2010 dan 2011	1					AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Melalui Email)
LHP BPK LPKD Provinsi, Kabupaten, Kota Se-Jawa Timur dan LHP Kementerian PU TA. 2015					1	AKN V dan AKN IV	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)		

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK atas LK Polri TA 2010-2015				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA. 2010 - 2014				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2014				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK atas LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi Sumber Daya Air, Kementerian Luar Negeri TA 2014-2015				1	AKN III, AKN IV dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK atas LK Kementerian Dalam Negeri TA 2013-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA. 2012 - 2014				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kota (Medan, Semarang, Surabaya, Cimahi, Sorong) dan Kabupaten (Bogor, Bandung, Nias, Malang, Purbalingga, Dairi, Karo, Deli Serdang, Bengkalis, Kutai, Gorontalo) TA 2010-2015				1	AKN V dan AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKDP Provinsi DKI dan DIY TA 2011-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LK Kementerian Keuangan TA 2011-2015				1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2014-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kota Tasikmalaya TA. 2005-2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2011, 2012, 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2012				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota se-Jawa Timur TA 2013-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Pulau Jawa TA 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia TA 2014-2015				1	AKN V AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia TA 2014-2015		1			AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP LKPD seluruh Provinsi TA 2010-2015, dan Kab/Kota di Prov. Riau TA 2010-2015		1			AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP LKPD Kab OKU, Kab OKUS, Kab OKUT TA 2015		1			AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia TA 2013-2015		1			AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia TA 2010-2015		1			AKN V dan VI	1		Dibalas via email untuk melengkapi permohonan dengan surat pengantar kampu
	LHP BPK LKPD Kab. Purbalingga TA 2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA. 2015		1			AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA. 2013-2015		1			AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA. 2015		1			AKN V dan VI	1		Dibalas via email untuk melengkapi permohonan dengan surat pengantar kampus
	LHP BPK LKPD Kab. Mukomuko dan Kab. Bengkulu Tengah TA 2015		1			AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA. 2010-2015		1			AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK Kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA. 2010-2015		1			AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK PDTT Kementerian Keuangan TA 2012 - 2015				1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT Kementerian Keuangan TA 2012 - 2015				1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT Kementerian Keuangan TA 2010-2015				1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT terkait PT Garuda Indonesia TA 2010-2013				1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT terkait PT Garuda Indonesia TA 2010-2015				1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT terkait OTSUS Papua TA 2010-2015				1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I dan II Tahun 2012-2015				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS II Tahun 2015 dan IHPS I Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS II Tahun 2015 dan IHPS I Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		IHPS II Tahun 2015 dan IHPS I Tahun 2016			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I dan II TA 2013-2016			1	AKN II	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I dan II TA 2013			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
2	Februari	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota, Se-Bali TA 2011-2016			1	AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA 2005 - 2015			1	AKN V dan VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LK Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2013			1	AKN III	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA. 2015			1	AKN V dan VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LK Kementerian Agama TA 2009-2011.			1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi Maluku, Kota Tual, dan Kab. Maluku Utara TA 2015			1	AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA. 2010-2015			1	AKN V dan VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Selatan TA 2009-2015			1	AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2013 - 2014			1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
LHP BPK LKPD Provinsi Sumatera Selatan TA 2010			1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)		

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK LKPD Provinsi Banten TA 2010-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabuapten dan Kota Se-Sumatera Utara TA 2014-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Seluruh Provinsi Se-indonesia TA 2013-2014				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi Kabupaten dan Kota se-NTB TA 2013 - 2015				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi Banten dan Kota Mojokerto TA 2014-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah TA 2011-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kabupaten Aceh Besar dan LK Kementerian Pendidikan Nasional TA 2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Seluruh Provinsi Se-indonesia TA 2013-2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kabupaten Merangin TA 2012 - 2015 dan LHP BPK LKPD Provinsi Sulawesi Barat serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya TA 2014 - 2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kab. Cilacap TA 2010 s.d. 2015		1			AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia TA 2013 s.d. 2015		1			AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK seluruh LKKL TA 2013 s.d. 2015		1				1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		LHP BPK LKPD Kab. Kampar dan Kota Pekanbaru TA 2015		1			AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
		LHP BPK LKPD Seluruh Provinsi Se-Indonesia TA 2015		1			AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
		LHP BPK Kinerja BUMN (Pertamina, Waskita Karya, AP, AP II, Pelindo II, PLN, Telkom, Pupuk Indonesia) TA 2008 s.d. 2015		1			AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diminta untuk memenuhi surat pengantar dari universitas)
		LHP BPK PDTT Garuda Indonesia TA 2013-2015				1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK PDTT Pertamina TA 2013-2015				1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK PDTT Infrastruktur Papua TA 2012				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK PDTT mengenai Pengelolaan Aset DKI Jakarta TA 2006-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP PDTT subsidi beras Perum Bulog TA 2013 dan 2014		1				1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
		LHP BPK PDTT BUMN (Pertamina, Waskita Karya, AP, AP II, Pelindo II, PLN, Telkom, Pupuk Indonesia) TA 2008 s.d. 2015		1			AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diminta untuk memenuhi surat pengantar dari universitas)
		IHPS I TA 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I dan II Tahun 2011-2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2015 - 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
3	Maret	LHP BPK LKPD seluruh provinsi se-Indonesia TA 2013-2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan kota Se-Bali TA 2010-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia TA 2009-2016				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Seluruh Provinsi Se-Indonesia TA 2012-2016				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indramayu, Tasikmalaya, Banyuwangi, Jombang, Lamongan, Probolinggo, Kapuas Hulu, Sintang, Kapuas, Mamasa, Jeneponto, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Nagekeo, Kota Tomohon dan Provinsi Maluku Utara TA 2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Se Yogyakarta TA 2011-2015, LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2013-2015, dan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013-2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kabupaten Bone TA 2015			1		AKN VI	1		Sudah terpenuhi (LHP dikiirim email ke <a href="mailto:andhisultan75@gmail.com">andhisultan75@gmail.com</a> )
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia TA 2014-2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kota Padang TA 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kab. Manggarai TA 2014 dan 2015				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2006-2015				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK atas LK Kemenkeu, Kementerian PU, Kemenhub, Kemen				1	AKN I s/d AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Pu, Kemendag, Kemenhukam TA 2005-2015, LHP BPK LKPD Provinsi DKI Jakarta, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Lampung, Kota Pekan Baru TA 2013-2015, LHP BPK atas LK TVRI dan SKK Migas TA 2012-2015								
	LHP BPK LKPD Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten bogor dan Kota Bogor TA 2015			1		AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Permintaan hanya sebagai tembusan ke BPK RI dan ditunjukkan kepada PPID BPK Jabar , serta telah terpenuhi permintaanya oleh BPK Jabar tanggal 15 Maret 2017)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh IndonesiaTA 2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota Se-Jawa Barat TA 2008 - 2011				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kab. Aceh Tenggara, Kab. Gayolues, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Klaten, Kab. Deli Serdang, dan Kab. Serdang Bedagai TA.2013-2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LK Kementerian Keuangan TA 2013-2015				1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK atas LKPD Prov. DIY TA 2016		1			AKN V	1		Dibalas via email bahwa pemeriksaan atas LKPD TA 2016 masih berlangsung

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota Seluruh Indonesia TA 2012		1			AKN V dan VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota Seluruh Indonesia TA 2011-2015		1			AKN V dan VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota Seluruh Indonesia TA 2015		1			AKN V dan VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP BPK LKPD Kabupaten Luwu Utara TA 2015		1				1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK LKPD Kabupaten Lebak TA 2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK LKPD Kabupaten Sinjai TA 2014 dan 2015		1				1		Dibalas via email untuk melengkapi dokumen persyaratan permintaan informasi
	LHP BPK LKPD Provinsi DIY TA 2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota Seluruh Indonesia TA 2014-2015		1			AKN V dan VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota Seluruh Indonesia TA 2015		1			AKN V dan VI	1		Terpenuhi, diambil langsung
	LHP LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se- Sumatera TA 2013-2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se- Sumatera TA 2014-2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP BPK Kinerja Provinsi atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK seluruh Pemeriksaan Kinerja TA 2014-2015				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK Kinerja PT PLN No. 08/Auditama VII/Kinerja/08/2016,				1	AKN VII	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kinerja atas Implementasi SAP Berbasis Akrual Prov/Kab/Kota		1				1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK Kinerja atas 6 LKKL dan 7 LKPD TA 2014 dan 2015		1				1	Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK PDTT Perum Percetakan Negara RI TA 2015-2016			1			1	Sudah Terpenuhi (Sudah dibuatkan surat keluar kepada si pemohon informasi bahwa LHP tersebut akan diberikan setelah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada IHPS I Tahun 2017 sekitar Bulan Oktober 2017)
	LHP BPK PDTT No. 04/Auditama VII/PDPT/01/2016.		1			AKN VII	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I dan II Tahun 2004-2016				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I dan II Tahun 2015-2016				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS II Tahun 2016			1		EPP	1	Sudah Terpenuhi (Sudah dibuatkan surat keluar dari Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia terkait Permintaan dokumen tersebut)
	IHPS I & II Tahun 2014-2015				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

4	April	LHP BPK LKPD Kab. Waropen TA. 2015				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD, Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia TA 2010-2013				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Aceh TA 2011-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA 2014				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia TA 2014 - 2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Banten TA 2005 - 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi. DKI Jakarta TA 2014				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Kota Sukabumi TA 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Prov Bali TA 2015				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LK Kementerian Agama TA 2014-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LK Kementerian Kesehatan TA 2014-2015				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Kab. Tulungagung TA 2014-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Kab. Mappi, Prov. Papua TA 2015 & 2016				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
LHP BPK LK Kemenkominfo TA 2013-2015				1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)		

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK LK KPU TA 2014-2015				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten, Kota Se-Banten TA 2013-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA 2013-2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LK Bank Indonesia TA 2015				1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA 2013-2015		1			AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA 2011-2015		1			AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK LKPD Kab. Cilacap TA 2010-2015		1			AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA 2011-2015		1			AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK LK Komnas HAM TA 2013-2015		1			AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA 2014-2015		1			AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK Seluruh LKKL TA 2011-2014		1			AKN I s.d. AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
	LHP BPK Seluruh LKKL TA 2014-2015		1			AKN I s.d. AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Pos)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA 2011-2015		1			AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		LHP BPK Kinerja PT. ASDP TA 2015 (Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Penyeberangan dan Pelabuhan Tahun Buku 2013 s.d. 2015 pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta, Banten, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara serta Instansi Terkait Lainnya)			1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK Kinerja Pengelolaan Rumah Susun Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2014			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK Kinerja Penerapan KTP Elektronik Pada Kemendagri TA 2013			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK Kinerja Penyelenggaraan Ibadah Haji TA 2014 - 2015			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK Kinerja atas Sarana Penyediaan Air Minum di Kabupaten Kuantan Senggigi TA 2015			1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK Kinerja e-Batarapos pada Bank Tabungan Negara TA 2010			1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK Kinerja atas pengelolaan Reklamasi dan Pasca Tambang di Kalimantan Timur TA 2015			1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Haji TA 2015	1			AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
		LHP BPK PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2012 Wilayah Kerja Pangkah Pada SKK Migas, KKKS Hess Indonesia Pangkah di Jakarta dan Gresik TA 2013-2015			1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		LHP BPK PDDT Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib pajak Tahun 2013 s.d 2016 dan LHP BPK PDDT kegiata Rantai Suplai Hulu Migas TA. 2015			1		AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK PDDT Pengelolaan Keuangan Desa Pemkab Temanggung, Grobogan, Jepara dan Brebes TA 2015-2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK PDDT seluruh BUMN TA 2010-2015				1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK PDDT Perum PNRI Tahun 2016			1		AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (LHP PDDT Yang akan diserahkan pada IHPS I tahun 2017 sehingga belum bisa di berikan.)
		LHP BPK PDDT Pengembalian Dana BLBI TA.2004				1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2015, IHPS I dan II Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I & II Tahun 2013 - 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I & II Tahun 2015 - 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I & II Tahun 2008, 2015 dan 2016			1		EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I dan II Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

5	Mei	LHP BPK LKPD Kota Madiun TA. 2005			1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Kota Depok TA. 2015			1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat TA 2011 s.d. 2015			1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi seluruh Indonesia TA 2004-2015			1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Kemendagri TA 2011-2015			1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKDP Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia TA 2015			1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKDP Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia TA 2015			1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Kabupaten Pematangsiantar TA 2015			1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se- Bengkulu dan Sumatera Selatan TA 2014-2015			1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Kabupaten Klaten TA 2015			1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPP TA 2013-2014			1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2010-2015			1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2008-2015			1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
LHP BPK LKPD Provinsi,			1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)		

	Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2008-2015								
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2008-2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2008-2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2013-2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2013-2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2008-2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2008-2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LK Kementerian Agama TA 2014-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LK Kejaksaan TA 2014-2015				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPP TA 2014-2015				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2008-2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LK Kementerian Perhubungan TA 2015				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kota Surabaya dan Kota Bandung TA 2012- 2014				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia TA 2013 - 2015			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh indonesia TA 2006-2009			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPP Tahun 2016			1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Kab. Mappi TA 2015			1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPP Tahun 2016			1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia TA 2012-2015			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPP Tahun 2016			1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Maluku Utara TA 2010-2015			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK atas LK Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, Kemendikbud TA 2013-2015			1	AKN III, AKN IV, dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LK Kementerian Pariwisata TA 2012-2015			1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK LK Kepolisian Indonesia dan Kejaksaan TA 2015			1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK atas LKPD Prov/Kab/Kota se-Indonesia TA 2015		1		AKN V dan AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP BPK atas LKPD Kab. Badung TA 2013 s.d. 2014		1		AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK atas LKPD Prov/Kab/Kota				AKN V dan AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos



	se-Indonesia TA 2014 s.d. 2016								
	LHP BPK atas LK Kemenristekdikti TA 2015 dan 2016, dan Kemenag TA 2015 dan 2016		1			AKN III dan AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK atas LKPD Prov/Kab/Kota di Jawa Timur TA 2011 s.d. 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK atas LKPD Prov/Kab/Kota se-Indonesia TA 2011 s.d. 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP BPK atas LKPD Prov. DIY TA 2013 dan 2014		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK atas LKPD Kab. Kupang TA 2015		1			AKN VI	1		Dibalas via email, diminta untuk melengkapi persyaratan permintaan informasi
	LHP BPK atas LKPD Prov/Kab/Kota di Jawa Tengah TA 2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK atas LKPD Prov. Jateng TA 2013 s.d. 2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK atas LKPD Prov/Kab/Kota se-Indonesia TA 2013 s.d. 2016		1			AKN V dan AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP BPK atas LK LPP TVRI TA 2014 dan 2015		1				1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK atas LKPD Kab. Polewali Mandar TA 2016, Prov. Sulawesi Barat TA 2016, Tangerang Selatan TA 2016		1			AKN V dan AKN VI	1		Dibalas via email bahwa PIK BPK Pusat memiliki LHP atas LKPD TA 2016 sekitar Oktober 2017, diarahkan untuk meminta ke BPK perwakilan
	LHP BPK atas Pilpres 2014 dan Dana Hibah Pilkada Trenggalek 2015		1				1		Dibalas via email bahwa LHP tersebut tidak ada, diminta untuk melihat daftar LHP BPK di IHPS melalui website BPK
	LHP BPK Kinerja Dana Pinjaman Luar Negeri IDB pada PT Kertas Kraft Aceh tahun 2007			1			1		Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK Kinerja terkait perusahaan jalan tol TA 2010-2015				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK atas Kinerja Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2012, 2013 dan 2016		1				1	Sudah Terpenuhi (Dikirim Via Email)
	LHP BPK PDTT PT. Freeport Indonesia Ta 2004-2005				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT Infrastruktur Ketenagalistrikan pada Kementerian ESDM dan PLN TA 2011-2014				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT BNPB TA 2011 - 2015				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT terkait Alkes DKI TA 2013-2015				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT Pengelolaan Eks Aset BPPN TA 2008-2010				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT Belaja Modal Infrastruktur TA 2015 -2016 Kab. Wakatobi				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT PNBPT freeport Departemen ESDM TA 2005				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT PT Garuda Indonesia TA 2013 dan 2014				1	AKN VII	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT atas Manajemen Aset dan Pengelolaan BMN No LHP 84/III-XVI.2/07/2008 TA 2008				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK PDTT atas PNBPT pada PT. Freeport Indonesia TA 2004-2005				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I dan IHPS II Tahun 2015 dan 2016				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I dan II Tahun 2005 s.d. 2007				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS II Tahun 2016				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		IHPS II Tahun 2016			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		Daftar kelompok temuan hasil pemeriksaan LKPD TA 2014 dan 2015 (lampiran IHPS)		1			1		Terpenuhi, dikirim via email
		Daftar kelompok temuan hasil pemeriksaan LKPD TA 2014 dan 2015 (lampiran IHPS)		1			1		Terpenuhi, dikirim via email
6	Juni	LHP BPK LKPD Kab.Malinau TA 2011-2015			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-NTT, Maluku dan Papua TA 2015			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2006 - 2007			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK Kemenpora Tahun 2015			1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Se-Jawa dan Se-Sumatera TA 2015			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang TA 2015			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LKPP Tahun 2015			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2015			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK RI pada Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenag, kementerian			1	AKN IV dan AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2014								
	LHP atas LKPD Kota/Kab di Jawa Barat TA 2016		1			AKN V	1		Dibalas via email, diarahkan untuk meminta ke BPK Perwakilan Jabar, karena PIK Pusat memiliki LHP atas LKPD TA 2016 sekitar bulan Okt 2017
	LHP atas LK Prov. Sumatera Barat TA 2013 s.d. 2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKKL dan LKPD TA 2013 s.d. 2015		1				1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP atas LKPD Kab. Tulungagung TA 2012 s.d 2015		1			AKN V	1		Diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan permintaan informasi
	LHP atas LKPD Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Tebo dan Kab. Bogor TA 2015 s.d. 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi untuk TA 2015 (dikirim via email). Untuk TA 2016, disampaikan bahwa PIK BPK Pusat baru akan memilikinya bulan Oktober 2017
	LHP atas LKPD se-Indonesia TA 2013 s.d. 2015		1			AKN V dan AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP atas LKPD Kota Madiun dan Kab. Madiun TA 2016		1			AKN V	1		Dibalas via email, diarahkan untuk meminta ke BPK Perwakilan Jatim, karena PIK Pusat memiliki LHP atas LKPD TA 2016 sekitar bulan Okt 2017
	LHP atas LK Badan Informasi Geospasial TA 2006 s.d. 2016		1				1		Dibalas via email untuk melengkapi dokumen persyaratan permintaan informasi
	LHP atas total aset dan realisasi belanja modal dan utang badan publik Lembaga Pemerintah Non Kementerian		1				1		Dibalas via email, bahwa BPK tidak mengeluarkan LHP atas total set dan realisasi belanja, melainkan LHP atas LK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP BPK Kinerja Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemensos Tahun 2015				1	AKN VI dan AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK Kinerja BPK Perwakilan D.I Yogyakarta atas upaya penyediaan air bersih pemkab gunungkidul Tahun 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK Kinerja Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2014		1				1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP BPK PDDT Perum Percetakan Negara RI TA 2015-2016			1		AKN VII		1	Surat datang kedua kalinya, surat pertama sudah ditindaklanjuti dengan Surat Keluar dan meminta lagi hal yang sama sudah di koordinasikan dengan satuan kerja terkait yaitu AKN VII dan mereka pun sudah menerima suratnya dan sekarang sedang menunggu konsep jawaban dari AKN VII (Auditorat VII.C)
	LHP BPK PDDT atas Pemeriksaan Pilleg Pilpres 2014 dan Pemeriksaan Dana Hibah Pilkada 2015			1		AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Sudah dikirim Via Email)
	LHP PDDT berupa Prosedur yang Disepakati Bersama yaitu Penelitian atas Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola Channeling			1		AKN II	1		Surat permintaan langsung kepada Tortama II, disposisi dan Nota Dinas kepada Humas
	IHPS II Tahun 2014				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I dan II Tahun 2015 - 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2017				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Sudah dibuat surat balasan ke

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

									Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman)
		Permintaan hasil audit BPK di Kab. Nganjuk		1				1	Dibalas via email, untuk mengisi formulir permintaan informasi dan melengkapi dokumen persyaratan
7	Juli	LHP BPK LK Kemenpora TA 2016				1	AKN III	1	Sudah Terpenuhi (ND permintaan LHP sudah disampaikan ke Kepala Auditorat III.B)
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota se-Indonesia TA 2013 s.d. 2015				1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP atas LKPD Jabodetabek TA 2014 s.d. 2015				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP atas LK KPK TA 2007-2016				1	AKN I	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP atas LKPD Kota Depok TA 2007 s.d. 2015				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota se-Provinsi Banten TA 2008 s.d. 2015				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat TA 2010 s.d. 2015				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP atas LK Kejaksaan RI TA 2015, LHP PDTT Balai Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI TA 2015				1	AKN I	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP atas LKKL/LKPD 8 entitas				1	AKN III dan AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP atas LKPD Kab. Nganjuk TA 2016		1				AKN V	1
LHP atas LKPD Kabupaten di Aceh TA 2016		1				AKN V	1	Dibalas via email bahwa PIK BPK akan memilikinya Oktober 2017, permintaan diteruskan kepada BPK Perwakilan Prov. Aceh	

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP atas LKPD Kab. Seram Bagian Barat TA 2016		1			AKN VI	1		Diteruskan kepada BPK Perwakilan Prov. Maluku untuk ditindaklanjuti
	LHP atas LK PT Pelindo II Tahun 2005 s.d. 2017		1			AKN VII	1		Dibalas via email bahwa LK BUMN diperiksa oleh KAP yang terdaftar di BPK
	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Aceh TA 2011 s.d. 2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP atas LKPD Kab. Kepulauan Talaud TA 2013 s.d. 2016		1			AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Indonesia TA 2013 s.d. 2015		1			AKN V dan AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP atas LKPD Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga TA 2014 s.d. 2015		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP Kemen PUPR, Kemenpar, Kemenhub TA 2-016			1		AKN I, AKN III, AKN IV	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKKL/LKPD 8 entitas				1	AKN III, AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BLBI TA 2006 dan PAD Sul. Tenggara 2009				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Pemkab Bogor 5 Tahun Terakhir				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK SKK Migas 2013,2014,2015				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP & LK Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan				1			1	Sudah Terpenuhi (ND Karo kepada AKN terkait)
	LHP Bantuan Keuangan Parpol TA 2005, 2007, 2008, 2009 Muara Enim, Serang. DKI, Banten				1			1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP PT Asabri Tahun 2016				1			1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kab Kota seluruh Indonesia 2010-2015				1	AKN V dan AKN VI		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP KPK TA 2015-2016				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kab/Kota Se- Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2011 s.d 2015				1	AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA 2011 s.d 2015				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kab. Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kota Lubuklinggau TA2015				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Bulog TA 2009 -2015, LHP SKK Migas TA 2013 dan 2014 dan LHP PTPN X, XII, dan XIII				1	AKN VII	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Provinsi DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Bekasi TA 2015, LHP PT Pembangunan Jaya 2015 , LHP PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung 2015				1	AKN V dan AKN VII	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA 2011 s.d 2015				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kab. Asahan, batu Bara, Labura, Labuan utara selatan TA 2015				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK : Kementerian Perdagangan, Kemensos, Kemenkes, Kementerian PU dan Perumahan, Kementerian Pertanian TA 2016				1	AKN II, AKN III, AKN IV, AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LK BPPT TB 2015, LK Kemenristek Dikti TB 2015, LK LAPAN TB 2015, LK LIPI TB 2015, PDTT Program 10.000 MW PT. PLN				1		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LK Daerah Prov. Jawa Tengah TA.				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	2012-2016								
	LHP LK Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012				1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK KPK Tahun 2015, LHP Kinerja KPK Tahun 2011				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kinerja atas KPK TA 2007-2016				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kinerja Pelayanan Kesehatan, Administrasi Induk dan pelayanan satu pintu TA 2015 dan 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LK Kinerja Kementerian Kehutanan TA.2016				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kinerja PT Pelindo I Tahun 2013 dan 2014		1			AKN VII	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kab. Kapuas TA 2014 s.d. 2016		1			AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP Kinerja 4 pemerintah daerah dan 4 kementerian TA 2015		1				1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP Kinerja perusahaan pertambangan batubara di Kab. Sarolangun Tahun 2010 s.d. 2015		1				1		Dibalas via email, dijelaskan bahwa BPK memeriksa APBN/APBD
	LHP BPK PDDT PT Freeport Indonesia Tahun 2013-2015				1	AKN IV	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP PDDT atas KPK TA 2007-2016				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP PDDT berupa Prosedur yang Disepakati Bersama yaitu Penelitian atas Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola Channeling			1		AKN II	1		Surat permintaan langsung kepada Tortama II, disposisi dan Nota Dinas kepada Humas (Sudah terpenuhi, diambil langsung di PIK)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Permintaan LHP PD TT PNRI TA 2016				1			1	Belum dapat diberikan karena masih proses IHPS I 2017
		LHP PD TT Kemendes TA 2016				1	AKN III		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016				1	EPP		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2005-2016				1	EPP		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		Permintaan dokumen pengaduan terkait Kementan dalam rangka implementasi proyek perubahan pemutakhiran database entitas			1		Humas & KSI		1	Sudah dijawab melalui Nodin Karo Humas dan soft file nya
		Daftar opini LKKL TA 2016, daftar permasalahan SPI dan ketidakpatuhan LKKL TA 2016		1					1	Dibalas via email bahwa data tersebut ada setelah penyerahan IHPS I 2017
8	Agustus	LHP atas LKPD TA 2016		1			AKN V dan AKN VI		1	Dibalas via email bahwa LHP atas LKPD TA 2016 baru akan ada dan dapat diserahkan bulan Oktober 2017
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Kepulauan Riau TA 2006 s.d. 2010		1			AKN V		1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Kab. Sambas TA 2010 s.d. 2016		1			AKN VI		1	Terpenuhi s.d. TA 2015, dikirim via email
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Sulawesi Selatan TA 2014 s.d. 2015		1			AKN VI		1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LK BPWS Tahun 2016 dan LHP dana desa		1			AKN III		1	Dibalas via email bahwa LHP atas LK BPWS TA 2016 akan ada pada bulan Oktober 2017, pemeriksaan dana desa belum dilaksanakan
		LHP atas LKPD di Sumatera Selatan TA 2015 s.d. 2016		1			AKN V		1	Terpenuhi TA 2015, dikirim melalui email
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota se-Indonesia TA 2011 s.d. 2015		1			AKN V dan AKN VI		1	Terpenuhi, dikirim via pos
		LHP atas LKKL TA 2015 s.d. 2016		1			AKN I s.d. AKN VI		1	Terpenuhi TA 2015, dikirim via pos

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP LK Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015				1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Provinsi Bengkulu Tahun 2010 - 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 - 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kementerian ESDM Tahun 2014				1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kementerian Pertanian Tahun 2015, LHP LK Kementerian Perindustrian Tahun 2015, LHP LK Kementerian Pendidikan Tahun 2015				1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Povinsi NTB, LHP LK Provinsi DI Yogyakarta, LHP LK BKPM				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Pengelolaan. & Pertgijwb Keu dan aset pada Badan Pengelola Komplek Kemayoran TA 2005				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD se-indonesia Tahun 2016; LHP LK Kemendiknas & Kemendikbud Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPP TA 2014 dan 2015				1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD se-Indonesia TA 2014 dan 2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK BIG TA 2015 dan LHP LK LAPAN TA 2015				1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Penyelenggaraan Ibadah Haji				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Kab dan Kota di Prov Jawa Barat TA 2011-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK 2013-2015 Kab. Puncak, Kab. Tolikara, Prov. Papua, Kab. Mimika, Kota Jayapura, Kab.				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Jayapura, Kemen. PUPR,							
	LHP LKPD Prov. Papua TA 2013-2015			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPP Kementerian Perikanan dan kelautan TA 2015			1	AKN IV	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Kab/Kota Se-Indonesia TA 2013 s.d 2015			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Se-Indonesia TA 2011-2015			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2013 s.d 2015 dan LHP LKPD Kab/Kota Se Provinsi Jawa Timur TA 2013 s.d 2015			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPP Kementerian dan Lembaga Se-Indonesia TA 2015			1	AKN I s.d AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja 2014 - 2016			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kemendes 2014 - 2015, LHP Kemenhub 2014 - 2015, LHP Kab/ Kota Se-Sulawawesi Barat 2013 - 2015			1	AKN III, AKN I dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK DPR 2014 - 2015			1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kermenag 2015			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Provinsi Se-Indonesia 2012 - 2015			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	Permintaan LHP BPK atas LK TA 2014-2016 pada beberapa entitas pemeriksaan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 2. Universitas Diponegoro Semarang; 3. Universitas Negeri Semarang; dan		1		AKN III.C, AKN VI.A, AKN VII.D	1		Sudah dikirimkan surat jawaban PPID

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		4. Politeknik Negeri Semarang.							
		Permintaan LHP LK Kemenristek Dikti TA 2014-2016		1		Humas dan KSI	1		Sudah dikirimkan LHP LK Kemendikbud TA 2014 dan LHP LK Kemenristekdikti TA 2015, disertai surat jawaban PPID untuk kembali menerangkan hal terkait
		LHP atas Politeknik Kesehatan Medan Tahun 2017	1			AKN VI	1		Dibalas via email bahwa BPK tidak melakukan pemeriksaan atas setiap satuan kerja pada Kementerian Kesehatan
		LHP Kinerja 2013-2015 Bank Papua			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP atas Belanja Daerah Kab. OKU Selatan Tahun 2015	1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
		LHP PDDT IHPS II Tahun 2016			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP PDDT 2013-2015 Bank Papua			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP PDDT Kemenhan, Mabes dan TNI Semester I tahun 2014 dan 2015			1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I dan II Tahun 2016			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2016			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2015, IHPS II Tahun 2016			1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
9	September	LHP atas LKPD Kota Tanjungbalai TA 2015	1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas 16 LKPD dan LHP atas LK KKP TA 2015 dan 2016	1			AKN V, AKN VI, AKN III	1		Terpenuhi untuk TA 2015, dikirim via email
		LHP atas LKPD Kab. Tulungagung TA 2016	1			AKN V	1		Dibalas via email bahwa akan tersedia bulan Oktober 2017
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, Banten TA 2014 s.d. 2015	1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP LKPD Se-Indonesia TA 2013-2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Jawa Barat 2011-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Provinsi Papua (PDTT dan Kinerja Kerja TA 2016				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK Tahun 2016 semester II				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Papua TA 2004-2013				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Manajemen Aset (Pengelolaan Milik Negara) khusus aset tanah dan bangunan TA 2015 Semester II pada unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodam Jaya				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPJS Kesehatan TA 2016				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LKPD Prov. Sumatera Barat, Kota Cirebon, Kabupaten Sorong Selatan				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	Audit BPK seluruh provinsi, Kota/Kabupaten, Kementerian PUPR ta 2015				1	AKN IV, AKN V, dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD PEMKAB SIKKA TA 2006-2007				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh pemda TA 2013-2015				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Banten				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2011-2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	TLHP 2014 dan 2015				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP LKPD Provindi Bali TA 2013-2016				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LKPD 2016 Se-Indonesia				1	AKN V dan VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LK KPK TA 2015 dan 2016				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LK KEMENDIKBUD TA 2013 dan PDTT PNBP 2011-2012				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Banten dan Kota Cilegon TA 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP KPK 2013				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK KEMENHUT 2015, LHP LK PD Sulawesi Selatan 2015, LHP LK PD Jawa Tengah 2015				1	AKN IV, AKN V, dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Pulau Jawa				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Kabupaten Donggala TA.2013-2014 dan LHP LKPD Kabupaten Sigi TA.2015				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LKPD se-Pulau Jawa TA 2014 s.d. 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kinerja di Kaltim TA 2016 (3 LHP)		1			AKN VII	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas PT Dirgantara Indonesia TA 2011 s.d. 2015		1			AKN VII	1		Dibalas via email bahwa LHP terakhir ada di IHPS I 2017, terbit bulan Oktober 2017
	LHP PDTT di Kaltim TA 2016 (1 LHP)		1			AKN VII	1		Terpenuhi, dikirim via email
	IHPS 1 Tahun 2016				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	Permohonan konfirmasi dan klarifikasi terhadap tindak lanjut LHP BPK atas LKPD Kab. Karimun TA 2006 s.d. 2015			1		AKN V	1		Pusat sebagai tembusan, telah ditindaklanjuti oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Total kerugian negara dan daftar opini tiap K/L TA 2004 s.d. 2016	1		PIK	1	Dibalas via email bahwa data tersebut ada di IHPS BPK
		Laporan survey manfaat pemeriksaan kinerja dan harapan stakeholder terhadap pemeriksaan kinerja Ditama Revbang Tahun 2013	1			1	Disampaikan kepada Ditama Revbang untuk menyediakan data tersebut
10	Oktober	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Sumatera Selatan TA 2016	1		AKN V	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKKL TA 2014 s.d. 2016	1		AKN I s.d. AKN VII	1	Terpenuhi, dikirim via pos
		LHP atas LKPD Kab. Paser TA 2015 dan 2016	1		AKN V	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Kota Samarinda dan Kab. Kutai Kartanegara TA 2015	1		AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LK KKP TA 2016	1		AKN IV	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Prov. Bengkulu, Kota Bengkulu, Kab. Kepahiang, Kab. Mukomuko TA 2016	1		AKN V	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Indonesia TA 2016	1		AKN V dan AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via pos
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Indonesia TA 2016	1		AKN V dan AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via pos
		LHP atas LKPD Kab. Deli Serdang TA 2016	1		AKN V	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Tebo, Prov. Lampung, Prov. Sumut TA 2016	1		AKN V	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LK Kemenkes, Kemendes dan Kab. Langkat TA 2016	1		AKN III, AKN V, AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Indonesia TA 2016	1		AKN V dan AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via pos
LHP atas LKPD 16 Pemerintah Daerah dan LK KKP TA 2016	1		AKN IV, AKN V, AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via email		



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota TA 2014 s.d. 2016		1			AKN V dan AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota TA 2014 s.d. 2016		1			AKN V dan AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP LK BUMN di Sumsel TA 2015		1			AKN VII	1		Dibalas via email bahwa LK BUMN diperiksa oleh KAP
	LHP atas 6 LKKL dan 8 LKPD TA 2016		1			AKN I s.d. AKN VII	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKPD Prov. DKI Jakarta TA 2012 dan 2013		1			AKN V	1		Diminta untuk melengkapi persyaratan permintaan data
	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Jawa Barat TA 2015 dan 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Maluku TA 2016		1			AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKPD Kab. Tulungagung TA 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKPD Kab. Kapuas TA 2016		1			AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKPD Kab. Cianjur TA 2004 s.d. 2006		1			AKN V	1		Diminta untuk melengkapi persyaratan permintaan data
	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Indonesia TA 2014 s.d. 2016		1			AKN V dan AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	LHP atas LKPD Jabodetabek TA 2014 s.d. 2016		1			AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LK Kementerian Dalam Negeri TA 2010 s.d. 2015 dan LHP atas LKPD DKI Jakarta TA 2010 s.d. 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKPD se-Pulau Jawa TA 2015 dan 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKPD Provinsi Jambi TA 2014 dan 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Pelindo II Tahun Buku 2007-Sem I 2008			1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKPD Prov. Jawa Barat TA 2016 dan LHP atas Belanja Daerah Prov. Jawa Barat TA 2014 s.d. 2016			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LK Kemenpora, LK KKP, LK Komnas HAM, LK LPP TVRI, LK Bakamla, LK Bekraf TA 2014 s.d. 2016			1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LK Kemendikbud TA 2014			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD TA 2014 s.d. 2016			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKKL dan BUMN TA 2016			1	AKN I s.d. AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LK Kemenkumham TA 2016			1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKPD Kab/Kota di Pulau Jawa TA 2011 s.d. 2015			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LK LPS TA 2013, 2014, 2016			1	AKN II	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Seluruh Indonesia TA 2016			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Banpol TA 2013, 2014 dan 2016			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 214 s.d 2015 dan SK No. 551 Tahun 2016 tentang informasi yang dikecualikan dilingkungan BPK			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD TA 2012 - 2015 Kota Palu, Kota Jambi, Kab. Kotawaringin Bartat, kota Kendari, Kota Manado,			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

	Kota Ambon, kab. Oku Selatan, Kab. Puncak, Kab. Kuantan Singingi, Kota Kupang serta LHP Kinerja Kotawaringin Barat TA 2016 dan LHP PDAM Kab. Kotawaringin Barat TA 2013							
	LHP LKPP Se-Indonesia TA 2005 - 2008 dan LHP Kinerja BMN				1	AKN I s.d. AKN VII	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK Tahun 2015 - 2016				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kemenhan Tahun 2016				1	AKN I	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LK Kemenag Tahun 2015 - 2016				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKPD Se-Jabodetabek TA 2016				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Kab/Kota Se-Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPP Se-Indonesia TA 2015				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK Tahun 2014 - 2016				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK. Kemenpora Tahun 2012 - 2016				1	AKN III	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 -2013				1	AKN V	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK TA.2016-2017				1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK BPK Kab/Kota Indonesia Bagian Timur Tahun 2016				1	AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKPD Kota/ Kab dan Provinsi se-Indonesia TA 2015 dan 2016				1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKPD Kota/ Kab dan Provinsi se-Indonesia TA 2016				1	AKN V dan AKN VI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP atas LKPP Kemenkes, Kemendagri, Kemenpora, LAPAN TA 2016 ) LHP atas LKPD (Prov DKI, Jawa Barat, Kb. Karawang, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Depok, Kab. Tangerang, Tangsel, Kota Bogor dan Kab. Bogor )				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKPP Kominfo TA 2010-2016				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Tahun 2014 - 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LKPD di Pulau Jawa 2011 - 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LKPD Seluruh Indonesia 2014 - 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LK Tahun 2015-2016 Wilayah timur				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LKPD DKI Jakarta Tahun 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kemensos TA 2016 LHP LK Kemen Desa TA 2016 LHP Kin ICOFR 2015				1	AKN II dan AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Jabodetabek dan Karawang TA 2014-2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Program JKN Tahun 2015 di Kab. Kutai Kartanegara		1			AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP Kin KPK Tahun 2013				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP PAD dan Belanja Daerah TA 2016 di Kota Samarinda		1			AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP Belanja Daerah Prov. Jawa Barat TA 2015 dan 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via pos
	Hasil pemeriksaan atas penerbitan izin pelaksanaan reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta dan pelaksanaan			1		AKN V	1		SUDAH TERPENUHI MELALUI SURAT PPID No.. 463/S/X.2/11/2017 TGL 23 NOV 2017

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	akuisisi Blok Migas 405a di Algeria oleh PT Pertamina (Persero)								
	Permohonan salinan LHP BPK No. 88/ST/VII-XV.2/11/2005 tanggal 16 November 2005 (Resume Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Kantor Pusat, Cabang Tanjung Perak Surabaya, Cabang Trisakti Banjarmasin dan Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat pada Anak Perusahaan (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia) di Surabaya dan Banjarmasin)			1				1	LHP sudah dikirim via email dan pos
	LHP PDDT Bagi Hasil Migas SKK Migas Tahun 2015				1	AKN VII		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP PDDT Pelindo II TA 2015				1	AKN VII		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP PDDT Prov. Lampung Th.2015-2016, LHP LK Prov. Lampung Th.2013-2016				1	AKN V		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2017				1	EPP		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2017				1	EPP		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2017				1	EPP		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2017				1	EPP		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS II 2016 dan IHPS I 2017				1	EPP		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2017				1	EPP		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2017				1	EPP		1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		IHPS I Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2016 (Lampiran 2.1.1 dan 2.1.3 ), IHPS I 2015 (Lampiran 2.6), IHPS I 2014 ( Lampiran 9 dan Lampiran 10			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS Semester I dan II Tahun 2015 - 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		Lampiran 2.1.3 IHPS I Tahun 2017, lampiran 1.1.2 - 1.1.6 IHPS I Tahun 2016			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II Tahun 2016 & IHPS I Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS II 2016 dan IHPS I 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
11	November	LHP atas LKPD Kota Tanjungbalai, Kab. Asahan, Kab. Batubara TA 2016	1			AKN V	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Kab. Banyumas TA 2016	1			AKN V	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Kab. Cianjur TA 2004 s.d. 2006, 2016	1			AKN V	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Indonesia TA 2010 s.d. 2016	1			AKN V dan AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Riau TA 2015 s.d. 2016	1			AKN V	1	Terpenuhi, dikirim via email

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Indonesia TA 2016		1			AKN V dan AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKPD Kab. di Bengkulu TA 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LK 7 Kementerian dan 5 pemda TA 2016		1			AKN I s.d. AKN VII	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Jawa TA 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Kalimantan Timur TA 2016		1			AKN VI	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LKPD Kota Merauke TA 2013 dan 2014		1			AKN VI	1		Dibalas via email untuk melengkapi syarat permintaan informasi
	LHP atas LKPD Kab. Banyumas TA 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP atas LK BPWS TA 2016		1			AKN III	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP LK Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Negeri Semarang dan Politeknik Negeri Semarang TA 2016			1			1		Dijawab melalui surat PPID No. 461/S/X.2/11/2017 tgl 20 November 2017
	Permintaan penjelasan terkait LHP LKPD Kab. Nias Barat TA 2015 dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK			1		AKN V	1		Dijawab melalui surat PPID No. 444/S/X.2/11/2017 tgl 8 November 2017
	LHP LK Seluruh Indonesia Tahun 2013-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK KPK TA 2015 dan 2016				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kab/Kota seluruh Indonesia TA 2014, 2015, 2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Subsidi Listrik TA 2015 dan LHP Program Percepatan 10.000 MW Th. 2006-2015 (sesuai surat permohonan Kepala				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Tiga No. S-10780/WPJ.19/KP.03/2017 tgl 6 November 2017 perihal permohonan LHP BPK atas WP terdaftar di KPPWP Besar Tiga)								
	LHP pengelolaan dan pertanggungjawaban aset pada Dept. Perdagangan tahun 2005				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK seluruh K/L TA 2016, LHP seluruh BUMN TA 2016, LHP LK Prov, Kab/Kota di Jawa Barat TA 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Perizinan DPMPTSP DKI				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kemen PUPR TA 2015 dan 2016				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Banten, DKI, Jabar TA 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP seluruh entitas BPK TA 2015 sem II dan 2016 Sem I				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi/Kab/Kota Papua Barat TA 2015 dan 2016				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Kab/kota/ Provinsi Se-Indonesia TA 2015 dan IHPS I 2015 dan IHPS I 2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi se-Indonesia Tahun 2008 - 2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kementerian Pertanian dan				1	AKN IV	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	PUPR Tahun 2013 - 2016								
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2015				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD seluruh Indonesia TA 2014-2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP KPK TA.2016				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	- LHP Badan Koordinasi Penanaman Modal TA 2016 - LHP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2016 - LHP Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2016 - LHP Dewan Ketahanan Nasional TA 2016 - LHP Pemda Kabupaten Gresik TA 2016 - LHP Pemda Kabupaten Ciamis TA 2016 - LHP Pemda Kabupaten Cianjur TA 2016				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	- LHP Pemda Kabupaten Kuningan TA 2016 - LHP Pemda Kota Pasuruan TA 2016								
	LHP LKPD Kab. Merauke TA 2009 dan 2010				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Kab/Kota/ Provinsi Se-Indonesia TA 2006 s.d 2010 dan 2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	1. LHP LKPD Prov. Jatim TA.2016 2. LK Kementerian PU TA.2016 3. LK Kementerian Perhubungan TA.2016				1	AKN V ; AKN I ; AKN IV	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPP Kemendikbud TA 2016 dan 2015				1	AKN III	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Kota Depok TA 2012 - 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Kabupaten Merauke tahun 2013 - 2014				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Provinsi se-Indonesia Tahun 2014 - 2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK Komisi Yudisial TA 2016, LHP Arsip Nasional TA 2016, LHP Badan Tenaga Nuklir TA 2016				1	AKN I	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	Data fisik contoh LHP				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Kinerja di Kab. Cianjur TA 2004 s.d. 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP Kinerja Dinas Pelayanan Pajak (28/LHP/XVIII.JKT.2/12/2016)		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP kinerja dan DTT beberapa				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	BUMN (sesuai surat permohonan Kepala Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Tiga No. S-10780/WPJ.19/KP.03/2017 tgl 6 November 2017 perihal permohonan LHP BPK atas WP terdaftar di KPPWP Besar Tiga)								
	LHP PDTT di Kab. Cianjur TA 2004 s.d. 2016		1			AKN V	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP PDTT Subsidi Pupuk pada Pusri, Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda		1			AKN VII	1		Terpenuhi, dikirim via email
	LHP PDTT Investasi Hulu Pertamina TA 2013-2016 dan LHP LKPD DKI TA 2016				1	AKN VII dan AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP PDTT Dana Pensiun Pertamina TA 2013				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas LKPD tahun 2013 s.d. 2015 (lampiran IHPS)		1			Biro Humas (PIK)	1		Terpenuhi, dikirim via email
	IHPS Tahun 2012-2017				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	Buku IHPS I 2017 dan PDTT Kemenhub, Kaltim, dan Kab. Kutai TA 2009-2016				1	EPP AKN I dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	Lampiran IHPS I 2017				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2017				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	IHPS I Tahun 2017				1	EPP	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		IHPS I Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		1. IHPS I Tahun 2014 2. IHPS II Tahun 2014 3. IHPS II Tahun 2015 4. IHPS I Tahun 2016			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		IHPS I dan II Tahun 2015, IHPS I dan II Tahun 2016			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		1. Struktur Organisasi 2. Ruang Lingkup tugas dan tanggungjawab auditorat utama investigasi			1	Biro SDM & AUI	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		Laporan Tahun 2017			1	EPP	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
12	Desember	LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Kalimantan Timur TA 2016	1			AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LK Kementerian Keuangan TA 2015	1			AKN II	1	Dibalas via email untuk melengkapi persyaratan permintaan informasi
		LHP atas LK DPR TA 2012 s.d. 2016	1			AKN II	1	Dibalas via email untuk melengkapi persyaratan permintaan informasi
		LHP atas LKPD Prov. Sulawesi Selatan TA 2016	1			AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via email
		LHP atas LKPD Prov Papua Barat TA 2015	1			AKN VI	1	Dibalas via email untuk melengkapi persyaratan permintaan informasi
		LHP atas LK Kementerian Agama TA 2015 s.d. 2016	1			AKN V	1	Dibalas via email untuk melengkapi persyaratan permintaan informasi
		LHP atas LKPD Prov/Kab/Kota di Indonesia TA 2016	1			AKN V dan AKN VI	1	Terpenuhi, dikirim via pos
		LHP BPK atas BPWS TA 2016 dan LHP Dana Desa Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep		1		AKN V	1	Terpenuhi, dibalas via email

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	TA 2016								
	LHP LKPD Pemprov DKI, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kota Surabaya, LHP LK Kementerian Lingkungan Hidup				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP 2016 : provinsi kep. Riau, LHP 2016 : kab muara bungo, kab bangko, kab tanjung jabar, kab muara jambi, kab merangin. LHP 2016 : kota bogor, kab. Bogor, LHP 2016 : kab aceh singkil, simeule, kab. Nagara raya, LHP 2016 : kota dan kab. Kupang, LHP 2016 : kota maluku, kota dan kab. Cirebon, LHP 2016 : kota dan kab. Bekasi				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP BPK RI TA 2016				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi hasil audit BPK di 5 pabrik pupuk (sriwijaya, petrokimia, Gresik, Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar Muda) serta holding pupuk Indonesia 2011 - 2016				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP KEMENPORA : 2013 - 2016, LHP KKP : 2013 - 2016, LHP BUN : 2013 - 2016, LHP Kominfo : 2013 - 2016, LHP PT. INKA : 2013 - 2016, LHP BKKBN 2013 - 2016.				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA TA 2016				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK BNPB 2015 - 2017				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP-LK Kemenpora 2014 - 2016,				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	LHP Asian games 2018, LHP subsidi pupuk pertanian 2016, LHP Bansos Kemensos 2015 - 2016.							
	LHP atas LKPD Kab/Provinsi di Sumatera Selatan			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP atas LKPD Kab. Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, Cilacap, Wonosobo, Kepulauan Anambas, Tasikmalaya, Bogor TA 2012 - 2016			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LK IPDN Bandung, Badan Geologi, PT Telkom, PT Pos, PT Bio Farma, PTPN VIII, Bank Jabar Banten, Perum Perumnas Regional IV TA 2016			1		1		Sudah Terpenuhi (Surat keluar (tanggapan atas permintaan informasi) dikirimkan melalui email pikbpkri ke dpwjabarkomunitas@gmail.com)
	LHP BPJS Tahun 2015			1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP Pemkot Depok TA 2012 - 2016			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Maluku Utara TA 2016			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP DPR Tahun 2012 - 2016			1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2016			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD se - indonesia 2015 - 2016			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD se -banten 2011 - 2016			1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP kab bekasi, kota bekasi, kab sleman, kota kupang			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD Provinsi Se-Indonesia Tahun 2013 - 2016			1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
	LHP LKPD kab. Taliabu TA 2015 - 2016			1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		LHP LKPD Kota dan kab bogor 2012 - 2016, kab wonogiri, lhp UI 2012 - 2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP LKPD Kab. Sula 2006 - 2016, LHP Kab. Pulau Taliabu 2014 - 2016.				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP kementerian perindustrian				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP seindonesia 2011 - 2016				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP Pemprov DKI 2014 - 2016				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP BPK RI TA 2010 - 2015				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP LKPD Sumut 2013 - 2015				1	AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP Papua & papua barat 2014 - 2016, Perhutani 2009 - 2012, DTT otsus papua 2011 - 2012				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP SULAWESI SELATAN 2014 - 2016				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2015-2016	1				AKN VII	1		Terpenuhi, dikirim via email
		LHP PDDT Perum PNRI TA 2016				1	AKN VII	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP PDDT PT. Freeport Tahun 2013 - 2015				1		1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		LHP PDDT Asian Games XVIII TA 2016 & LHP Seluruh Indonesia Tahun 2014 - 2016				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		lhps I TA 2008 dan TA 2010 lampiran lhps				1	AKN V dan AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
2	Non Pemeriksaan		7	249	147	32		435		
1	Januari	Permohonan menjadi Narasumber			1		AKN V	1		Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Tortama KN

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

									V)
		Penyampaian undangan pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 dan Reviu Tender Pra DIPA Tahun Anggaran 2017			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua)
		Undangan Workshop Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 dan Reviu Tender Pra DIPA Tahun Anggaran 2017			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua)
		Penyampaian Surat Undangan Rapat			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua)
		Penyampaian Surat Permintaan data dan dokumen			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua)
		Permohonan bezzeting pemeriksa (berdasarkan pendidikan)		1			BIRO SDM	1	Disampaikan kepada Kepala Biro SDM untuk menyediakan data
		Permohonan kunjungan dari HIMA Perbanas Institute		1			SUBBAG HLN	1	Disampaikan kepada Subbag HLN untuk ditindaklanjuti
	1	Informasi terkait surat pengaduan yang sudah di FAX apa sudah diterima apa belum						1	Fax telah diterima dan Sudah dibalas via e-mail (Akan ditindaklanjuti)
		Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan mengenai Salinan Keputusan Menteri Keuangan			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua)
	1	Penawaran Catering Aqiqah						1	Bukan Tupoksi BPK
	1	Menanyakan tindak lanjut terhadap surat pengaduan yang sudah di Fax tanggal 7 Januari 2017 terkait permohonan pemeriksaan penyalahgunaan ADD desa Kiku					BIRO HUMAS dan KSI	1	Sudah di balas Via Email, surat yang di Fax sudah di teruskan kepada Ketua BPK



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Boko								
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan mengenai Salinan Keputusan Menteri Keuangan			1		KETUA BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua)
	Penyampaian surat permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak TA. 2017-2018			1		KETUA BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua)
	Penyampaian Surat Permohonan Audiensi			1		KETUA BPK	1		Sudah Terpenuhi (Sudah diadakan pertemuan pada hari Selasa, 24 Januari 2017 dengan AKN VII)
	Penyampaian Surat Keputusan Kepala KPPN Magelang Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang atau Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada KPPN Magelang TA 2017			1		KETUA BPK	1		Surat sudah didisposisikan juga oleh Ketua BPK ke Anggota II untuk diketahui di PIK dicatat dilaporan dan difilekan
	Menanyakan tata cara mengundang ketua BPK sebagai narasumber	1					1		Sudah Di Balas Via Email untuk Menyampaikan Surat Permohonan Menjadi Narasumber
	Penyampaian Permintaan Penetapan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara			1		KETUA BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua)
	Meminta informasi terkait siapa lembaga pengawas yang bertugas mengawasi penggunaan dana desa	1					1		Sudah di balas Via email
	Pertanyaan terkait lolos butuh ke BPK		1			BIRO SDM	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat lamaran lolos butuh ke SDM
	Mempertanyakan apakah LHP TA 2015 sudah dapat diminta		1				1		Dibalas via email bahwa daftar LHP TA 2015 yang boleh diminta dapat dilihat di IHPS I 2016
	Permintaan Laporan Keuangan yang ada di Pemprov se-Indonesia TA		1				1		Dibalas via email bahwa data tersebut bukan milik BPK, bila maksudnya

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	2013-2015							LHP harap untuk mengganti surat permohonan
	Pertanyaan informasi magang		1			SUBBAG HLN	1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari kampus
	Pertanyaan informasi magang		1			SUBBAG HLN	1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari kampus
	Pertanyaan informasi magang		1			SUBBAG HLN	1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari kampus
	Pertanyaan informasi magang		1			SUBBAG HLN	1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari kampus
	Pertanyaan informasi magang		1			SUBBAG HLN	1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari kampus
	Pertanyaan informasi magang		1			SUBBAG HLN	1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari kampus
	Pertanyaan informasi magang		1			SUBBAG HLN	1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari kampus
	Pertanyaan informasi magang		1			SUBBAG HLN	1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari kampus
	Pertanyaan informasi magang		1			SUBBAG HLN	1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari kampus
	Informasi Pembukaan Lowongan Kerja di BPK Provinsi Sulawesi Tengah	1				BIRO SDM	1	Sudah Dibalas Via Email bahwa BPK Belum Membuka Lowongan Tahun 2017
	Mempertanyakan mengenai lamaran pekerjaan di BPK		1			BIRO SDM	1	Dibalas via email bahwa saat ini BPK belum membuka lowongan CPNS
	Mempertanyakan mengenai lamaran		1			BIRO SDM	1	Dibalas via email bahwa saat ini BPK belum

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		pekerjaan di BPK							membuka lowongan CPNS
		Mempertanyakan tata cara meminta LHP terkait LHP BUMN		1			AKN VII	1	Dibalas via email dan memberitahukan tata cara serta SOP mengenai permintaan informasi serta harus menyebutkan secara spesifik LHP yang diminta
		Mempertanyakan mengenai lamaran pekerjaan di BPK		1			BIRO SDM	1	Dibalas via email bahwa saat ini BPK belum membuka lowongan CPNS
2	Februari	Undangan Pertemuan Sosialisasi Awal Mekanisme Penyusunan Kerangka Regulasi dalam RKP/Renja K/L Tahun 2018 menggunakan sistem e-planning			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
		Undangan Permohonan menjadi Narasumber Diskusi Publik, "Bincang Lentera: Membongkar Putusan MK terhadap Pasal 2 dan 3 UU Tipikor"			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
		Undangan Pertemuan Terkait Tindak Lanjut Laporan Masyarakat			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
		Undangan Pertemuan terkait tindak lanjut Laporan Masyarakat			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
		Surat Undangan Rapat Pengembangan Instrumen Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)			1		REVBANG	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Kaditama Revbang)
		Permintaan data Bezzeting Pegawai BPK Kabupaten Se - Indonesia TA 2013- 2014			1		BIRO SDM	1	Sudah Terpenuhi (Surat ini sebelumnya sudah masuk melalui email dan sudah ditangani serta ditindaklanjuti)
		Pemohonan Kunjungan/ Kuliah Kerja			1		KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Lapangan							Staf Ketua BPK)
	Permohonan Kunjungan untuk Konsultasi DPRD Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan		1			KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
	Permohonan prosedur kunjungan		1				1	Sudah Terpenuhi (Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan kunjungan)
	Permohonan kunjungan Hima Aksi FEB Unsika		1			SUBBAG HLN	1	Sudah Terpenuhi (Disampaikan kepada Subbag HLN untuk ditindaklanjuti)
	Permohonan kunjungan Univ. Pelita Harapan		1			SUBBAG HLN	1	Sudah Terpenuhi (Disampaikan kepada Subbag HLN untuk ditindaklanjuti)
	Permohonan kunjungan mahasiswa Telkom University		1			SUBBAG HLN	1	Sudah Terpenuhi (Disampaikan kepada Subbag HLN untuk ditindaklanjuti)
	Permohonan prosedur kunjungan		1			SUBBAG HLN	1	Sudah Terpenuhi (Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan kunjungan)
	Permohonan kunjungan mahasiswa Univ. Sangga Buana Bandung		1			SUBBAG HLN	1	Sudah Terpenuhi (Disampaikan kepada Subbag HLN untuk ditindaklanjuti)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan mengenai Salinan Keputusan Menteri Keuangan		1			KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian Mitra Perwakilan Supervisi Dana Desa		1				1	Sudah Terpenuhi (Sudah dibuatkan surat keluar ke pemohon informasi)
	Penyampaian permohonan Konsultasi		1			KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan mengenai Salinan Keputusan Menteri Keuangan		1			KETUA BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Penyampaian tembusan Surat kepada BPK mengenai pertimbangan usulan pinjaman Daerah Kabupaten Purworejo TA 2017			1			1		Sudah Terpenuhi (Surat tersebut sudah di disposisikan Ka Aud V.B ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan mengenai Salinan Keputusan Menteri Keuangan			1		KETUA BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian surat permintaan delegasi workshop			1		KETUA BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan mengenai Salinan Keputusan Menteri Keuangan			1		KETUA BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke Staf Ketua BPK)
	Daftar kelompok temuan menurut entitas hasil pemeriksaan LKPD TA 2014 dan 2015 (lampiran IHPS I 2015 dan IHPS I 2016)		1				1		Sudah Terpenuhi (dikirim via email)
	LRA dan LAK audited Kab/Kota seluruh Indonesia TA 2013 s.d. 2015		1				1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email bahwa dokumen tersebut bukan milik BPK, sehingga BPK tidak berwenang utk menyerahkannya)
	LPJ UIN SGD Bandung Tahun 2016		1				1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email bahwa dokumen tersebut bukan milik BPK, sehingga BPK tidak berwenang utk menyerahkannya)
	Permohonan untuk menyebar kuesioner		1			SUBBAG HLN	1		Sudah Terpenuhi (Diteruskan kepada Subbag HLN untuk ditindaklanjuti)
	Permohonan untuk menyebar kuesioner		1			SUBBAG HLN	1		Sudah Terpenuhi (Diteruskan kepada Subbag HLN untuk ditindaklanjuti)
	Pertanyaan terkait laporan tahunan BPK tahun 2002 s.d. 2008		1				1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email bahwa Biro Humas baru menyusun

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

										laptah BPK sejak tahun 2010, sebagaimana telah diunggah pada web)
		Daftar kelompok temuan menurut entitas hasil pemeriksaan LKPD TA 2014 dan 2015 (lampiran IHPS I 2015 dan IHPS I 2016)		1				1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email untuk melengkapi permintaan dengan surat pengantar universitas)
3	Maret	Hardcopy / Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan BPK RI Tahun 2015 antara lain : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Surat Perintah Kerja (SPK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Gambar-gambar, Daftar Kuantitas dan Harga, Bill Of Quantity (BQ), Daftar Penerima Barang, dan Dokumen Kontrak lainnya pada paket pengadaan/pekerjaan terlampir				1	Biro Umum dan Pusdiklat		1	Sedang dalam Proses permintaan data ke Satker terkait yaitu Biro Umum dan Pusdiklat dan sudah dibuatkan Nota Dinas
		Permohonan Informasi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 14/BA.PF/LKPD.2014/04/2015			1		AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Dibuatkan surat keluar ke si pemohon bahwa indormasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan)
		Salah satu contoh surat tugas pemeriksaan		1				1		Dibalas via email bahwa surat tugas adalah bagian dari KKP, termasuk informasi yang dikecualikan
		Undangan Rapat Koordinasi Finalisasi Self-Assessment Checklist terkait Implementasi UNCAC oleh Indonesia dalam Kerangka Second Review Cycle UNCAC di Bogor			1			1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim melalui Fax ke staf Kaditama Binbangkum dan dikirim langsung ke staf Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional)

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Undangan Rapat Pembahasan Metode Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembebasan Pajaknya pada Kegiatan BCCP-GLE			1		Tortama KN V dan Tortama KN VI	1		Sudah terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke staf Tortama KN V dan Tortama KN VI)
	Undangan Rapat Pembahasan Metode Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembebasan Pajaknya pada Kegiatan BCCP-GLE			1		Tortama KN IV	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di ambil langsung oleh Staf Tortama KN IV)
	Undangan Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Norma Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN			1		Sekretaris Jenderal BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim melalui fax ke Staf Sekretaris Jenderal BPK)
	Undangan Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Keuangan pada satuan Wasana Praja Prodi S1 Manajemen Keuangan IPDN Kampus Jakarta			1		Anggota VI BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Anggota VI BPK Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM)
	Undangan Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim melalui fax ke Staf Ketua BPK)
	Undangan Rapat Pembahasan Dokumen Skema Akreditasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan			1		Inspektur Utama BPK RI	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim langsung ke Staf Inspektur Utama BPK RI)
	Undangan Diskusi Kebijakan terkait Perkembangan dan Tindak Lanjut untuk Keberlanjutan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			1		Tortama KN VI	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim langsung ke Staf Tortama KN VI)
	Undangan Rakernis TA 2017 tanggal 05 April 2017 terkait Pengelolaan Anggaran Berbasis Akreal dan Manajemen Resiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di			1		Anggota I BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim langsung ke Staf Anggota I BPK)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Lingkungan Polri								
	Permohonan Izin Kunjungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta			1		Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim langsung ke Staf Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional)
	Penyampaian permohonan Konsultasi tentang Penerapan Sistem Keuangan Daerah Berbasis Akrual			1		Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim langsung ke Staf Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional)
	Permohonan Konsultasi Draft Rancangan Peraturan WMA USU tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Universitas			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim melalui fax ke Staf Ketua BPK)
	Permohonan Konsultasi Draft Rancangan Peraturan WMA USU tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Universitas			1		Anggota III BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim melalui fax ke Staf Anggota III BPK)
	Kunjungan Kerja Anggota Pansus DPRD Kota Palu			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim melalui fax ke Staf Ketua BPK)
	Permohonan Konsultasi terkait program pemberian bantuan tunai biaya sewa tenaga kerja			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Staf Ketua BPK)
	Permohonan kunjungan dari STIE Sutaatmadja		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email bahwa surat telah diteruskan ke Subbag HLN dan menghubungi Subbag HLN untuk koordinasi lebih lanjut
	Pertanyaan terkait prosedur kunjungan ke BPK		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan kunjungan
	Permohonan kunjungan dari SMK Kosgoro 3 Kedawung		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email bahwa surat telah diteruskan ke Subbag HLN dan menghubungi Subbag HLN untuk koordinasi lebih lanjut



## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Pertanyaan terkait prosedur kunjungan ke BPK		1			1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan kunjungan
	Penyampaian Permohonan menjadi Narasumber Seminar Nasional Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat			1		Sekretaris Jenderal BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah di fax ke Staf Sekretaris Jenderal BPK)
	Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Akademi Teknin dan Keselamatan Penerbangan Surabaya			1		Tortama KNI	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim melalui fax oleh Staf Tortama KN I)
	Penyampaian surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai Revisi/Perubahan Nama Penanggung Hutang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Atas Nama Ika Setiawati/ Armasyah (Alm)			1		Ketua BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan RI mengenai Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi oleh PT Shibaura Shearing Indonesia			1		Ketua BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan RI mengenai Penggunaan			1		Ketua BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Staf Ketua BPK)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi oleh PT Inti Ganda Perdana								
	Penyampaian surat Permintaan Delegasi sebagai Pembicara pada Seminar Ekonomi dan Kuliah Umum				1	Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional	1		Sudah Terpenuhi (Sudah diarahkan untuk menemui Staf Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional)
	Penyampaian Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDH/00631 tentang surat keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS a.n Choirulloh			1		Tortama KN V	1		Sudah Terpenuhi (Surat Sudah dikirim langsung ke Tortama KN V)
	Penyampaian Permintaan Data Tuntutan Hukum kepada Pemerintah Pusat			1		Kaditama Binbankum	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim melalui fax ke Staf Kaditama Binbankum)
	Penyampaian Permohonan menjadi Narasumber pada Pelatihan Sistem Informasi Keuangan pada satuan Wasana Praja Prodi S1 Manajemen Keuangan IPDN Kampus Jakarta			1		Tenaga Ahli	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Tenaga Ahli Achmad Djazull, SE, MM)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan RI mengenai Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi oleh PT. Steel Center Indonesia			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Staf Ketua BPK)

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan RI mengenai Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi oleh PT. Nusahadi Citraharmonis			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN mengenai Pengembalian Pegawai Tugas Belajar Program Studi Diploma IV Tahun Akademik 2016/2017			1		Biro SDM	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim langsung ke Staf Kepala Biro SDM)
	Penyampaian permohonan menjadi narasumber pada kegiatan Rakernis TA 2017 dengan topik Pengelolaan Anggaran Berbasis Akrual dan Manajemen Resiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Polri			1		Anggota I BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim langsung ke Staf Anggota I BPK)
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data (LHP) ke BPK		1			Subbag LI	1		Dibalas via email dengan prosedur dan syarat permintaan informasi
	Pertanyaan bila ingin mengirim surat permintaan data, ditujukan kepada siapa		1			Subbag LI	1		Dibalas via email alamat PIK dan tujuan surat
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data (LHP) ke BPK		1			Subbag LI	1		Dibalas via email dengan prosedur dan syarat permintaan informasi
	Permohonan ijin sebar angket untuk penelitian		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email bahwa surat telah diteruskan ke Subbag HLN dan menghubungi Subbag

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

									HLN untuk koordinasi lebih lanjut
		Pertanyaan terkait prosedur permintaan data (LHP) ke BPK		1			Subbag LI	1	Dibalas via email dengan prosedur dan syarat permintaan informasi
		Daftar rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP Prov/Kab/Kota Tahun 2015 (lampiran IHPS I 2016)		1				1	Terpenuhi, dikirim via email
		Pertanyaan terkait prosedur magang di BPK		1				1	Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari universitas
4	April	Hardcopy / Softcopy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket Pekerjaan BPK RI Tahun 2015 antara lain : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Surat Perintah Kerja (SPK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Gambar-gambar, Daftar Kuantitas dan Harga, Bill Of Quantity (BQ), Daftar Penerima Barang, dan Dokumen Kontrak lainnya pada paket pengadaan/pekerjaan terlampir				1	Biro Umum dan Pusklat	1	Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		Undangan kegiatan Tematik Bakohumas			1		Biro Humas dan KSI	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah disampaikan langsung kepada Staf Karo Humas dan Kerja Sama Internasional)
		Undangan Kegiatan Destop Assesment Peningkatan Indeks KAMI			1		Biro TI	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Kepala Biro TI)
		Undangan Diskusi Publik mengukur manfaat penerimaan negara dari sektor pertambangan dengan tema "kajian dan evaluasi kebijakan royalti			1		Ketua BPK	1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	dan divestasi"								
	Undangan Rapat Pembahasan Formulasi Economic Impact Kawasan Berikat			1				1	Sudah Terpenuhi (Diinput sebagai database (Undangan salah kirim tidak ada tertera BPK di lampiran undangan)
	Konsultasi Komisi III DPRD Kota Prabumulih			1		Ketua BPK dan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional		1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah di kirim melalui fax ke Staf Karo Humas dan KSI)
	Pertanyaan terkait prosedur kunjungan mahasiswa ke BPK		1					1	Sudah Terpenuhi (Dibalas Via Email)
	Permohonan kunjungan mahasiswa		1			Subbag HLNP		1	Sudah Terpenuhi (Diteruskan ke Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti)
	Penyampaian surat permohonan penjelasan tentang skema dana surat berharga Syariah Negera				1	Ketua BPK		1	Sudah Terpenuhi (Surat disampaikan langsung kepada Bagian Tata Persuratan Biro Umum untuk diteruskan ke Ketua BPK)
	Penyampaian surat mengenai penanggulangan dan admin aplikasi integrasi Rencana Kerja (Renja) dan informasi kinerja K/L			1		Kaditama Revbang		1	Sudah terpenuhi (Sudah disampaikan kepada Staf Kaditama Revbang)
	Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 687/KM.4/2017 dan Nomor 686/KM.4/2017 tentang penggunaan tarif bea masuk dengan skema user Specific duty Freea scheme			1		Ketua BPK		1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim Via Fax kepada Staf Ketua BPK)
	Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor dan Nomor 725/KM.4/2017			1		Ketua BPK		1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim Via Fax kepada Staf Ketua BPK)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan RI mengenai Penggunaan tarif be masuk dengan skema user			1		Ketua BPK		1	Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Staf Ketua BPK)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	specific duty free scheme								
	Penyampaian surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Permintaan Data Penanggung Jawab dan Admin Aplikasi Integrasi Rencana kerja (Renja) dan Informasi Kinerja K/L				1	Kaditama Revbang	1		Surat sudah dikirim via Fax ke Staf Revbang
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan RI mengenai Penggunaan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim langsung ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian usulan calon peserta PMB Tugas Belajar Prodi DIV dan DIII STAN Tahun 2017			1		Biro SDM	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Kepala Biro SDM)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan RI mengenai Penggunaan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)
	Permohonan Izin Observasi				1	Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah disampaikan langsung kepada Staf Karo Humas dan Kerja Sama Internasional)
	Penyampaian surat dari Kementerian Keuangan RI mengenai suatu kemitraan ekonomi oleh PT. TT Metals Indonesia				1	Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)
	Permintaan Laporan Pengeluaran Pemerintah	1					1		Sudah Terpenuhi (Sudah diberitahu via email kepada pemohon bahwa informasi yang diminta Bukan merupakan Informasi yang dikeluarkan oleh BPK)
	Pertanyaan terkait prosedur permohonan informasi		1				1		Sudah Terpenuhi (Dibalas Via Email)

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Pertanyaan terkait prosedur permohonan informasi		1			1		Sudah Terpenuhi (Dibalas Via Email)
		Pertanyaan terkait LHP atas LKPP TA 2016		1			1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email bahwa LHP atas LKPD TA 2016 belum terbit)
		Pertanyaan terkait LHP atas LKPD TA 2016		1			1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email bahwa LHP atas LKPD TA 2016 belum terbit)
		Pertanyaan terkait prosedur penelitian		1		Subbag HLNP	1		Sudah Terpenuhi (Dibalas Via Email)
		Menanyakan ada atau tidaknya LHP atas Perguruan Tinggi Negeri Univ. Trunojoyo Madura TA 2014 dan 2015		1			1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email bahwa BPK tidak memiliki LHP yang dimaksud)
		Pertanyaan terkait lowongan lolos butuh ke BPK		1		Biro SDM	1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email agar mengirimkan lamaran lolos butuh ke Sekjen)
		Surat permohonan magang		1		Subbag HLNP	1		Sudah Terpenuhi (Diteruskan ke Subbag HLNP utk ditindaklanjuti)
		Pertanyaan terkait prosedur magang di BPK		1		Subbag HLNP	1		Sudah Terpenuhi, (Dibalas via email)
		Pertanyaan terkait lowongan untuk mahasiswa tingkat akhir		1		Biro SDM	1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email bahwa BPK belum membuka lowongan CPNS)
		Surat lamaran		1		Biro SDM	1		Sudah Terpenuhi (Dibalas via email bahwa BPK belum membuka lowongan CPNS)
5	Mei	Permohonan menjadi narasumber FGD pengkinian pedoman manajemen resiko investasi BPJS Kesehatan			1	Kaditama Revbang	1		Sudah Terpenuhi (Sudah dikirim via fax ke staf Kaditama Revbang)
		Undangan rakornas Pengawasan Internal Pemerintah tahun 2017			1	Irtama	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Irtama BPK)

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Undangan workshop untuk ketua BPK			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)
	Undangan rakornas Pengawasan Internal Pemerintah tahun 2017			1		Ketua BPK dan Sekretaris Jenderal	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK dan Sekretaris Jenderal BPK)
	Undangan rapat konsultasi			1		Ketua BPK dan Sekretaris Jenderal	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK dan Sekretaris Jenderal BPK)
	Undangan peserta workhsop			1		Biro TI	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Kepala Biro TI)
	Undangan Rapat pembahasan Pedoman Monitoring Tujuan Pembangunan Berkelanjutan			1		Kaditama Revbang	1		Sudah Terpenuhi (surat sudah dikirim via fax ke staf kaditama revbang)
	Permohonan Kunjungan Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)
	Permohonan izin kunjungan studi siswa SMKN 3 Sukoharjo Tahun 2017 ke BPK			1		Biro Humas dan KSI	1		Sudah Terpenuhi (Sudah dikirim via fax ke staf Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional)
	Permohonan kunjungan ke BPK			1		Sekretaris Jenderal dan Biro Humas dan KSI	1		Sudah Terpenuhi (Sudah dikirim via fax ke staf Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional)
	Permohonan kunjungan BEM FEB UGM		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email telah disampaikan dan koordinasikan dengan Subbag HLN
	Permohonan kunjungan SMK Muhammadiyah Todanan Blora		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email telah disampaikan dan koordinasikan dengan Subbag HLN
	Permintaan Data Kapal Bantuan Perikanan yang telah diperiksa BPK			1		AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Sudah dibuatkan ND ke AKN VI (Kaod VI.B) dan Dikoordinasikan dengan Perwakilan Sulawesi Tenggara)



## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Penyampaian Salinan Keputusan Menkeu RI			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian Tindakanlanjutan Pemanfaatan Aset Milik PT. KAI oleh PT. Jasa Marga untuk Jalan Tol			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian Permohonan Izin Wawancara terhadap Anggota BPK			1		Kepala Biro Humas dan KSI	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Karo Humas dan KSI)
	Penyampaian Salinan Keputusan Menkeu RI			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)
	Penyampaian Pembatalan Penggunaan Pinjaman JICA IP-569			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)
	Permohonan informasi terkait prosedur wawancara		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
	Permintaan informasi terkait ketersediaan LHP dan prosedur permohonannya		1			PIK	1		Dibalas via email syarat permintaan informasi
	Permohonan ijin penyebaran kuesioner/penelitian		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
	Permintaan informasi terkait persyaratan permohonan data		1				1		Dibalas via email syarat permintaan informasi
	Permintaan informasi terkait persyaratan permohonan data		1				1		Dibalas via email syarat permintaan informasi
	Permintaan informasi terkait persyaratan permohonan data		1				1		Dibalas via email syarat permintaan informasi
	Permintaan informasi terkait persyaratan permohonan data		1				1		Dibalas via email syarat permintaan informasi
	Permohonan ijin wawancara/penelitian		1				1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
	Permintaan informasi terkait prosedur wawancara/penelitian		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Pertanyaan terkait LHP yang dimiliki BPK		1			1		Dibalas via email, daftar LHP BPK dapat dilihat pada IHPS melalui website BPK
	Pertanyaan terkait permintaan ulang LHP		1			1		Dibalas via email untuk mengirimkan ulang persyaratan permintaan informasi
	Permohonan ijin wawancara/penelitian		1		Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
	Permintaan informasi terkait undangan bimtek palsu		1			1		Dibalas via email bahwa undangan tersebut palsu, pengumuman dapat dilihat di website BPK
	Permohonan ijin penyebaran kuesioner/penelitian		1		Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
	Menanyakan informasi terkait LHP atas LKPP kapan akan diupload di website BPK		1			1		Dibalas via email, telah diupload
	Permintaan data auditor BPK Perwakilan Prov. DIY		1		Biro SDM	1		Terpenuhi, dibalas via email, diberikan hanya jumlahnya saja (data dari SDM)
	Permintaan informasi terkait persyaratan permohonan data		1			1		Dibalas via email syarat permintaan informasi
	Permintaan informasi terkait prosedur magang		1		Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
	Permintaan informasi terkait lowongan magang		1		Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
	Permintaan informasi terkait prosedur magang		1		Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
	Permintaan informasi terkait prosedur magang		1		Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
	Permintaan informasi terkait prosedur magang		1		Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Permintaan informasi terkait prosedur magang		1			Subbag HLN	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan dari kampus
		Permintaan informasi terkait pembukaan lowongan di BPK		1			Biro SDM	1		Dibalas via email bahwa penerimaan CPNS akan diumumkan resmi oleh KemenpanRB
6	Juni	Matrix Pengaduan Masyarakat 2014 - 2017				1	Humas & KSI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil Langsung)
		Laporan Permintaan Informasi Tahun 2017				1	Humas & KSI	1		Sudah Terpenuhi (Diambil langsung)
		KKP pemeriksaan e-KTP dan program JKN		1				1		Dibalas via email, bahwa informasi tersebut dikecualikan
		Undangan Rapat Koordinasi tentang Temuan Sementara BPK RI terkait Pelaksanaan Relokasi Mandiri (Tahap II) di Kab. Karo			1		Tortama V dan Kaditama Revbang	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Tortama V dan Staf Kaditama Revbang)
		Pertanyaan terkait prosedur kunjungan ke BPK		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email terkait prosedur kunjungan
		Permohonan Konsultasi				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Kepala Auditorat VI.B)
		Permohonan Izin survei Lapangan / Risest				1	Subbag HLN	1		Sudah Terpenuhi (Surat Sudah diantarkan langsung kepada staf Karo Humas & KSI)
		Penyampaian Salinan Keputusan Menkeu RI			1		Ketua BPK	1		Sudah Terpenuhi (Surat sudah dikirim via fax ke Staf Ketua BPK)
		Permohonan Konsultasi				1	AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Sudah dibuatkan ND ke Ka.Aud. VI.B perihal penyampaian dokumen tersebut )
		Permohonan Wawancara				1	Biro Humas dan KSI	1		Sudah dilakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi dan ke PIK.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Penyampaian Permohonan Tenaga ahli / pakar untuk Tim Pengarah Pembangunan Gedung Parkir dan Stasiun Intermoda Joyoboyo				1	AKN V dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1		Sudah koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (bagian Humas Sdri Ika) bahwa surat tersebut akan di jawab ke Walikota Surabaya dan nantinya akan di tembusakan ke Karo Humas dan KSI
	Penyampaian Surat dari Kejaksaan Agung terkait Hasil Audit Investigasi PT. Pertamina (Persero) di BMG Australia				1	AKN VII dan Investigatif	1		Sudah Terpenuhi (Surat ditujukan kepada Ketua BPK dan didisposisikan ke Anggota VII & Investigatif)
	Penyampain Permohonan Saksi				1		1		Sudah Terpenuhi (Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Kepala Auditorat V.B)
	Permintaan data Pemerintah Daerah yang telah menerapkan sistem akrual basis		1				1		Dibalas via email untuk meminta data tersebut ke Kementerian Keuangan, agar data yang diperoleh lebih akurat
	Pertanyaan terkait exposure draft untuk pelaopran audit kinerja		1				1		Dibalas via email bahwa exposure draft yang dikeluarkan hanya yang di publish melalui website BPK
	Pertanyaan terkait prosedur penelitian di BPK		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan penelitian
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan informasi		1			Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email terkait persyaratan dan prosedur permintaan informasi
	Pertanyaan terkait pengisian formulir permintaan informasi		1			Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email, penjelasan pengisian formulir permintaan informasi
	Permohonan diskusi dan konsultasi untuk kompetisi peradilan semu		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan kepada Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Pertanyaan terkait prosedur magang di BPK		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur magang

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Pertanyaan terkait prosedur magang di BPK		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur magang	
7	Juli	Permohonan kunjungan mahasiswa FMIPA-UI		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email telah disampaikan ke satker terkait (Subbag HLNP)	
		Penyampaian surat Permohonan Anggota Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan PP tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			1		AKN VI	1		Sudah Terpenuhi (Sudah dikirim melalui Fax ke Staf Kepala Auditorat VI.B)	
		TLRHP, LAKIP dan LKPD 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2014 s.d. 2016		1					1		Dibalas via email bahwa TLRHP ada di IHPS, LAKIP dan LKPD adalah milik masing-masing pemda
		Permintaan informasi terkait nomor telepon yang bisa dihubungi		1					1		Dibalas via email untuk menelepon ke PIK BPK
		Pertanyaan terkait prosedur permintaan informasi		1			PIK		1		Dibalas via email mengenai prosedur permintaan informasi
		Pertanyaan terkait prosedur permintaan informasi		1			PIK		1		Dibalas via email mengenai prosedur permintaan informasi
		Permintaan informasi terkait lolos butuh ke BPK		1			Biro SDM		1		Dibalas via email untuk mengirimkan lamaran lolos butuh
		LKPD Provinsi seluruh Indonesia TA 2013 s.d. 2015		1			AKN V, AKN VI		1		Dibalas via email bahwa yang dimiliki BPK adalah LHP atas LKPD, kalau LKPD milik pemda ybs
		LHP atas Dinas PU dan Dinas Pendidikan di Kab. Deli Serdang		1			AKN V		1		Dibalas via email bahwa BPK tidak melakukan pemeriksaan atas setiap SKPD pemerintah daerah
		Penyampaian informasi/komplain bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tidak memenuhi permintaan data yang diajukan		1			AKN V		1		Disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Pertanyaan terkait prosedur penelitian		1		Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur penelitian
		LHP atas Penetapan Kekayaan Awal Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Tahun 2015 dan 2016		1			1		Dibalas via email untuk mengkonfirmasi LHP yang dimaksud. Daftar LHP dapat dilihat di IHPS BPK
		Pertanyaan terkait prosedur magang		1		Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur magang
		Pertanyaan terkait prosedur magang		1		Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur magang
		Pertanyaan terkait prosedur magang		1		Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur magang
		Pertanyaan terkait prosedur magang		1		Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur magang
		Pertanyaan terkait pembukaan lowongan/rekrutmen di BPK		1		Biro SDM	1		Dibalas via email saat ini belum membuka lowongan CPNS
8	Agustus	Permohonan Anggota V sebagai Pembicara			1	Anggota V	1		Sudah disampaikan melalui fax ke staf Anggota V
		Undangan Rapat Persiapan Mining Investment and Governance Review			1	Biro Humas & KSI	1		Sudah disampaikan langsung ke staf Karo Humas dan KSI
		Undangan Rapat Konsultasi KTLN Setneg RI			1	BINBANGKUM	1		Disampaikan kepada Staf Kaditamabinbangkum, Kepada Bunbun
		Undangan Rapat Persiapan Pendaftaran CPNS Secara Serentak			1	Biro SDM	1		Disampaikan ke Biro SDM, diterima oleh Ajeng
		Pertanyaan terkait prosedur kunjungan		1		Subbag HLNP	1		Dibalas via email mengenai prosedur kunjungan
		Pertanyaan terkait prosedur kunjungan		1		Subbag HLNP	1		Dibalas via email mengenai prosedur kunjungan
		Pertanyaan/konsultasi terkait		1			1		Dibalas via email bahwa BPK bersifat bebas dan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	transaksi tenaga listrik disisi tegangan tinggi di Sistem Jawa Bali							mandiri, dalam hal tidak terlibat jasa asistensi/konsultasi
	Pertanyaan/konsultasi terkait kesalahan DPA dan perubahan APBD		1				1	Dibalas via email bahwa BPK bersifat bebas dan mandiri, dalam hal tidak terlibat jasa asistensi/konsultasi
	Pertanyaan terkait prosedur permohonan data (LHP)		1			PIK	1	Dibalas via email terkait prosedur permintaan data
	Permohonan sponsorship kegiatan Univ. Diponegoro		1				1	Dibalas via email bahwa BPK tidak memiliki anggaran untuk sponsorship
	Laporan Keuangan Pemda (Audited) se-Indonesia TA 2016		1				1	Dibalas via email bahwa data yang dimiliki oleh BPK adalah LHP, bukan LKPD
	Pertanyaan terkait prosedur permohonan data (LHP)		1			PIK	1	Dibalas via email terkait prosedur permintaan data
	Permintaan data indikator akuntabilitas		1				1	Dibalas via email bahwa BPK tidak memiliki data dimaksud
	Pertanyaan terkait lolos butuh ke BPK		1			Biro SDM	1	Dibalas via email bahwa surat lamaran lolos butuh dapat dikirimkan ke Biro SDM
	Pertanyaan terkait prosedur permohonan data (LHP)		1			PIK	1	Dibalas via email terkait prosedur permintaan data
	Pertanyaan terkait prosedur permohonan data (LHP)		1			PIK	1	Dibalas via email terkait prosedur permintaan data
	Pertanyaan terkait lolos butuh ke BPK		1			Biro SDM	1	Dibalas via email bahwa surat lamaran lolos butuh dapat dikirimkan ke Biro SDM
	Pertanyaan alamat email humas BPK Banten, untuk konfirmasi terkait permintaan data		1			PIK	1	Terpenuhi, dibalas via email
	Bantuan Pemanggilan Ahli			1		Ketua	1	Sudah disampaikan melalui fax ke staf Ketua BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Permintaan nominasi pakar untuk UN Corruption			1		Biro Humas & KSI	1		Disampaikan ke Karo Humas dan KSI melalui catatan ekspedisi
		Tembusan surat kepada BPK terkait permintaan informasi berupa dokumen kontrak kepada Perpustakaan Nasional			1		Ketua	1		Disampaikan ke Ketua melalui catatan ekspedisi
		Permohonan bantuan tenaga pengajar semester ganjil TA 2017/2018			1		SDM	1		Disampaikan ke Biro SDM
		Bantuan Pemanggilan Ahli			1		Ketua	1		Disampaikan ke Ketua BPK dan sudah di Fax, DI terima oleh bapak agung
		Berita Acara Penyerahan LHP dan IHPS				1	Biro Humas dan KSI & AKN VI	1		Disampaikan ke Ketua BPK dan sudah di Fax, DI terima oleh bapak agung
		Permintaan dokumen/data/informasi/keterangan terkait rincian perhitungan yang menjadi dasar penerbitan SPPT PBB NOP 64.05.000.728.324.0013-3 Tahun Pajak 2014. Hal ini berdasarkan permohonan banding dari PT Firman Ketaun Perkasa yang mengajukan keberatan atas penerbitan SPPT PBB dimaksud			1		AKN II.A	1		Sudah dikirimkan surat jawaban PPID berdasarkan nodin jawaban dari II.A
		Subdit V Korupsi Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya memohon untuk dapat mendapatkan jadwal waktu koordinasi dengan tim pemeriksa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait LHP Nomor 32.a/LHP/XV/0512013 tanggal 3 Mei 2013. Hal tersebut dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi pada			1		AKN II.C	1		Sudah diadakan pertemuan koordinasi pada 8 September 2017 di BPK



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		pengadaan barang dan jasa konstruksi pekerjaan pengembangan sarana dan prasarana gedung SME Tower dan UKM Center, Kementerian Koperasi dan UKM TA 2012.							
		Pertanyaan apakah BPK menerima magang bagi mahasiswa fresh graduate		1			Subbag HLNP	1	Dibalas via email bahwa BPK hanya menerima magang mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan
		Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Subbag HLNP	1	Dibalas via email terkait prosedur magang
		Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Subbag HLNP	1	Dibalas via email terkait prosedur magang
		Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Subbag HLNP	1	Dibalas via email terkait prosedur magang
		Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Subbag HLNP	1	Dibalas via email terkait prosedur magang
		Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Subbag HLNP	1	Dibalas via email terkait prosedur magang
9	September	Peraturan BPK no.3/2013, SK informasi dikecualikan, SK standard layanan penyampaian LHP			1			1	Sudah Terpenuhi
		Permohonan menjadi narasumber		1			Auditor Utama KN VI	1	Sudah disampaikan kepada Staf Tortama KN VI
		Undangan consultation meeting		1			Auditor Utama KN VI	1	Sudah disampaikan kepada Staf Tortama KN VI
		Permohonan Narasumber Kegiatan FGD		1			Binbangkum	1	sudah di sampaikan ke Kaditama Binbangkum melalui Fax
		Undangan Focus Group Discussion Pembahasan Pelaksanaan Kewajiban Pengenaan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Umum (Track Acces Charge) 2018-2019		1			Binbangkum	1	sudah di sampaikan ke Kaditama Binbangkum melalui Fax
		Undangan sebagai peserta Seminar		1			Biro SDM	1	

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Nasional								
Kunjungan kerja/konsultasi DPRD Kab. Simalungun dalam rangka studi banding guna memperoleh referensi tentang hasil audit tugas pembantuan di daerah			1				1	Sudah disampaikan ke HAL
Pertanyaan terkait prosedur permintaan data		1			PIK		1	Dibalas via email mengenai prosedur permintaan informasi
Pertanyaan terkait prosedur permintaan data		1			PIK		1	Dibalas via email mengenai prosedur permintaan informasi
Pertanyaan terkait prosedur permohonan penelitian		1			Biro Humas (Subbag HLNP)		1	Dibalas via email mengenai prosedur penelitian
Konsultasi/pertanyaan terkait honor pengurus BMN		1					1	Dibalas via email bahwa BPK tidak dapat memberikan konsultasi/asistensi
Permohonan untuk lolos butuh dari Pemkab Luwu ke BPK		1			Biro SDM		1	Dibalas via email dapat mengirimkan lamaran lolos butuh ke Biro SDM
LKKL unaudited		1					1	Dibalas via email bahwa dokumen tersebut adalah milik masing-masing K/L
Surat lamaran		1			Biro Humas		1	Dibalas via email bahwa proses lamaran ke BPK dilakukan secara online, paperless
Permohonan LK TA 2016		1			PIK		1	Dibalas via email bahwa LK merupakan milik masing-masing K/L/Pemda
Surat permohonan ijin penelitian		1			Biro Humas (Subbag HLNP)		1	Disampaikan kepada Subbag HLNP
Pertanyaan terkait prosedur permintaan data		1			PIK		1	Dibalas via email mengenai prosedur permintaan informasi
Pertanyaan terkait prosedur permintaan data		1			PIK		1	Dibalas via email mengenai prosedur permintaan informasi

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Pertanyaan konfirmasi mengenai kebenaran surat permintaan data dari tim pemeriksa		1			AKN IV	1		Dibalas via email bahwa surat tersebut benar, dan ybs akan dihubungi oleh tim pemeriksa
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data		1			PIK	1		Dibalas via email mengenai prosedur permintaan informasi
	Pertanyaan terkait pengajuan proposal kerja sama		1			Biro Humas	1		Dibalas via email bahwa BPK belum memiliki anggaran untuk kerja sama sponsorship
	Pertanyaan terkait kapan LHP atas LK TA 2016 terbit		1			PIK	1		Dibalas via email pada minggu ke-2 Oktober, setelah penyerahan IHPS I 2017
	Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian			1		Ketua BPK	1		Sudah disampaikan kepada Staf Ketua
	Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Bea Masuk dengan Skema User Spesific Duty Free dalam rangka Persetujuan antara RI dan Jepang oleh PT United Steel dan PT Hanwa Steel			1		Ketua BPK	1		Sudah disampaikan kepada Staf Ketua
	Ke-BPK-an				1		1		Sudah Terpenuhi
	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2300/KM.4/2017 tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai suatu Kemitraan Ekonomi Oleh PT. Iron Wire Work Indonesia			1		Ketua BPK	1		sudah di sampaikan ke Staff Ketua melalui Fax
	Salinan Keputusan Menteri			1		Ketua BPK	1		sudah di sampaikan ke Staff Ketua melalui Fax

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Keuangan Republik Indonesia Nomor 2300/KM.4/2017 tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai suatu Kemitraan Ekonomi Oleh PT. Komponen Futaba Nusapersada							
		Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2300/KM.4/2017 tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai suatu Kemitraan Ekonomi Oleh PT. Shibaura Shearing Indonesia		1		Ketua BPK	1		sudah di sampaikan ke Staff Ketua melalui Fax
		Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2300/KM.4/2017 tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai suatu Kemitraan Ekonomi Oleh PT. TT Metals Indonesia		1		Ketua BPK	1		sudah di sampaikan ke Staff Ketua melalui Fax
		Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2300/KM.4/2017 tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan		1		Ketua BPK	1		sudah di sampaikan ke Staff Ketua melalui Fax

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai suatu Kemitraan Ekonomi Oleh PT. Nippon Steel and Sumikin Materials Indonesia								
	Laporan Kunjungan Kehormatan Delegasi BPK RI peserta Program Non-Degree Role of Audit			1		Ketua BPK	1		sudah di sampaikan ke Staff Ketua melalui Fax
	Analisis Pemanfaatan Akuntan Publik dalam Kegiatan Audit Kepabeanaan dan Cukai Sebagai Upaya Peningkatan Audit Coverage Ratio DBJC				1		1		Sudah disampaikan ke HAL
	Surat klarifikasi KPK			1			1		Sudah disampaikan ke Karo Humas dan KSI
	Keterangan Ahli Auditor			1			1		sudah disampaikan ke Staff Ketua melalui Fax
	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2494/KM.4/2017 tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai suatu Kemitraan Ekonomi Oleh PT. Menara Terus Makmur			1		Ketua BPK	1		sudah di sampaikan ke Staff Ketua melalui Fax
	Pengiriman Laporan Pertanggung Jawab Anggaran Bulan Agustus			1		Ketua BPK	1		sudah di sampaikan ke Staff Ketua melalui Fax
	Permohonan Waktu Bertemu & Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Ringkasan Temuan BPK RI			1		Ketua BPK	1		sudah di sampaikan ke Staff Ketua melalui Fax
	Permohonan magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat

									pengantar dari universitas
	Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email terkait prosedur magang
	Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email terkait prosedur magang
	Pertanyaan terkait pembukaan CPNS 2017		1			Biro SDM	1		Dibalas via email, agar tetap update terhadap pengumuman oleh KemenpanRB
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS

										<a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">(panitiacpns@bpk.go.id)</a>
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1			Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1		Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )		
		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1		Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )		
		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1		Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )		
10	Oktober	Permintaan informasi pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan BUMN Perbankan periode Juli s.d. September 2017			1	Biro Humas dan KSI	1				
		Surat undangan rapat persiapan akhir Country Review SACL UNCAC			1	Kaditama Binbangkum	1		Disampaikan ke staf Kaditama Binbangkum via fax		
		Undangan Rapat Pembahasan Kajian Feasibility Tax Expenditure di Indonesia			1	AKN II	1		Disampaikan ke staf Ka Aud II.B via fax		
		Undangan Sebagai Narasumber dalam rapat konsinyasi pembahasan kajian Tax Expenditure				1	AKN II.B	1		Sudah disampaikan melalui email auditorat2b@bpk.go.id	
		Undangan Pembahasan Sinergi Program Asuransi Nelayan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)			1		Tortama KN IV	1		Sudah disampaikan kepada Staf Tortama IV melalui Fax	
		Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Aplikasi Kinerja ASN			1		Kadit PSMK	1		Sudah disampaikan kepada Staf Ditama PSMK melalui Fax	
		Undangan Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Evaluasi dan Penyusunan Alternatif Usulan Kebijakan terkait Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Alkes di Era JKN				1		Tortama Investigasi	1		Sudah disampaikan kepada Staf Tortama Investigasi Melalui Ekspedisi
		Pertanyaan terkait prosedur kunjungan ke BPK			1		Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email tentang prosedur kunjungan	



## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Pertanyaan terkait prosedur kunjungan ke BPK		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email tentang prosedur kunjungan
	Permohonan kunjungan Univ. Andalas Padang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Diteruskan ke Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Permohonan kunjungan Univ. Indonesia		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Diteruskan ke Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Pertanyaan terkait ijin penelitian (menyebarkan kuesioner)		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email tentang prosedur penelitian
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data ke BPK		1			Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email tentang prosedur permintaan data
	LHP atas Dinas Pendidikan Deli Serdang		1				1		Dibalas via email bahwa BPK tidak memeriksa setiap SKPD pada Pemerintah Daerah
	Pertanyaan konfirmasi tentang kebenaran surat tugas tim pemeriksa		1			AKN III	1		Dibalas via email bahwa surat tugas tersebut benar dikeluarkan oleh BPK untuk tim pemeriksa PDTT atas Penggunaan Anggaran dan Kegiatan terkait Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia (KOI)
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data ke BPK		1			Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email tentang prosedur permintaan data
	Pertanyaan terkait permohonan data LK Pemda		1			Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email bahwa data tersebut milik pemda, bukan milik BPK, yang dimiliki BPK adalah LHP
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data ke BPK		1			Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email tentang prosedur permintaan data
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data ke BPK		1			Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email tentang prosedur permintaan data
	Pertanyaan konfirmasi tentang kebenaran surat permintaan data dari		1			BPK Perwakilan Prov. Kalsel	1		Dibalas via email bahwa surat tersebut benar dikeluarkan oleh oleh tim

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	tim pemeriksa							pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
	Pertanyaan konfirmasi tentang kebenaran surat permintaan data dari tim pemeriksa		1			BPK Perwakilan Prov. Kalsel	1	Dibalas via email bahwa surat tersebut benar dikeluarkan oleh tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data ke BPK		1			Biro Humas (PIK)	1	Dibalas via email tentang prosedur permintaan data
	Pertanyaan konfirmasi tentang kebenaran survei kepuasan BPK		1			Sekjen dan Ditama Revbang	1	Dibalas via email bahwa surat tersebut benar dikeluarkan oleh BPK
	Pertanyaan untuk penyusunan skripsi		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1	Dibalas via email mengenai prosedur ijin penelitian di BPK
	Pertanyaan terkait ijin penelitian/observasi		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1	Dibalas via email tentang prosedur penelitian
	Permohonan pendapat hukum terkait penawaran kerja sama dari bank nasional dan beberapa bank pembangunan daerah kepada PT Finnet Indonesia dalam proyek Samsat Online Nasional			1			1	Dijawab melalui surat PPID bahwa bukan wewenang BPK
	Menanyakan dasar untuk mengerjakan proyek yang dilakukan Pemda maupun BUMD yang jumlahnya milyaran tapi tanpa tender			1			1	Identitas tidak ada, bukan tupoksi BPK
	Surat permohonan konsultasi PP 18 Tahun 2017			1		Biro Humas (Subbag HLNP)	1	Sudah Terpenuhi
	Surat konfirmasi permintaan data			1		AUI	1	Disampaikan ke staf Tortama AUI via email
	Diskusi Tindak Lanjut LHP			1		Anggota III	1	Disampaikan ke staf Anggota III via fax
	Surat Permohonan sebagai narasumber			1		Ketua BPK	1	Disampaikan ke staf Ketua via fax

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Penyampaian Permohonan Pendapat hukum terkait penawaran kerjasama e-samsat				1	Biro Humas dan Ksi	1		Sudah disampaikan kepada Kepala Biro Humas dan KSI
	Usulan Pembatalan Penggunaan Pinjaman AFD dan Natixis				1	Ketua BPK	1		Sudah disampaikan kepada Staf Ketua Melalui Ekspedisi
	Pelatihan Manajemen Gedung dan Kantor			1		Biro Umum	1		Sudah disampaikan kepada Staf Biro Umum melalui Fax
	Permohonan Mengadakan Riset				1		1		Sudah disampaikan kepada Staf Biro Humas dan KSI
	Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email terkait prosedur magang
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
	Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

										( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
		Pertanyaan terkait proses penerimaan CPNS BPK		1			Biro SDM	1		Pertanyaan diteruskan ke email panitia CPNS ( <a href="mailto:panitiacpns@bpk.go.id">panitiacpns@bpk.go.id</a> )
11	November	Undangan untuk menjadi observer dalam Training of Trainers BINTALNAS DJBC		1			Ketua BPK	1		Sudah diemail ke staf ketua
		Undangan pembahasan sinergi program Asuransi Nelayan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)		1			Tortama KN IV	1		Sudah di fax ke staf Tortama IV
		Undangan Seminar Setengah Hari			1		Ketua BPK	1		Disampaikan ke Ketua
		Undangan Final Meeting Egcc Colaboration Project dan e-Government Forum 2017		1			Sekjen	1		Disampaikan ke Sekjen
		Permohonan kunjungan SMK Negeri 1 Bandar Lampung		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan ke Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
		Pertanyaan prosedur kunjungan		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email terkait prosedur kunjungan
		Pertanyaan prosedur kunjungan		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email terkait prosedur kunjungan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Data aset 34 pemerintah provinsi tahun 2014 s.d. 2016		1			1		Dibalas via email bahwa data tersebut bukan milik BPK, melainkan milik masing-masing pemprov
	Pertanyaan/konsultasi terkait belanja modal di Kab. Manggarai		1			1		Dibalas via email untuk berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Pertanyaan terkait layanan informasi publik di BPK		1		Biro Humas	1		Dibalas via email untuk mengirimkan permohonan wawancara
	Pertanyaan prosedur permohonan data		1		Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email mengenai prosedur permintaan data
	Realisasi belanja 34 provinsi terkait pendidikan dan kesehatan tahun 2013 s.d. 2016		1			1		Dibalas via email bahwa data tersebut bukan milik BPK, melainkan milik masing-masing pemprov
	Pertanyaan prosedur permohonan data		1		Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email mengenai prosedur permintaan data
	Pertanyaan prosedur permohonan data		1		Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email mengenai prosedur permintaan data
	Pertanyaan prosedur permohonan data		1		Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email mengenai prosedur permintaan data
	Pertanyaan/konsultasi terkait pajak sarang burung walet		1			1		Dibalas via email untuk berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Permohonan wawancara		1		Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan kepada Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Proposal Permohonan Bantuan Dana			1	Ketua BPK	1		Disampaikan kepada Ketua BPK
	Meminta bertemu dengan Pimpinan BPK untuk koordinasi dan konsultasi terkait rekomendasi penghapusan piutang daerah dari pembukuan Pemda Kab. Batu Bara			1	Subbag HAL	1		surat sudah disampaikan ke Bag. HAL
	Undangan Ulang Tahun Metro TV			1	Ketua BPK	1		Surat sudah disampaikan ke staf Ketua

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 2951/KM.4/2017 tentang penggunaan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme dalam rangka persetujuan antara RI dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi oleh PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing			1		Ketua BPK	1		Surat sudah disampaikan ke staf Ketua
		Surat permohonan wawancara dengan pimpinan BPK				1		1		Disampaikan ke Karo Humas dan KSI
		Penyampaian copy surat perjanjian Pemda dengan PT SMI terkait pinjaman ke Pemda)				1		1		Disampaikan ke Ketua
		Informasi Tagihan Kartu Kredit a.n Hendy Sri Handaningrum				1	AKN IV .B	1		Disampaikan ke AKN IV
		Permohonan Narasumber pada Acara Rakernikum Babinkum TNI TA 2017			1		Ketua BPK	1		sudah dikirimkan ke staf ketua melalui ekspedisi
		Salinan keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengguna Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka persetujuan antara RI dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomo oleh PT sango Indonesia			1		Ketua BPK	1		sudah disampaikan kepada ketua BPK
		Salinan keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengguna Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka persetujuan antara RI dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomo oleh PT			1		Ketua BPK	1		sudah disampaikan kepada ketua BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Stamping Indonesia							
		Permohonan keterangan tertulis atas softcopy atau hardcopy salinan LHP BPK Nomor 115/HP/XVI/12/2013 tanggal 23 Desember 2013			1	AKN 1	1		sudah dibuatkan surat jawaban oleh Kepala Biro Humas dan KSI No. 470/S/X.2/11/2017
		Permintaan peserta FGD Permasalahan Bangunan di atas Tanah Wakaf		1		Ketua BPK	1		Disampaikan ke staf Ketua
		Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 2951/KM.4/2017 tentang penggunaan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme dalam rangka persetujuan antara RI dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi oleh PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing		1		Ketua BPK	1		sudah disampaikan kepada ketua BPK
		Permohonan magang	1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email untuk mengirimkan surat permohonan magang dari universitas
		Permohonan magang di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1			BPK Perwakilan Prov. Jatim	1		Dibalas via email untuk langsung menghubungi BPK Perwakilan Prov. Jatim
		Pertanyaan terkait jadwal penerimaan magang/PKL	1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email untuk menghubungi Subbag HLNP
		Pertanyaan terkait jadwal penerimaan magang/PKL	1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email untuk menghubungi Subbag HLNP
12	Desember	Undangan Pelatihan Public Relations Management		1		Biro Umum	1		sudah disampaikan kepada Biro Umum melalui fax
		Undangan workshop performance audit for public sector		1		Sekjen	1		sudah disampaikan kepada sekjen melalui fax (confirm : fafa)
		undangan rapat		1		Ketua BPK,	1		sudah disampaikan kepada staf kepala bpk

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

									melalui fax (confirm : ila)
	Permohonan kunjungan SMK Negeri Kebasen		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan ke Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Pertanyaan terkait prosedur kunjungan		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email terkait prosedur dimaksud
	Permohonan kunjungan Univ. Mercu Buana, Bekasi		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan ke Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Permohonan kunjungan Univ. Muhammadiyah Yogyakarta		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan ke Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Permohonan kunjungan SMK Bhakti Praja Margasari		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan ke Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Laporan PAD Kab. Pangandaran dan Kab. Ciamis TA 2012 s.d. 2016		1				1		Dibalas via email bahwa Lap. PAD bukan milik BPK< tapi milik penda ybs.
	Konfirmasi terkait pemenang BPK Audination		1			Pusdiklat	1		Diberikan nomor kontak staf Pusdiklat (Desilia)
	Pertanyaan terkait program Goes to Campus		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan ke Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data dan prosedur wawancara		1			Biro Humas	1		Dibalas via email mengenai prosedur dimaksud
	Pertanyaan terkait prosedur penelitian		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur dimaksud
	Konfirmasi terkait pengiriman surat permintaan informasi		1				1		Dibalas via email bahwa Humas belum menerima surat dimaksud
	Pertanyaan terkait lomba tulis blog		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email kontak panitia lomba tulis blog
	Pertanyaan terkait prosedur permintaan data		1			Biro Humas (PIK)	1		Dibalas via email mengenai prosedur dimaksud
	Pertanyaan terkait prosedur permohonan narasumber untuk		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur dimaksud



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	seminar								
	Penyampaian proposal penelitian			1		Biro Humas (HLNP)	1		Disampaikan kepada Subbag HLNP
	Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai suatu Kemitraan Ekonomi oleh PT. Suzuki Indomobil Motor			1		Ketua BPK	1		sudah disampaikan kepada ketua BPK melalui fax
	Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai suatu Kemitraan Ekonomi oleh PT. Nippon Steel and Sumikin Materials Indonesia			1		Ketua BPK	1		sudah disampaikan kepada ketua BPK melalui fax
	Surat Permohonan untuk Konsultasi			1		Ketua BPK	1		sudah disampaikan kepada ketua BPK melalui fax
	Surat Permohonan Kunjungan Konsultasi			1		Ketua BPK	1		sudah disampaikan kepada ketua BPK melalui fax
	salinan keputusan menteri republik indonesia nomor 3583/km.4/2017			1		Ketua BPK	1		sudah disampaikan kepada ketua BPK melalui fax
	penyelesaian temuan kerugian daerah yg sulit/tdk dpt diselesaikan				1				Sudah Terpenuhi
	Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur dimaksud
	Permohonan magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan kepada Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur dimaksud
	Permohonan magang mandiri		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email bahwa saat ini BPK hanya menerima program magang dari kampus
	Permohonan magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan kepada Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti
	Pertanyaan terkait prosedur magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Dibalas via email mengenai prosedur dimaksud
	Permohonan magang		1			Biro Humas (Subbag HLNP)	1		Disampaikan kepada Subbag HLNP untuk ditindaklanjuti

## B. Pengaduan

	Jenis Pengaduan	Isi Pengaduan	Media Pengaduan				Total Pengaduan	Satker Terkait	Penanganan			Tindak Lanjut Satker		Keterangan
			Website	E-Mail	Surat	PIK			Tdk Dpt Ditindak lanjuti	Ditindak lanjuti	Sebagai Informasi	Proses	Selesai	
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan</b>		<b>71</b>	<b>29</b>	<b>171</b>	<b>16</b>	<b>287</b>		<b>93</b>	<b>123</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>211</b>	
	Januari	Dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2015			1		1			1			1	
		Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS pada SMK Negeri 2 Balikpapan	1				1		1				1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
		Dugaan penyelewangan proyek pengadaan barang & Jasa TA 2016 pada Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat	1				1		1				1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
		Laporan hasil temuan LSM KIPFA terkait pelaksanaan pencetakan sawah di Kabupaten Pinrang Tahun 2012 - 2016			1		1	AKN IV			1		1	Disampaikan ke Ka.Aud. IV.C
		Dugaan penyimpanan dalam pelaksanaan pekerjaan Jaringan Gas Kota Prabumulih Sumatera Selatan			1		1	AKN V		1		1		Disampaikan ke Ka.Aud. V.B
		Pengaduan terkait Belum dibayarkannya sertifikasi guru pada Pemerintah Kab. Majene, Provinsi Sulawesi barat	1				1		1				1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
		Dugaan penyelewangan dana pada paket pekerjaan peningkatan pada Dinas PU Kota Pontianak, Kalimantan Barat	1				1		1				1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Januari	Penyelewengan Dana Desa pada Desa Pulantan Kecamatan Awaysan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalsel	1				1		1			1	Dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
	Dugaan korupsi RKS Publikasi Dana BOS dan BOP di SDN Cengakreng Barat 19 Pagi			1		1	AKN V			1	1	Disampaikan kepada Kaod VI.A sebagai informasi
	Pengaduan terkait penyimpangan dan penipuan proyek pengadaan tanah 40 Ha untuk kampus UIN Jakarta di Cikuya, Tangerang oleh Fadel Muhammad sejak 1996			1		1	AKN V			1	1	Disampaikan kepada Kaod V.A sebagai informasi
	Pengaduan terkait penyimpangan anggaran dan pungli di satker Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang, dan agar dilakukan audit			1		1	AKN VI			1	1	Disampaikan kepada Kaod VI.A sebagai informasi
	Pengaduan tindak pidana korupsi oleh oknum dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali			1		1			1		1	Identitas tidak jelas, tidak ada bukti pendukung
	Pengaduan terkait dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan jalan paket Nagrek-Tasikmalaya-Ciamis Tahun anggaran 2016			1		1			1		1	Identitas tidak jelas, tidak ada bukti pendukung
	Pengaduan terkait dugaan penggelapan pajak PB 1 kurang lebih diatas Rp. 1 Milyar oleh PT. Bumi Bintang Bersatu.			1		1	AKN V			1	1	Disampaikan kepada Kaod V.B sebagai informasi

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Januari	Pengaduan terkait permintaan kepada BPK untuk memeriksa dana yang dikeluarkan Kementerian ESDM untuk membayar advocatnya			1		1	AKN IV		1		1		Disampaikan kepada Tortama KN IV Untuk di tindaklanjuti
	Pengaduan terkait mohon tindak lanjut atas audit Investigatif khusus dari terkait pengadaan air bersih di PT. Pelindo III dari Sdr. Saleh Al Hasni			1		1	AKN VII		1		1		Disampaikan kepada Kaod VII.B dengan ditembuskan kepada Tortama KN VII Untuk di tindaklanjuti
	Pengaduan terkait pelaporan aset fiktif rektor Universitas Andalas Padang mengenai ganti rugi tanah perumahan dosen Universitas Andalas pada tanah hak milik adat a.n H. Kamar Datuk Rajo Indo Langit			1		1	AKN III		1		1		Disampaikan kepada Kaod III.C dan ditembuskan kepada Tortama KN III untuk ditindaklanjuti
	Pengaduan terkait Dugaan penyelewengan anggaran di Bappeda Provinsi. Papua serta yang berindikasi pada tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan juga kepada BPK Perwakilan Provinsi Papua			1		1	AKN VI		1		1		Disampaikan kepada Kaod VI.B dan ditembuskan kepada Tortama KN VI untuk ditindaklanjuti
	Permohonan arahan dari BPK terkait temuan BPK mengenai Pembangunan Gedung Kuliah Utama (GKU) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro			1		1	AKN III		1		1		Disampaikan kepada Kaod III.C dan ditembuskan kepada Tortama KN III untuk ditindaklanjuti
	Pengaduan terkait dugaan korupsi pertanian di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur, Prov. Jambi			1		1	AKN V.B		1		1		Disampaikan kepada Kaod V.B

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Januari	Pengaduan dugaan tindak KKN di Dinas Pendidikan Kab. Brebes			1		1	AKN V.B			1		1	Identitas tidak ada	
	Permohonan rekomendasi BPK terhadap risalah rapat di Kemenhub Perhubungan RI tanggal 14 November 2016 terkait tindak lanjut permohonan konsesi BUP PT Pelabuhan Rembang Kencana di Pelabuhan Umum Rembang Terminal Sluke Rembang, Jateng			1		1	AKN V.B		1			1		Disampaikan ke AKN V
	Permohonan pendapat/keterangan terkait dugaan kerugian negara pada permasalahan penggelapan lahan milik Pemkab. Asahan, Sumatera Utara			1		1	AKN V.B		1			1		Disampaikan ke AKN V
	Permohonan pemeriksaan dana hibah haji Kab. Jayapura dan penggunaan dana hibah kegiatan MTQ/STQ Tingkat Provinsi 2015-2016 di Kab. Jayapura			1		1	AKN V.A			1			1	Dijawab melalui PPID (akan dimanfaatkan sebagai informasi awal pemeriksaan)
	Penyalahgunaan anggaran di Divbinkum Mabes Polri			1		1		1					1	tidak ada identitas, tidak ada kronologi dan bukti pendukung
	Dugaan perbuatan melawan hukum dan perbuatan curang dalam proses lelang di satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan			1		1	Biro Humas			1			1	Tembusan
	Pekerjaan jalan Tol Tegal - Pemalang dilaksanakan dengan cara-cara ilegal			1		1	Biro Humas			1			1	Tembusan, Identitas Pengadu tidak jelas

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Januari	Pengaduan terkait dugaan kongkalikong antara dewan direksi dan tim pemeriksa BPK pada LPP TVRI TA 2015			1		1	Inpektorat Penegakan Integritas		1		1		Disampaikan kepada Inspektur Penegakan Integritas
	Penyalahgunaan anggaran pada salah satu instansi pemerintah	1				1	Biro Humas	1				1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
	Dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan penggunaan anggaran terhadap pembayaran honor Anggota KPU Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.			1		1	AKN I		1		1		Disampaikan ND ke Auditorat I.C
	Pengaduan mengenai dugaan tentang beberapa penyimpangan yang terjadi di STAIN Metro Lampung			1		1			1			1	Dibuatkan surat keluar ke si pengadu bahwa harus melengkapi dokumen pendukung dan bukti-bukti
	Permohonan Pemeriksaan penyalahgunaan dana ADD Di Desa kiku Boko, Nusa Tenggara Timur			1		1	AKN VI.B		1		1		Disampaikan ND ke Auditorat VI.B
	Pengaduan terkait pengumpulan Kwitansi Palsu pada peserta PPDS Patologi Klinik UGM Tubel Kemenkes	1				1	AKN VI.A	1				1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
	Pengaduan pungli baju batik kelas 1 Sekolah Dasar Balusel	1				1	AKN VI.A	1				1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
	Penyalahgunan dana bantuan Ditjen Bimas Hindu kementerian Agama RI pada Kampus STHD Klaten	1				1	AKN V.A	1				1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Januari	Tidak sesuaiya pelaksanaan pembangunan proyek Jalan yang tidak sesuai spesifikasi di depok	1			1	AKN V.B	1			1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
	Adanya penyelewengan dan Manipulasi data pasien pada RSUD Batubara, Provinsi Sumatera Utara	1			1	AKN V.B	1			1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
	Belum dibayarkannya tunjangan sertidikasi guru pada Kementrian Agama Kab. Pasuruan Tahun 2015	1			1	AKN V.B	1			1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
	Adanya ketidakberesan dalam pengerjaan proyek pekerjaan hotmix pada perempatan Traffic Light Desa Besuki, Kab. Situbondo, Provinsi. Jawa timur			1	1	AKN IV.A	1			1	BPK Hanya sebagai tembusan dan Ditunjukkan kepada Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa timur
	Pelaksanaan perbaikan jalan peninggian Hotmix dusun margasari-Margaluyu Desa Sukamandijaya, Provinsi Jawa Barat yang menyalahi aturan			1	1	AKN. V.B	1			1	BPK Hanya sebagai tembusan dan ditunjukkan kepada Kapolsek Ciasem
	Penyimpangan pengelolaan anggaran di Balai Monitor Frekwensi Radio Kelas II Samarinda			1	1	Biro Humas	1			1	Identitas Pengadu tidak jelas
	Pengaduan ke-2 tentang dugaan penyelewengan dana KUBE di desa Mano'an			1	1	AKN III		1		1	Disampaikan kepada Kaod III.B untuk ditindaklanjuti
	Pengaduan terkait dugaan korupsi PT Indo Ridlatama Power (PT IRP), anak perusahaan PT Indonesia Power (BUMN)			1	1	AKN VII		1		1	Disampaikan kepada Kaod VII.A untuk ditindaklanjuti



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Januari	Permohonan pemeriksaan atas program/kegiatan tahun 2016 di kantor Kec. Songgom, Kab. Brebes, Jawa Tengah			1		1	AKN V			1		1	Ditujukan kepada BPK Perwakilan Prov. Jateng, disampaikan kepada Kaod V.B sebagai informasi
	Pengaduan Mengenai Permintaan Melakukan Audit atas Konflik Tanah antara Masyarakat Lampung dengan PT. KAI			1		1	AKN V.B		1		1		Disampaikan ND ke Auditorat V.B
	Pengaduan adanya Indikasi Kerugian Negara terkait Pengadaan Barang/jasa Pada Pokja Satker PSPAM Provinsi Jawa Tengah			1		1	AKN IV.A		1		1		Disampaikan ND ke Auditorat IV.A
	Penyelewangan proyek gedung baru DPRD Solo dan mekanisme penganggaran yang tidak sesuai prosedur	1				1	AKN V.B	1				1	Sudah dibalas Via Email, untuk dilengkapi bukti-bukti
	Pengaduan indikasi penggelapan Dana Desa di desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.			1		1	AKN V			1		1	BPK Hanya sebagai tembusan dan ditunjukkan kepada Bapak Camat Lenteng
	Pengaduan tentang penyalahgunaan anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.			1		1	AKN V			1		1	BPK Hanya sebagai tembusan dan ditunjukkan kepada Ketua KPK
	Permohonan audit investigasi terhadap PT. Pembangunan Perumahan untuk proyek apartemen Paladian Park Kelapa Gading Jakarta Utara			1		1	AKN VII		1		1		Disampaikan ND ke Kepala Auditorat VII.B

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Laporan dugaan korupsi dana desa Tahun 2016 Pembangunan Jembatan Plat Beton di Dusun II Desa Sungai Lumut Kec. Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumut			1		1	Biro Humas	1			1	Tembusan
		Pengaduan terkait kontrak CV. Panca Karya yang tidak dibatalkan dan di tender ulang serta adanya dugaan telah dilindungi oleh pihak terkait			1		1	AKN V			1	1	Di sampaikan ND ke Kepala Auditorat V.B
		Pengaduan terkait permohonan audit atas dugaan KKN ADD berdasarkan hasil pemeriksaan tim inspektorat Kabupaten Muara Enim		1			1	AKN V		1		1	Disampaikan kepada Kaod V.B untuk ditindaklanjuti
	Januari	Pengaduan terkait PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti rugi bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil			1		1	AKN VI			1	1	Disampaikan kepada Kaod VI.B sebagai bahan informasi
		Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT kepada AKN I (BPK RI) terkait laporan dari Sdr. Nikolaus Liko Kolin.			1		1			1		1	Sudah dibuatkan surat balasan/jawaban bahwa yang bersangkutan telah datang ke BPK dan data yang diminta sudah dipenuhi melalui PIK BPK
		Pengaduan terkait dugaan perbuatan melawan hukum, penyimpangan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri dan merugikan negara			1		1	AKN II			1	1	Disampaikan kepada Kaod II.C sebagai informasi, BPK sebagai tembusan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Penyampaian pengaduan mengenai permohonan penjelasan terkait tanah ex Balai Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dari Sri Rahajeng Widiastuti S.H.			1		1	AKN V		1		1		Disampaikan ND ke Auditorat V.B
	Januari	Pengaduan terkait OJK yang dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah kecil yang menyangkut masalah Jaminan Uang Muka yang diterbitkan Cabang Utama Padang PT. BPD Sumbar yang tidak diterima oleh pihak proyek serta OJK tidak dapat melindungi Konsumen sesuai dengan undang undang OJK		1		1			1				1	Dibalas via email untuk melengkapi aduan (kronologis dan dokumen pendukung)
	Februari	Pengaduan terkait kinerja dan pengelolaan RSUD Wonosari			1		1		1				1	Ditujukan kepada BPK Perwakilan prov. DIY, alamat tidak jelas
		Pengaduan terkait dugaan korupsi yang telah dilakukan oleh para dosen dan JFU di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua bali			1		1		1				1	Bukan tupoksi BPK dan identitas pengadu tidak ada
		Pengaduan terkait permohonan mengaudit dana BOS di SDN 1 Subah Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat			1		1		1				1	Tidak ada bukti atau dokumen pendukung serta alamat dan identitas tidak jelas

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Februari	Pengaduan terkait ketentuan dana hibah untuk Palang Merah Indonesia kota Batam			1		1		1			1	Pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	
	Tembusan pengaduan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi di PT. PLN (Persero)			1		1			1		1	Disampaikan kepada Kaod VII.A sebagai bahan informasi	
	Pengaduan terkait Penyelewengan oleh Pihak Kampus STIA LAN Makassar			1		1	AKN III		1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat III. A	
	Adanya tindak pidana korupsi pada pembangunan lahan parkir dan WC Kantor Dinas Pendidikan Kab. Kukar, Provinsi Kalimantan Timur	1				1			1			1	Bukti tidak lengkap dan sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti
	Permohonan audit dana sertifikasi guru yang belum dibayarkan oleh BKD Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara	1				1			1			1	Bukti tidak lengkap dan sudah di balas lewat email
	Adanya penyelewengan anggaran pada pembangunan rumah dinas kepala GOR Ragunan	1				1			1			1	Bukti tidak lengkap dan sudah di balas lewat email
	Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Leuwiliang Kab. Bogor	1				1			1			1	Bukti tidak lengkap dan sudah di balas lewat email

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Korupsi Pengadaan Video Call Guru Pembelajar oleh Ditjen GTK dan PPPPTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1				1	AKN VI		1		1		Disampaikan kepada Kepala Auditorat VI.A
		Pengaduan terkait permohonan pemeriksaan (meninjau/mereview) kembali dana pensiun VICO Indonesia			1		1	AKN VII		1		1		Disampaikan kepada Kaod VII.A untuk ditindaklanjuti
		Pengaduan terkait belum dibayarnya pekerjaan proyek pergantian atap carbonat bandara BP Batam			1		1	AKN V			1		1	Disampaikan kepada Kaod V.B sebagai informasi
		Penyimpangan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang	1				1	AKN V.B		1		1		Disampaikan kepada Kaod V.B sebagai informasi
	Februari	Permohonan audit investigasi terhadap PT. Pembangunan Perumahan untuk proyek apartemen Paladian Park Kelapa Gading Jakarta Utara			1		1	AKN VII		1			1	Sudah disampaikan ke Kaod VII B ND: No.87/ND/X.2/01/2017) tgl 31 Januari 2017 dan dibuatkan surat ke pengadu bahwa pengaduan tersebut sudah disampaikan ke satker terkait.
		Pengaduan Terkait Sabotase/Penyerobotan Lahan Kebun di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya yang Terletak di Sebelah Barat Bandar Udara Morowali			1		1	AKN VI (Kaod VI.B)		1		1		Disampaikan kepada Kaod VI.B untuk ditindaklanjuti

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Maret	Korupsi dana hibah pilkada pada pemerintah Kabupaten Kediri			1		1	AKN V.B		1		1		Dibuatkan ND Kepada Kepala Auditorat V.B
	Informasi Perubahan Investasi dalam Kerjasama Tanpa SK Direksi pada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Kantor Pusat, Cabang Tanjung Perak Surabaya			1		1	AKN VII (Kaod VII.B)		1		1		Dibuatkan ND Kepada Kepala Auditorat VII.B
	Laporan Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI Kepada GKPI			1		1	AKN V (Kaod V.A)		1		1		Dibuatkan ND Kepada Kepala Auditorat V.A
	Penyampaian surat pengaduan terkait permohonan audit terhadap Proyek DAK 96 Kota Cirebon			1		1	AKN V (Kaod V.B)		1		1		Dibuatkan ND Kepada Kepala Auditorat V.B
	Pengaduan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Samarinda			1		1		1				1	Identitas Pengadu Tidak Jelas
	Pekerjaan Jalan Tol Tegal - Pemalang dilaksanakan dengan cara-cara ilegal			1		1		1				1	Identitas Pengadu Tidak Jelas
	Laporan dugaan tindak pidana korupsi dana desa Tahun 2016 Pembangunan Jembatan Plat Beton di Dusun II Desa Sungai Lumut Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumut			1		1		1				1	BPK Sebagai tembusan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Maret	Dugaan Penyelewengan Anggaran di Pemerintah Kabupaten Mimika Prov. Papua yang Berindikasi pada Korupsi				1	1	AKN VI		1		1	Dibuatkan ND ke Kaod VI.B untuk ditindak lanjuti
	Dugaan Korupsi dana Basnos TA.2016 pemkot manado, yang di duga di gunakan untuk anggaran pilkada manado TA.2016				1	1	AKN VI		1		1	Dibuatkan ND ke Kaod VI.B untuk ditindak lanjuti
	Laporan pinjaman bermasalah program kemitraan PT Telkom dari hasil temuan BPK				1	1	AKN VII (Kaod VII.B)		1		1	Dibuatkan ND ke Kaod VII.B untuk ditindak lanjuti
	Pengaduan terkait ketidaksesuaian penerimaan dana pensiun	1				1		1			1	Bukan tupoksi BPK dan sudah di balas lewat email
	kekurangan pembayaran tunjangan kinerja TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Makasar	1				1		1			1	Bukan tupoksi BPK dan sudah di balas lewat email
	penyelewengan kegiatan lelang parkir RS Koja, Jakarta Utara	1				1		1			1	Bukti tidak lengkap dan sudah di balas via email
	Pengaduan terkait pelaksanaan pekerjaan Proyek Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun Anggaran 2016			1		1	AKN III		1		1	Dibuatkan ND ke Kaod III.A untuk ditindak lanjuti
	Pengaduan dugaan pelanggaran Perpres 70 Tahun 2010 dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, disatuan kerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel APBD TA 2017			1		1		1			1	BPK Sebagai tembusan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Maret	Permohonan penjelasan Dana Silpa Kabupaten Sukabumi Tahun 2014			1		1	AKN V.B		1		1		Dibuatkan ND Kepada Kepala Auditorat V.B untuk ditindaklanjuti
	Pengaduan terkait dugaan penyelewengan uang negara oleh Unit Teknis Kementerian Kehutanan di Kalimantan Tengah			1		1	AKN IV	1				1	Kronologis tidak jelas, tidak ada dokumen pendukung, identitas pengadu tidak jelas
	Penyampaian pengaduan tembusan terkait dugaan korupsi oleh Rektor Univ. Muhammadiyah Sorong			1		1	AKN V	1				1	BPK sebagai tembusan, identitas pengadu tidak jelas
	Pengaduan permohonan melakukan tindakan penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan revitalisasi dan renovasi pembangunan Pasar Pabuaran Kidul, Kab. Cirebon			1		1	AKN V			1		1	BPK sebagai tembusan, disampaikan kepada Kaod V.B sebagai informasi
	Pengaduan tembusan terkait dugaan penyimpangan terhadap dana desa di Desa Sungai Belidak, Kalimantan Barat		1			1	AKN VI			1		1	BPK sebagai tembusan, disampaikan kepada Kaod VI.B sebagai informasi
	Pengaduan terkait dugaan penyimpangan pada proyek paket pekerjaan peningkatan jalan Sudimampir-Tinumpuk Kec. Balongan Kab. Indramayu dari APBD 2016 Kab. Indramayu		1			1	AKN V		1		1		Disampaikan kepada Kaod V.B untuk ditindaklanjuti



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Pengaduan dugaan adanya penyelewengan uang dana desa dan Dana Bandes tahun 2008 di desa Muara Beliti Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan			1		1		1			1	BPK Sebagai Tembusan
		Tembusan Pengaduan terkait temuan masyarakat tentang proses lelang APBN Tahun 2016 pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di Kementerian Sosial			1		1	AKN III.B		1		1	BPK sebagai tembusan, disampaikan kepada Kaod III.B sebagai bahan informasi
	Maret	Tembusan Pengaduan terkait tindak lanjut surat dari IMLIDDES Bondowoso 13 Februari 2017 mengenai penyalahgunaan wewenang dan keuangan proyek yang dikuasai oleh Kepala Desa Pujerbaru			1		1		1			1	Bpk sebagai tembusan, bukan tupoksi BPK, dan bersifat pribadi
		Tembusan Pengaduan terkait dugaan penyimpangan Dana Silpa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 479.923.625,73 di Kabupaten Sukabumi dari Lembaga Kajian Sukabumi			1		1	AKN V (Kaod V.B)		1		1	Dibuatkan ND Kepada Kepala Auditorat V.B sebagai bahan informasi
		Tembusan Pengaduan terkait Indikasi Persekongkolan Pemenang Tender pada Proyek Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prov. Sumsel TA 2016 Dari LSM Pangaas			1		1	AKN VII (Kaod VII.B)		1		1	Dibuatkan ND Kepada Kepala Auditorat VII.B sebagai bahan informasi

		Pembagian kuota beasiswa PPA yang tidak jelas	1			1		1			1	Bukti tidak lengkap dan sudah di balas via email
		Dugaan pelanggaran terkait tidak adanya anggaran di Pemkab Tulungagung untuk membayar kepada CV. Harsari, AMT dan Meminta BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu			1	1	AKN V		1		1	Dibuatkan ND ke Kaud V.B dan ditembuskan ke Tortama KN V untuk ditindaklanjuti
		Tembusan surat dari BPJS Kesehatan terkait penjelasan atas pengaduan masyarakat a.n Bapak Abbas Tomi			1	1	AKN VI (Kaod VI.A)			1	1	Dibuatkan ND Kepada Kepala Auditorat VI.A
		Pengaduan perihal Dana BOS, RKB, Rehab. BSM dan BSM PIP			1	1			1		1	Identitas Pengadu Tidak Jelas, Bukan Tupoksi BPK
	Maret	Pengaduan terkait dugaan adanya penyalahgunaan anggaran Divkum Mabes Polri			1	1			1		1	Identitas Pengadu Tidak Jelas, Bukan Tupoksi BPK
		Surat permintaan konfirmasi jumlah penerimaan retribusi/kontribusi seluruh pedagang tradisional di Kota Medan khususnya dari Pasar Medan Deli sebagai PAD Kota Medan yang dikelola oleh PD. Pasar Kota Medan			1	1	AKN V, BPK Perwakilan Prov. Sumut			1	1	BPK Pusat sebagai tembusan, ditujukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumut, disampaikan kepada Kaod V.B sebagai informasi
		Surat tembusan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Biak Numfor dari Masyarakat Biak Numfor Papua			1	1			1		1	BPK sebagai tembusan, kronologis dan identitas pengadu tidak lengkap

April	Tembusan pengaduan pekerjaan proyek normalisasi dan pengerukan saluran banjir di beberapa desa di wilayah Prov. Babel		1		1	AKN V			1		1	Disampaikan kepada Kaod V.B sebagai informasi pemeriksaan	
	Pengaduan terkait penggunaan dana desa dari APBN TA. 2015 dan 2016 di Desa Baru Menag Raya Kabupaten OKI Kayu Agung		1		1		1				1	Isi aduan tidak jelas	
	Tembusan pengaduan terkait untuk menindaklanjuti penyalahgunaan dana fisik dan dana non fisik anggaran dana desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa. Di Desa Air Liki Baru, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi TA 2016.		1		1	AKN V (Kaod V.B)			1			1	Disampaikan kepada Kaod V.B sebagai bahan informasi
	Tembusan penyalahgunaan wewenang dan anggaran proyek pembangunan plengsengan irigasi pada Dinas Pengairan Bondowoso yang dilaksanakan di desa pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.		1		1	AKN V (Kaod V.B)	1					1	Tidak ada alamat pengirim
	Tindak pidana korupsi di STAIN Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.		1		1	AKN V (Kaod V.A)		1			1		Sudah dibuatkan ND ke kepala Auditorat V.A untuk ditindaklanjuti
	Permohonan audit forensik pada Proyek Peningkatan Jalan Kedaung Kam Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.		1		1	AKN V (Kaod V.B)		1			1		Sudah dibuatkan ND ke kepala Auditorat V.B untuk ditindaklanjuti

April	Penyampaian surat permohonan penjelasan terkait temuan pemeriksaan atas manajemen aset (pengelolaan BMN) khusus aset tanah dan bangunan s.d. semester II tahun 2015 pada unit organisasi TNI AD di Kodam Jaya/Jayakarta Jakarta			1		1	AKN I		1		1		Disampaikan kepada Kaod I. A untuk ditindaklanjuti
	Pengaduan terkait penggunaan dana desa di Kab. Siak yang tidak jelas senilai Rp77.108.631.000			1		1	AKN II AKN III AKN V		1		1		Disampaikan kepada Kaod II.B, Kaod III.B, Kaod V.A untuk ditindaklanjuti
	Pengaduan terkait pemberian opini BPK RI atas LKPD Pemkot Parepare Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015			1		1	AKN V	1				1	Identitas Pengadu dan Bukti Pendukung tidak ada
	Pemalsuan nota pembelian barang-barang milik negara pada kantor ATR, Boyolali, Prov. Jawa Tengah	1				1	AKN III		1			1	Sudah Dibalas Via Email Untuk dilengkapi Bukti-Bukti
	Permintaan melakukan pengecekan kembali pekerjaan pengaspalan jalan pada wilayah Kab. Tebo, Provinsi Jambi	1				1	AKN V		1			1	Sudah Dibalas Via Email Untuk dilengkapi Bukti-Bukti
	Pengaduan tentang dugaan adanya indikasi korupsi dalam proses ruislag SDN Margoreja ! Surabaya			1		1		1				1	Tidak ada alamat pengirim dan tidak ada dokumen pendukung
	Pemungutan Retribusi yang tidak sesuai dengan Perda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bone	1				1	AKN V		1			1	Sudah Dibalas Via Email Untuk dilengkapi Bukti-Bukti

April	Laporan pungli dinas kesehatan kabupaten sragen pada puskesmas	1			1	AKN V		1			1	Sudah di balas Via Email untuk dilengkapi Bukti-Bukti	
	Dugaan penggelapan dana JKN di Puskesmas Berakit Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	1			1	AKN V		1			1	Sudah di balas Via Email untuk dilengkapi Bukti-Bukti	
	Pengaduan terkait Temuan di lapangan oleh LSM AMP-MUAKBERSATU dengan dibangunnya rumah mewah Bupati Musi Rawas Utara yang diduga banyak mengandung unsur Korupsi dan Permohonan Pemeriksaan Harta Kekayaan Bupati Musi Rawas Utara Prov. Sumsel			1	1	AKN V			1			1	Disampaikan kepada Kaod V.B sebagai bahan informasi pemeriksaan
	Pengaduan mengenai kegiatan lelang pada Dinas Kesehatan Kab. Tuban, Prov. Jatim yang tidak sesuai dengan aturan	1			1	AKN V		1				1	Sudah di balas Via Email untuk dilengkapi Bukti-Bukti
	Lelang IPAL di Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur yang tidak sesuai standar yang berlaku	1			1	AKN V		1				1	Sudah di balas Via Email untuk dilengkapi Bukti-Bukti
	Permohonan audit investigasi atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pipa DIstribusi Sipatana Kota gorontalo	1			1	AKN VI			1			1	Surat bukan di tunjukan kepada BPK dan sudah di tembuskan ke BPK Gorontalo
	Belum diterimanya Barang kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, Prov. Sumatera Utara	1			1	AKN V		1				1	Sudah di balas Via Email untuk dilengkapi Bukti-Bukti
	Pengaduan terkait kondisi hasil pembangunan jalan di Kab. Bogor yang banyak rusak		1		1	AKN V		1				1	Identitas tidak lengkap, dibalas via email untuk melengkapi syarat pengaduan

April	Pengaduan terkait penggelapan pupuk bersubsidi NPK Phonska sebanyak 78 ton		1		1			1		1	Identitas tidak lengkap, dibalas via email untuk melengkapi syarat pengaduan	
	Pengaduan terkait penyimpangan penggunaan alokasi dana desa Tahun 2016 di Kecamatan Sidamanik Simalungun Sumatera Utara			1		1		1		1	Identitas pengadu tidak jelas/ BPK sebagai tembusan	
	Pengaduan terkait rekayasa oleh oknum yang mengatasnamakan yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen (BKKK) yang menjual lahan pemakaman Mauk Ketapang dan menggelapkan dana Bansos pemerintah Kab. Tangerang			1		1	AKN V			1	1	Disampaikan kepada Kaod V.B sebagai bahan informasi
	Tembusan Pengaduan proses penyelidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi anggaran hibah 2014 di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta belum juga ditingkatkan menjadi penyidikan dan belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka			1		1	AKN V			1	1	Disampaikan kepada Kaod V.B sebagai bahan informasi
	Pengaduan terkait tindak lanjut putusan MA Nomor 311K/TUN/2015 mengenai salah anggota DPRD Tapanuli Selatan atas nama Mahludin Siagian, dan meminta BPK untuk mengambil langkah-langkah hukum terutama menghentikan menerima penghasilannya.			1		1			1		1	Disampaikan kepada Kaod V.B sebagai bahan informasi dan ke binbangkum untuk mendapatkan kajian hukum.

April	Pengaduan terkait tanggapan surat pengaduan Masyarakat terkait jawaban dari Pokja ULP satker peningkatan fungsi perkapalan dan kelautan pusat Nomor 08/P.X/DKP/Pfkp/III/17 tanggal 17 maret 2017, bahwa izin penyelenggaraan telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan dan harus atas nama penyedia barang atau jasa tersebut.			1		1	AKN I			1		1	Disampaikan kepada Kaod I.C sebagai bahan informasi
	Tembusan pengaduan dari Indonesia Energi Monitoring (Indering) terkait dukungan peraturan tentang SNI karet perapat (Rubber Seal) secara wajib			1		1	AKN VII (Kaod VII.A)			1		1	Disampaikan ke Kaod VII.A sebagai bahan informasi
	Pengaduan terkait dugaan penyimpangan oleh tim pemeriksa BPK di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan		1			1			1			1	Identitas tidak lengkap, dibalas via email untuk melengkapi syarat pengaduan
	Pengaduan terkait pungli yang dilakukan oleh Camat Dolok Raya		1			1			1			1	Identitas tidak lengkap, dibalas via email untuk melengkapi syarat pengaduan
Mei	Pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bumi Persada Permai terkait perusahaan Hutan Tanaman Industri di Sumsel Permohonan Audit terhadap kegiatan Hutan Tanaman Industri Apabila tidak dapat diaudit, mohon BPK dapat memberikan alasan				1	1	AKN V		1		1	Disampaikan ke Auditorat V.b untuk ditindaklanjuti	

		Pengaduan Mark Up pengadaan barang untuk harga poster gambar pada dinas Kab. Sukabumi	1				1	AKN V		1		1	Sudah di balas lewat email untuk di lengkapi bukti-bukti
		Diskriminasi proses pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan renovasi gedung kantor Penelitian Tanaman Serealia Kab. Maros, Prov. Sulsel	1				1	AKN VI		1		1	Sudah di balas lewat email untuk di lengkapi bukti-bukti
		Pengaduan belum dibayarkannya sertifikasi guru anggaran Tahun 2016 pada Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu	1				1	AKN V		1		1	Sudah di balas lewat email untuk di lengkapi bukti-bukti
		Penyelewangan dana bos oleh kepala sekolah negeri 9,11, 16 dan 21 Kota Medan	1				1	AKN V		1		1	Sudah di balas lewat email untuk di lengkapi bukti-bukti
	Mei	penyelewangan dana pembangunan nagari oleh Pejabat Wali tahun 2016 pada Nagari sariak, kab. Padang Pariaman, Prov Sumbar	1				1	AKN V		1		1	Sudah di balas lewat email untuk di lengkapi bukti-bukti
		Pengaduan terkait adanya suap yang di terima BPN Cirebon oleh pihak ketiga dalam pengeluaran sertifikat tanah	1				1	AKN III		1		1	Sudah di balas lewat email untuk di lengkapi bukti-bukti
		Pengaduan terkait dugaan korupsi di UPT Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara		1			1	AKN IV		1		1	Dibalas via email, diminta untuk melengkapi syarat pengaduan (dokumen/bukti)



Mei	Pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Ulanta, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango untuk pembangunan proyek jamban sehat warga		1			1	AKN III		1		1	Identitas tidak jelas, Dibalas via email, diminta untuk melengkapi syarat pengaduan (dokumen/bukti)	
	Pengaduan terkait dugaan korupsi pembangunan jalan dan jembatan Lingkar Jatigede		1			1	AKN IV		1		1	Dibalas via email, diminta untuk melengkapi syarat pengaduan (dokumen/bukti)	
Juni	permohonan audit terkait pembangunan Rumah sakit pada Univeristas Halu Oleo, Provinsi Sulawesi tenggara	1				1			1		1	Sudah di balas lewat email untuk mengirimkan bukti-bukti lengkap	
	permohonan audit terhadap kepemilikan aset tanah Kantor Balaikota Pemerintah Kota Tasikmalaya	1				1	AKN V		1		1	Sudah di balas lewat email untuk mengirimkan bukti-bukti lengkap	
	Permintaan audit investigasi terhadap Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jalan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Provinsi Jawa Timur				1	1	AKN V		1		1	Dibuat ND ke Satker terkait	
	Pengaduan adanya dugaan mark-up pembelian aset tanah kantor BANK BRI Cabang Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	1					1	AKN VII		1		1	Dibuatkan ND Ke AKN VII.D untuk dijadikan informasi awal pemeriksaan
	Permintaan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan aset milik TNI AL				1	1		AKN I		1		1	Dibuat ND ke Satker terkait
	Pengaduan mengenai beberapa pelaksanaan pekerjaan atas kawasan Kota Lama Semarang, ada yang belum sesuai.			1			1	AKN V		1		1	Dibuat ND ke Satker terkait yaitu Kepala Auditorat V.B untuk ditindaklanjuti

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Pengaduan terkait permintaan sikap hukum resmi dari BPK atas opini WTP yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau			1		1	AKN V		1		1	Dibuat ND ke Satker terkait yaitu Kepala Auditorat V.B untuk ditindaklanjuti
		pengaduan belum dikembalikannya uang jaminan pekerjaan sebesar 5% oleh PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi tahun 2008 - 2017	1				1	AKN V		1		1	Sudah di balas lewat email untuk mengirimkan bukti-bukti lengkap
		Permohonan audit ulang terkait temuan BPK dalam pekerjaan pagar di BBPOM pekanbaru	1				1	AKN VI		1		1	Sudah di balas lewat email bahwa proses audit ulang tidak dapat dilakukan
	Juni	Permintaan informasi mengenai nilai besaran nilai ganti kerugian atas tanah Warga Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik			1		1	AKN V		1		1	Dibuat ND ke Satker terkait
		penarikan retribusi yang tidak disetor ke kas negara yang dilakukan oleh Koperasi Jratun Seluna (BBWS Pemali Juwana Semarang) di objek wisata Waduk Kedungombo, Grobogan, Jawa Tengah			1		1	AKN V.B			1	1	
		Penyalahgunaan Anggaran di Divkum Mabes Polri yang dilakukan Irjen Pol Setio Wasisto			1		1		1			1	Identitas tidak ada, alamat tidak ada, tidak ada bukti pendukung
		perpanjangan masa kerja anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2012-2017 yang diduga tidak tepat dan menyebabkan kerugian negara			1		1	AKN III.C		1		1	

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Penyelewengan anggaran dana pembangunan asrama haji	1			1	AKN V		1		1	Sudah dibales lewat Email untuk melengkapi bukti-bukti
		Permohonan pemeriksaan terkait penggunaan Anggaran dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 pada Desa Lalukoen, Kabupaten Rote Ndao		1		1	AKN II, III, V		1		1	Dibuatkan ND ke Satket Terkait
		Dugaan adanya pengendapan dana sertifikasi guru pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1			1	AKN VI		1		1	Sudah dibales lewat Email untuk melengkapi bukti-bukti
		Permasalahan pada pembelian tanah oleh MTs Negeri Lawang, Malang, Jawa Timur Tahun 2013		1		1	AKN V		1		1	
	Juli	Permohonan pemeriksaan terkait aset berupa tanah milik LPP RRI Kupang		1		1	AKN III		1		1	Dibuatkan ND ke Satket Terkait
		Pengaduan terkait kecurigaan adanya ketidakberesan antara oknum BPK Perwakilan Bengkulu dan Pemkab. Bengkulu Utara dalam hal pemberian opini Tahun Anggaran 2016		1		1	AKN V	1			1	Identitas Pengadu Tidak Jelas
		Permintaan pemeriksaan investigasi dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Rembang		1		1	AKN V		1		1	Dibuatkan ND ke Satket Terkait
		Pengaduan pengendapan dana sertifikasi guru oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1			1	AKN VI		1		1	Sudah dibalas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti dan dokumen pendukung

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		permohonan audit Indikasi korupsi penggunaan anggaran dana desa tahun 2016 pada Desa Pulo Panjang, Serang-Banten	1				1	AKN III		1		1	Sudah dibalas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti dan dokumen pendukung
		Penggunaan anggaran dana desa yang tidak sesuai pembangunan pada Desa cimanggu II kec.cibungbulang kab.bogor barat	1				1	AKN III		1		1	Sudah dibalas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti dan dokumen pendukung
		Permohonana Audit terkait Dana Kompensasi dari Kementerian Sosial Kepada Warga Negara Indonesia Eks Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi NTT yang tidak Tepat Sasaran				1	1	AKN III		1		1	Sudah disampaikan kepada Kepala Sub Auditorat III.B
		Permohonana Audit belum Dibayarkannya Dana Bantuan pada Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan “ Bina Usaha” oleh Pemerintah daerah kabupaten Kebumen				1	1	AKN V		1		1	Sudah disampaikan kepada Kepala Sub Auditorat V.B
		Permohonana Audit terkait Penjualan Aset Tanah PTPN XI dan XII				1	1	AKN VII		1		1	Sudah disampaikan kepada kepala Sub Auditorat VII.C
		Permohonana Audit kegiatan Pembangunan Jalan antara Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lany Jaya				1	1	AKN IV		1		1	Sudah disampaikan kepada kepala Sub Auditorat IV.A
		Pengaduan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Prov. Jawa Barat pada Kab. Ciamis. Pihak pengadu menilai terdapat kejanggalan pada proses pemeriksaan yang dilakukan, sehingga meminta BPK untuk memeriksa dan mengganti tim pemeriksa untuk wilayah pemeriksaan dimaksud.			1		1				1	1	Tidak ada alamat pengadu
	Juli												

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Penyampaian tembusan laporan pengaduan masyarakat kepada KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan 18 puskesmas di DKI Jakarta. Dalam hal ini, Rekan Indonesia meminta BPK untuk dapat menindaklanjutinya.			1		1	AKN V		1		1		
		Penyelesaian permasalahan tanah pembebasan Waduk Rawa Babon Jakarta Timur TA 2006 serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya yang belum tuntas			1		1	AKN V			1		1	Sebagai informasi, tidak ada alamat balasan, sudah ranah hukum
		Permohonan audit Desa Sambirejo, Langkat		1			1	AKN V	1				1	Aduan tidak jelas, dibalas via email untuk melengkapi
	Juli	Permohonan untuk menindaklanjuti berita di koran tentang penggunaan dana ADD Medan		1			1	AKN V	1				1	Aduan tidak lengkap, hanya berupa kliping berita
		Laporan penggunaan anggaran fiktif pada PD PAL JAYA			1		1	Biro Humas	1				1	Identitas Pengadu Tidak Jelas
		Pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada lahan milik Pemerintah Kota Surabaya			1		1	AKN V	1				1	Identitas Pengadu Tidak Jelas
		Surat dukungan permohonan audit BPK dan BPKP sebagai upaya bersama mencegah kerugian negara dan masyarakat			1		1	AKN I			1		1	Disampaikan kepada AKN I sebagai informasi
		Permohonan peninjauan kembali atas denda keterlambatan pada pengadaan bantuan pupuk NPK pada kegiatan pengembangan budidaya jagung di lahan khusus, Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah, Sulut			1		1	AKN IV.C		1		1		

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Juli	Tembusan surat keberatan atas permintaan pengembalian pembayaran pada kegiatan pengadaan Alsintan Power Thresher pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini, CV. GHM FARM TECH memohon kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara untuk diberi kesempatan melakukan klarifikasi kembali dengan tim pemeriksa BPK di Jakarta			1		1			1		1	
	Agustus	Permohonan audit atas pembangunan jalur ganda dan stasiun kereta api di Desa Tegalsari			1		1	AKN I		1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat I.C untuk ditindaklanjuti
Pengaduan terkait penyimpangan dalam penetapan BPHTB di wilayah Kab. Lampung Tengah berdasarkan hasil temuan Lembaga Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Bantuan Hukum				1		1	AKN V			1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat V.B sebagai informasi
Permohonan pemeriksaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Kampung Mandenderi, Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor				1		1	AKN III dan VI			1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat III.B dan VI.B sebagai informasi
Pengaduan terkait pembangunan DAM Kali Ngasinan Kiri di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kab. Tulungagung			1			1	AKN V		1		1		Disampaikan kepada Kepala Auditorat V.B untuk ditindaklanjuti

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Pengaduan terkait penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Weulun, Kec. Wewiku, Kab. Malaka, NTT		1			1	AKN VI	1			1	Pengaduan tidak lengkap, dibalas via email untuk melengkapi pengaduan
		Permohonan pemeriksaan laporan keuangan BI dan Bank lainnya yang diduga menyimpan dana a.n. ahli waris RH. Tjokro Bandoro. Pengadu memohon kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BI dan Bank lainnya yang diduga menyimpan dana tersebut tapi tidak dilaporkan			1		1	AKN II.C		1		1	Sudah disampaikan ke satker dan sudah dikirimkan surat jawaban PPID
		Dugaan manipulasi dan KKN pada STAKPN Tarutung			1		1	AKN V.A		1		1	Sudah disampaikan ke satker dan sudah dikirimkan surat jawaban PPID
	Agustus	Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kades Pandanarum, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto, Jawa Timur. Pengadu memohon kepada BPK melakukan pemeriksaan			1		1	AKN V.B			1	1	Tidak ada alamat
		Dugaan pelelangan fiktif pada Dinas PU Kab. Kutai Timur			1		1	AKN VI.B			1	1	Sudah disampaikan ke satker dan sudah disiapkan surat jawaban PPID, tapi tidak dikirim karena saat dihubungi, nomor hp yang tercantum menyatakan tidak pernah mengirim surat pengaduan tersebut
		Informasi tambahan perihal dana yang disembunyikan oleh Bank Indonesia beserta 6 kantor Bank pelaksana yang tidak dilaporkan			1		1	AKN II.C			1	1	Disampaikan ke II.C namun dikembalikan karena menunggu disposisi Ketua). Tetap hanya sebagai tembusan karena surat PPID sdh dikirimkan.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Permasalahan ketentuan/kebijakan limbah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			1		1	AKN IV.B			1		1	Identitas tidak ada
		Permasalahan-permasalahan pada pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua			1		1	AKN VI.B			1		1	Identitas tidak lengkap, pengaduan tidak lengkap, ditujukan ke banyak pihak
		Dugaan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara			1		1				1		1	Identitas Pengadu tidak jelas
	Agustus	Pengaduan terkait korupsi dana desa di Desa Bendungan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur			1		1				1		1	Identitas Pengadu tidak jelas
		Pengaduan terkait penyelewengan dalam pembayaran Bank Garansi oleh Perum Jamkrindo			1		1				1		1	Identitas Pengadu tidak jelas
		Surat yang mempertanyakan apakah perlu instansi pemerintah diberikan opini WTP			1		1				1		1	Identitas Pengadu tidak jelas
	September	Pengaduan terkait permohonan pemeriksaan investigatif terkait kinerja program kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumbagut Aceh dan Jawa Timur			1		1	AUI		1			1	Disampaikan Ke Auditorat Utama Investigasi
		Pengaduan terkait permohonan pemeriksian investigasi pembangunan Rumah Sakit Pratama Wonomulyo di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabapaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat			1		1	AUI		1			1	Disampaikan Ke Auditorat Utama Investigasi



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

September	Penyalahgunaan APBD Provinsi Jatim dan Penyalahgunaan Kekuasaan/Jabatan			1		1		1			1	Identitas Pengadu Tidak Jelas, tidak ditujukan dan tidak ditembuskan ke BPK	
	Pengaduan terkait dana desa di Desa Bukabu Kec. Ambunten, Kab. Sumenep, Jatim			1		1		1			1	Kronologis aduan tidak jelas, alamat tidak jelas	
	Pelaporan kerugian negara yang diakibatkan pembayaran yang fiktif dan pembayaran yang tumpang tindih dan data rekayasa personil			1		1		1				1	Identitas Pengadu Tidak Jelas dan isi aduan tidak jelas
	Laporan adanya dugaan perbuatan tindak pidana korupsi merugikan negara akibat ruislag tanah pemerintah Kota Surabaya, dengan tanah TNI AU yang dikuasai oleh Alim Markus (Maspion) dan PT. Gala Bumi Persada			1		1				1		1	Tembusan, Identitas Pengadu Tidak Jelas
	Laporan dugaan terjadi tindak pidana dalam pelaksanaan proyek di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung			1		1	V.B			1		1	Disampaikan ke KaAud. V.B sebagai informasi bagi pemeriksaan
	Pengaduan terkait sanggahan pada proses pelelangan paket pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara			1		1	V.A		1		1		Disampaikan ke KaAud. V.A
	Pengaduan terkait masukan untuk BPK dalam pemeriksaan PT. Askrida (Persero) yang diduga peran kepala daerah sebagai pemegang saham cukup dominan dan perlu ditelusuri dan sarat dengan dukungan politik			1		1			1			1	Identitas pengadu tidak jelas dan isi surat tidak jelas

September	Indikasi korupsi Dana desa tahun anggaran 2017 di dusun sumber pandan desa guluk manjung, kecamatan bluto, kabupaten sumenep	1				1		1			1	Sudah disampaikan melalui email, untuk dilengkapi bukti-bukti	
	Permohonan Pemeriksaan terhadap BI, OJK dan Bank Mandiri				1	1	II.C		1		1	Disampaikan kepada Ka Aud II.C	
	Permohonan audit atas proyek bendungan Marangkayu				1	1	VI		1		1	Disampaikan kepada Ka Aud VI	
	Permohonan Pemeriksaan terhadap Kepala Desa Tragih				1	1	V.B		1		1	Disampaikan kepada Ka Aud V.B	
	Pengaduan terkait pembangunan Perkuatan Penahan Ombak Pantai Sine yang mana pembangunan tersebut masuk wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur		1				1	V.B		1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat V.B untuk ditindaklanjuti
	Pengaduan terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan proyek Pengadaan Langsung (PL) tentang Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Prov. Banten		1				1		1			1	Dibalas via email untuk melengkapi pengaduan
	Penyampaian pengaduan masyarakat terkait informasi tambahan perihal dana yang disembunyikan oleh Bank Indonesia beserta 6 kantor Bank pelaksana yang tidak dilaporkan				1		1	Ketua		1		1	disampaikan ke Ketua (karena surat ditujukan ke Ketua tapi diterima oleh Humas) untuk mendapat arahan. Namun, surat pengadu sebelumnya sudah ditanggapi melalui surat PPID. Surat yang ini adalah tambahan informasi atas pengaduan sebelumnya.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Dugaan kecurangan dalam penetapan lelang oleh Ketua Pokja Tim III Jasa Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Penulal Abab Lematang Ilir TA 2017 pada pekerjaan pembangunan IGD Puskesmas Tempirai			1		1	V.B		1		1	Disampaikan ke V.B dan sudah dijawab dengan surat PPID (untuk informasi awal pemeriksaan)
		Tembusan surat pengaduan LSM KPPPI terkait pengaduan CV Zihan Putra Sejati atas pekerjaan rehab Puskesmas Sukaesmi Kab Cianjur TA 2016 yang belum dibayarkan oleh PPK Dinas Kesehatan Kab. Cianjur			1		1	AKN V Perwakilan Jawa Barat		1		1	tembusan dari Tortama KN V
	September	Dugaan penyimpangan jaksa dalam kasus Pembebasan Waduk Rawa Babon Jakarta Timur Tahun Anggaran 2006			1		1			1		1	Identitas Pengadu tidak jelas
		Pengaduan terkait dugaan korupsi penggunaan dana desa di Desa Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur			1		1			1		1	Identitas Pengadu tidak jelas
		Permohonan dukungan, bantuan penyelesaian dan perlindungan hukum BPK atas perkara sengketa kepemilikan tanah antara Sdr. Catherine Tjipto dengan Walikota Surabaya			1		1			1		1	Telah disampaikan Tortama KN V kepada BPK Perwakilan Prov. Jatim, Humas sebagai tembusan
		Pengaduan yang meminta berita terkait dana desa di surat kabar ditindaklanjuti		1			1		1			1	Pengaduan tidak jelas, dibalas via email untuk melengkapi pengaduan
	Oktober	Pengaduan terkait permohonan pemeriksaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa Hilimoasio Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Sumut			1		1	AKN III dan V		1		1	Disampaikan ke Auditorat III.B dan V.B

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Pengaduan terkait penyalahgunaan dana hibah/ BANSOS pembangunan Gedung SMK Pertiwi Balikpapan Tahun 2012 dan 2013			1		1	AKN VI.B	1			1	Disampaikan ke surat keluar ke pengadu bukan tupoksi BPK
		Penyimpangan pembayaran uang siaga pada Kantor SAR Mataram	1				1	AKN VI	1			1	Sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti
		Mempertanyakan penggunaan Dana Desa Pada Desa Balunujuk, Kecamatan merawang, kabupaten Bangka	1				1	AKN III	1			1	Sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti
		Pengaduan dan permohonan pemeriksaan penyalahgunaan anggaran dana desa di Desa Majan Kedungwaru Tulungagung			1		1	AKN V, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur		1		1	Surat ditujukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jatim
	Oktober	Pengaduan terkait penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan pada pembangunan gedung Madrasah Diniyah Takmiliah Al Fatah Jawa Timur			1		1	AKN V		1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat V.A dan Kepala Auditorat V.B
		Pengaduan terkait berbagai permasalahan pembangunan dan korupsi di Kabupaten Mesuji			1		1	AKN V			1	1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat V.B sebagai informasi
		Pengaduan terkait dugaan konspirasi pengaturan dokumen penawaran , perbuatan curang dalam kepentingan pengadaan barang/jasa di Kota Prabumulih			1		1	AKN V			1	1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat V.B sebagai informasi
		Pengaduan terkait penggunaan dana desa di Desa Sidomukti Kec. Kembangbahu, Lamongan Jatim yang tidak jelas			1		1	AKN V	1			1	Identitas pengirim tidak jelas

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Penyimpangan kegiatan lelang pada Pengadaan dan Instalasi Peralatan Situation Room pada Kementerian Pemuda dan Olahraga	1				1		1			1	Pengaduan tidak jelas, data tidak valid, sudah dibalas via email untuk melengkapi pengaduan
		Pengaduan terkait permintaan audit investigasi Dana Persatuan Orang Tua Mahasiswa Universitas Tadulako			1		1	AKN VIII		1		1	Disampaikan ke AKN VIII
		Dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Jaya, Rawa Makmur Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015			1		1	AKN IV		1		1	Disampaikan ke AKN IV
	Oktober	Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para penyelenggara Kabupaten Bojonegoro tentang kelebihan dana bagi hasil Lifting Mintak tahun 2015			1		1	AKN V			1	1	Disampaikan ke AKN V
		Permohonan audit di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan			1		1	AKN I		1		1	Disampaikan ke AKN IV
		Permohonan mengikuti lelang terhadap aset Pemrov DKI Jakarta atas pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan bangunan sarana olah raga dan balai pertemuan yang terletak di Komplek Perumahan taman Duta Mas, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat			1		1	V.B			1	1	Sebagai Informasi Pemeriksaan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Oktober	Dugaan permasalahan pada pengelolaan dana kegiatan Gapoktan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Banyuasin II			1		1	IV.C		1		1	Disampaikan ke satker terkait, sekaligus dijawab melalui surat PPID bahwa akan digunakan sebagai informasi awal dalam pemeriksaan	
	Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi di Kantor Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan			1		1	IV.C			1	1		
	Dugaan permasalahan pada kegiatan Penyediaan Tenaga Alih Daya Pelayanan Kebersihan Halte Transjakarta beserta Ramp dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dilaksanakan oleh PT Transportasi Jakarta			1		1	Ketua		1		1	1	Surat ditujukan kepada Ketua
	Informasi tambahan perihal dana yang disembunyikan oleh Bank Indonesia beserta 6 kantor Bank pelaksana yang tidak dilaporkan			1		1	II.C		1		1	1	Melanjutkan disposisi ketua ke II.C (surat PPID sudah dikirimkan untuk menjawab)
	Tidak diselesaikannya biaya ganti rugi tanah warga yang digunakan sebagai kawasan Bandara DEO Sorong			1		1	VI.B	1			1	1	Permasalahan sudah masuk pengadilan, dijawab melalui surat PPID
	Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi			1		1	IV.C dan V.B		1		1	1	Sudah disampaikan ke satker dan sudah dijawab melalui PPID (akan dimanfaatkan sebagai informasi awal dalam pemeriksaan)
	Mempertanyakan penggunaan Dana Desa Pada Desa Balunijuk, Kecamatan merawang, kabupaten Bangka	1				1	AKN III	1			1	1	Sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti dan aduan tidak jelas

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Oktober	Penyimpangan kegiatan lelang pada Pengadaan dan Instalasi Peralatan Situation Room pada Kementerian Pemuda dan Olahraga	1				1	AKN III	1				1	Sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti
	Penyalahgunaan dana anggaran belanja operasional pada puskesmas Wakai, Provinsi Papua	1				1	AKN VI	1				1	Sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti
	pengaduan terkait kerugian negara pada kementerian Kehutanan	1				1	AKN IV	1				1	Sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti
	Ketidaksesuaian tenaga ahli di bidang pekerjaan dan pelaksanaan proyek jalan raya	1				1		1				1	Sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti, serta tidak jelas lokasi pekerjaan ataupun kegiatan pekerjaan proyek
	Penyalahgunaan penggunaan Dana Desa Pada Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang	1				1	AKN III	1				1	Sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti
	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Embung pada Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya	1				1	AKN V		1		1		Sudah disampaikan kepada Kepala Subauditorat V.B
	Indikasi penyalahgunaan dana bos pada SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara	1				1	AKN VI	1				1	Sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti
	Permintaan audit karena adanya kekacauan keuangan dan kas kosong pada pemerintah kota Binjai	1				1	AKN V		1			1	Sudah di balas lewat email untuk kegiatan pemeriksaan laporan keuangan akan dilaksanakan saat selesainya tahun anggaran
	Dugaan Korupsi Anggaran Bantuan Bencana Alam di PEMKAB Madiun, terkait dinas KESBANGPOLLINMAS		1			1	AKN V	1				1	Aduan tidak lengkap, identitas tidak jelas

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Oktober	Pengaduan terkait proyek pekerjaan Modernisasi Jaringan Irigasi DI Rentang ( SI Sindupraja) di lingkungan SNVT PIPA Cimanuk - Cisanggarung TA 2015		1			1	AKN IV			1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat IV.A sebagai informasi	
	Permohonan agar BPK memeriksa hasil penetapan lelang pengadaan gerobak oleh penitia tender di kementerian perdagangan		1			1	AKN II			1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat II.C sebagai informasi	
	Pengaduan terkait pembangunan pasar Kalabahi dan Puskesmas Maritaing di Kab. Alor Timur, NTT oleh PT Menara Jaya Makmur		1			1	AKN VI	1				1	Dibalas via email untuk melengkapi aduan	
	Pengaduan terkait Museum Penerangan TMII yang melaksanakan DIPA sejak 2015-2017 dengan tidak sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Memohon kepada BPK untuk melakukan audit investigasi			1		1		1					1	Identitas dan dokumen pendukung tidak ada
	Pengaduan terkait pekerjaan peningkatan aspal di Kab. Langkat TA 2017			1		1	AKN V	1					1	Tembusan dari Tortama V
	Surat tembusan terkait hasil temuan masyarakat atas status lahan ex HGU PTP XII Goalpara-Perbawati yang menyalahi aturan			1		1					1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat VII.C sebagai informasi
November	Dugaan penyalahgunaan uang pungutan tiket masuk Taman Wisata Alam Situ Patenggang oleh pengelola (PT PRAKARSA MULYA) di Jawa Barat				1	1	AKN IV			1		1	Disampaikan ke AKN IV untuk ditanggapi/ ditindaklanjuti	



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

November	Manipulasi dapodik guna TPG (Tunjangan Profesi Guru) SMA Tunas Luhur Paiton Kab. Probolinggo Jawa Timur	1				1	AKN VI	1				1	Sudah disampaikan melalui email untuk melengkapi bukti
	Tembusan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan bypass Kota Padang yang diduga merugikan negara sebesar Rp100 M			1		1	AKN IV			1		1	Disampaikan ke Kepala Auditorat IV.A sebagai informasi (BPK tembusan)
	Tembusan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara terkait pembangunan jalan di Desa Tragih, Jawa Timur			1		1	AKN III			1		1	Disampaikan ke Kepala Auditorat III.B sebagai informasi (BPK tembusan)
	Dugaan kerugian PNBK (Wisata Alam) Kementerian Kehutanan sebesar 3 Milyar	1				1	AKN IV		1		1		Disampaikan Kepada Kepala Auditorat IV. A
	Pengaduan terkait Dugaan Ketidaksihonestan Spesifikasi Pekerjaan Pemasangan Paket Instalasi Rumah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bandung TA 2017		1			1	AKN V		1		1		Disampaikan Kepada Kepala Auditorat V. B
	Masalah Anggaran Dana Desa pada Desa Sibaragas Provinsi Sumatera Utara	1				1	AKN III	1				1	Sudah disampaikan melalui email untuk melengkapi bukti
	Adanya penyalahgunaan pemakaian dana desa pada Kampung (Desa) Perdamaian, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang	1				1	AKN III	1				1	Sudah disampaikan melalui email untuk melengkapi bukti
	Penyalahgunaan penggunaan dana Desa Rambutan Masam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi	1				1	AKN III	1				1	Sudah disampaikan melalui email untuk melengkapi bukti

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Kecurangan terhadap hasil audit Inspektorat Kabupaten Karawang terkait dugaan penggelapan dana desa oleh Kepala Desa Malangsari Tahun 2015 dan 2016 sebesar 360 Juta	1			1	AKN III	1			1	Sudah disampaikan melalui email untuk melengkapi bukti dan akan dijadikan sebagai informasi pemeriksaan
		Dugaan permasalahan pada paket pekerjaan pemeliharaan Jalan Kentungan – Blimbingsari di Yogyakarta		1		1	AKN IV.A			1	1	Tembusan
		Dugaan permasalahan pada proses lelang paket pembangunan Gedung Politeknik Industri dan Pusat Inovasi di KI Morowali Tahap III tahun 2017		1		1	II.C			1	1	Tembusan
		Pengaduan terkait Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya terdapat dugaan ketidaksesuaian dengan peraturan/ketentuan yang berlaku		1		1	II.B			1	1	Tidak ada alamat pengadu
		Dugaan permasalahan pada pekerjaan rehap SDN Pasongsongan II di Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep TA 2017		1		1	VI.A			1	1	Tembusan
		Pengaduan terkait pembangunan gedung ruang kelas di SMKN 2 Nganjuk propinsi Jawa timur, dimana anggaran biaya untuk pembangunan tsb diminta ke wali murid kelas X (murid baru) sebesar 1,4 juta per siswa		1		1	AKN VI	1			1	Dibalas via email agar melengkapi aduan
		Pengaduan tembusan terkait pembangunan tol Balikpapan Samarinda		1		1	AKN IV, AKN VI	1			1	Dibalas via email agar melengkapi aduan
	November											

November	Pengaduan terkait manipulasi data jadwal dapodik oleh SMA Tunas Luhur Paiton Kab. Probolinggo Jawa Timur		1			1		1			1	Dibalas via email agar melengkapi aduan	
	Pengaduan terkait dugaan kolusi/pelanggaran CSR oleh PT KAI		1			1	AKN VII	1			1	Dibalas via email agar melengkapi aduan	
	Pengaduan dugaan penyimpangan dana desa pembangunan jalan setapak Desa Malangsari		1			1	AKN III, AKN V		1		1	Disampaikan ke satker sebagai informasi pemeriksaan	
Desember	Permohonan audit terkait dugaan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran pada kantor BPIAV Surabaya			1		1	AKN IV			1	1		
	Terjadi mark up pada pengadaan barang di Puspamau			1		1	AKN I	1			1	Isi Aduan dan Identitas Pengadu tidak jelas	
	Usulan DPP REI terhadap revisi Permen PUPR tentang kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)			1		1	AKN IV			1		1	Diteruskan ke AKN IV sebagai informasi pemeriksaan
	Tindak pidana korupsi kegiatan ganti rugi lahan pada penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia yang berada di wilayah kerja daerah operasi 2 Bandung	1				1	AKN VII		1			1	diteruskan ke AKN VII sebagai informasi pemeriksaan
	Permohonan audit keuangan terhadap kebenaran kompensasi tanah, tanaman dan perumahan oleh PLN Kab. Merangin Kerinci	1				1	AKN VII	1				1	isi aduan tidak lengkap dan sudah di balas lewat email tentang penjelasan permohonan audit
	Korupsi Anggaran Dana Desa yang Dilakukan oleh Kepala Desa Paribun, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara	1				1	AKN III	1				1	isi aduan tidak lengkap dan sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti- bukti

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Desember	Permohonan peninjauan pemeliharaan jalan Kab. Pandeglang	1				1	BPK Provinsi Banten	1			1	aduan tidak lengkap dan sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti- bukti serta aduan ini adalah dana APBD sehingga sudah di arahkan untuk mengirimkan aduan kepada BPK Banten
		Pengaduan terkait pembangunan ruang kelas SMU Negeri 9 di Kab. Kerinci		1			1	AKN V		1		1	Disampaikan kepada Kepala Auditorat V.B sebagai informasi
		Pengaduan terkait penanganan dugaan korupsi dana desa Hilihuru Kabupaten Nias yang berlarut-larut			1		1	AKN III, AKN V			1		1
<b>2</b>	<b>Non-pemeriksaan</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
	Januari	Pemberian pendapat dengan BPK terkait kegiatan Pemeriksaan Auditor BPK pada Kab. Lamongan Di Provinsi Jawa Timur	1				1		1			1	Sudah di Balas Via Email Jika Ada Pengaduan Tindak Pidana Korupsi dapat Disampaikan kpd BPK
	Maret	Pengaduan terkait saluran got yang tidak lancar			1		1	Biro Umum		1		1	Disampaikan langsung ke staf Biro Umum dan akan ditindaklanjuti
	April	Pengaduan terkait Sopir Bus Jemputan BPK No polisi B. 7128 IO Membahayakan Lalu Lintas	1				1	Biro Umum		1		1	Sudah Dibuatkan ND Kepada Kepala Biro Umum
		pengaduan terhadap keabsahan surat BPK terkait permintaan uang jaminan	1				1	Biro Humas		1		1	Sudah di balas Via Email Bahwa Surat Tersebut Bukan Dikeluarkan BPK
		Konfirmasi keabsahan surat dari BPK terkait permintaan data peralatan sandi pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Panajam Paser utara	1				1	AKN I		1		1	Sudah di balas Via email bahwa surat tersebut benar dari Tim Pemeriksa BPK pada AKN I

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Mei	Pengaduan yang menanyakan apakah kegiatan keagamaan boleh menggunakan dana APBN	1				1	AKN V		1		1	Sudah di balas lewat email bahwa BPK tidak boleh memberikan Jasa Konsultasi sesuai peraturan BPK
		Konfirmasi keabsahan surat undangan bimtek internal audit dan pembangunan karakter bangsa dari Pusdiklat BPK RI Jakarta	1				1	Pusdiklat		1		1	sudah di balas lewat email bahwa informasi tersebut tidak benar adanya
	Oktober	Informasi CPNS BPK 2017	1				1			1		1	Sudah di balas lewat email bahwa pembukaan Lowongan CPNS BPK di sudah di bukan dan benar
	Desember	Konfirmasi kebenaran surat tugas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1				1	BPK Jabar		1		1	Sudah di balas lewat email bahwa ST dan nama2 dalam ST tersebut benar
<b>3</b>	<b>Infomasi dikecualikan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Lain-lain</b>		<b>43</b>	<b>34</b>	<b>133</b>	<b>1</b>	<b>211</b>		<b>192</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
	Januari	Pengaduan Ke BPKP terkait adanya dugaan penyalahgunaan Pembangunan Fasilitas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi kapasitas 600 L/detik	1				1		1			1	Bukan Tupoksi BPK
		Belum dibayarkan Pekerjaan Proyek pada Kementerian Perikanan dan Kelautan	1				1		1			1	Bukan Tupoksi BPK
		Kebijakan Monopolis Direktorat Pembinaan SMK	1				1		1			1	Bukan Tupoksi BPK
		Aspirasi Rakyat Suarakan Kebenaran	1				1		1			1	Isi Aduan tidak jelas, Bukan Tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Januari	Perhatikan Aspirasi Rakyat	1				1		1			1	Isi Aduan Tidak jelas, Bukan Tupoksi BPK	
	Surat Tanggapan Kedua atas Surat Pemberitahuan Rektor UNJ kepada Seluruh Penghuni Asrama kampus F Universitas Negeri Jakarta (eks Asrama SGO)			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK surat diteruskan ke pengadu	
	Formula ASN untuk keadilan			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK, Identitas Pengadu Tidak Jelas	
	Undangan kepada Kepala Desa Pegandon perihal pertemuan tentang tukar menukar tanah kas desa			1		1				1	1	Tembusan, Isi aduan tidak jelas, bukan tupoksi BPK	
	Permasalahan tuntutan paguyuban pensiunan BRI			1		1				1	1	Tembusan, Bukan tupoksi BPK	
	Permohonan ganti rugi atas pengrusakan lingkungan panorama			1		1				1	1	Tembusan, Bukan tupoksi BPK	
	Permohonan penjelasan mengenai status PSU Perumahan Pelni			1		1				1	1	Tembusan, Bukan tupoksi BPK	
	Mencari Kejelasan Terkait Penipuan yang Dilakukan oleh ASN pada Pemerintah Provinsi Gorontalo	1					1		1			1	Bukan Tupoksi BPK
	Pengaduan terkait pelayanan Badan Pertanahan Nasional Belum Optimal			1		1			1			1	Tembusan, Bukan tupoksi BPK
	Laporan mengenai Surat Peringatan PT. Pos Indonesia untuk Membayarkan uang lembur pekerja satpam PT. Pos Indonesia Kantor Regional II Padang selama 5 (lima) bulan sejak Agustus s.d Desember 2015			1		1			1			1	Tembusan, Bukan tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Klarifikasi terhadap Dugaan konspirasi Pengaturan Tender Pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan			1		1			1		1	Tembusan, Bukan tupoksi BPK
		Surat tanggapan atas konfirmasi serta perbaikan kedua lampiran 3 tindak lanjut dugaan perbuatan melawan hukum atas pelaporan pasal 310 dan 311 KUHP oleh terlapor			1		1			1		1	Tembusan, bukan tupoksi BPK, sudah memasuki wilayah hukum
		Surat permohonan perlindungan hukum dan audiensi terhadap terbitnya Surat Pemberitahuan Rektor UNJ No. 4596/UN39/TU/2016 tanggal 22 November 2016, surat pemberitahuan kedua No. 4916/UN39/TU/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan surat pemberitahuan ketiga No. 4941/UN39/TU/2016 tanggal 23 Desember 2016			1		1			1		1	Tembusan, ditujukan kepada Menristekdikti, bukan tupoksi BPK
		Pengaduan terkait pemalsuan tanda tangan untuk menerbitkan rekening Bank Mandiri a.n. Ir. Sulijar Situmeang			1		1			1		1	Tembusan, ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK, bukan tupoksi BPK
		Surat pencabutan laporan pengaduan terhadap PT. Hampan Masawit Bangun Persada (HMBP)			1		1			1		1	Tembusan, bukan tupoksi BPK
		Surat pengaduan terkait kontrak PT Putra Binatama Raya, kontrak CV Tambun Jaya, kontrak PT Bina Karya Ciai dan kontrak PT Pantja Djaja Ranau, tidak juga dibatalkan dan ditender ulang, diduga kuat telah dilindungi oleh pihak terkait			1		1			1		1	Tembusan, bukan tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Pengaduan Terkait Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Oleh Kepala Desa Sinta Dame, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara			1		1		1			1	Tembusan, isi aduan tidak jelas dan lengkap
		Surat tembusan terkait laporan hasil pertemuan dengan tim Direktorat Sistem Perbendaharaan di Kementerian Kesehatan			1		1		1			1	Tembusan, bukan tupoksi BPK
		ND dari Tortama KN VI kepada kepala Biro Humas terkait ND yang disampaikan dari BPK Perwakilan NTT mengenai surat gugatan CV Jehofah Rafa			1		1		1			1	Sudah koordinasi dengan BPK Perwakilan NTT bahwa itu hanya sebagai bahan informasi saja ke AKN VI
	1	Belum di bayarkannya biaya pemasangan reiling tangga stainless Pada Project oleh PT. Adhi Karya, pada Proyek PT. Sinarmas Dumai - Prov. Riau					1		1			1	Sudah di balas Via email bukan Tupoksi BPK karena pekerjaan Proyek Swasta bukan berasal dari dana APBN dan APBD
		Permohonan kepastian hukum atas pemeriksaan BPKP Perwakilan Riau terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai terkait permasalahan PT Mitra Kencana Sakti pada pembangunan drainase penanggulangan banjir di Jl. Sultan Hasanuddin dan sekitarnya di wilayah Kec. Dumai Kota TA 2013			1		1		1			1	Dijawab dengan surat PPID, masuk ke ranah hukum, bukan tupoksi BPK
		Penyampaian data VERVAL FHK2I Kota Sungai Penuh untuk diangkat PNS secara bertahap 2017-2019			1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK, BPK sebagai tembusan



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Penjelasan terhadap peringatan surat tanggal 7 Des 2017 tentang sewa tanah dan penyerahan tanah/objek sewa kepada Pemkot Bandung			1		1				1	Bukan tupoksi, BPK sebagai tembusan
		Penyampaian surat laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran bulan Januari s.d. Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang			1		1	AKN II		1	1	Disampaikan kepada Kaod II.B
		Perlindungan konsumen dan Masyarakat			1		1	AKN II			1	Bukan tupoksi, BPK sebagai tembusan
		Dugaan penzaliman melalui peradilan sesat terhadap Sdri. Meryana Kusumaningsih oleh oknum penyidik, JPU dan Hakim Tipikor Yogyakarta			1		1				1	Bukan tupoksi BPK, sudah ada nomor perkara (sudah pada ranah hukum), BPK sebagai tembusan
		Pengaduan mengenai kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas V Muntok			1		1				1	Tidak ada bukti pendukung, identitas tidak jelas
		Tembusan pengaduan terkait sertifikat ganda pembelian tanah di Rawalumbu bekasi a.n Zainudin			1		1				1	Bukan tupoksi, Identitas tidak lengkap, BPK sebagai tembusan
	1	Pengaduan terkait adanya pengangkatan dewan pengurus rumah sakit yang cacat hukum					1				1	Bukan Tupoksi BPK
	1	Permohonan untuk melaksanakan konsultasi dengan Pihak BPK terkait Dana BOS					1				1	Sudah balas lewat email dan di Sampaikan bahwa BPK Tidak Boleh Melakukan Konsultasi
		Penyalagunaan biaya pengganti jasa angkut LPG 3 Kg bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada agen LPG di wilayah kabupaten Sidoarjo Jawa Timur			1		1	Biro Humas			1	Bukan Tupoksi BPK, Identitas Pengadu Tidak Jelas

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Permohonan perlindungan hukum dan pengaduan atas dugaan penyalagunaan jabatan oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN			1		1	Biro Humas	1			1	BPK sebagai tembusan, Bukan Tupoksi BPK
		Surat pengaduan terkait permohonan untuk mendorong dan mendesak Ketua/Pimpinan KPK agar kasus korupsi pengadaan ke-5 unit kapal ikan APBD 2006 Dinas Perikanan Kab.Banyuwangi diambil alih oleh KPK			1		1	AKN V			1	1	Dibalas dengan surat keluar PPID bahwa proses hukum di luar wewenang BPK
		Surat pertanggungjawaban kegiatan dana ADD dan DD tahun 2016 Desa Orahili Kec. Namohalu Esiwa, Kab. Nias Utara			1		1	AKN V			1	1	Disampaikan kepada Kaod V.B untuk diketahui
		Surat permohonan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk memperjelas batas-batas tanah Limantoro Sihombing pada SHM 24 dan SHM 25			1		1				1	1	BPK sebagai tembusan, bukan tupoksi BPK
	1	Pengaduan terkait penjual tambang nikel oleh perusahaan korea yang ilegal dengan militer indonesia					1		1			1	Bukan Tupoksi BPK
		Pengaduan pemberitahuan untuk mentaati dan menjalankan penetapan PTUN Surabaya Nomor 51/G/2016/PTUN/ Surabaya atas sengketa pedagang PD Pasar Surya Surabaya			1		1	Biro Humas	1			1	Tembusan, Bukan Tupoksi BPK
		Permohonan konfirmasi dan penjelasan hak pemanfaatan pengelolaan barang negara eks Kelola PT. PPA (Persero) yang terletak di Jl. Pemuda No. 18A/B/C, Kota Medan			1		1	AKN II.B	1			1	Tembusan, Bukan Tupoksi BPK di Tunjukkan kepada Mentri Keuangan RI

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Januari	Pengaduan terkait penyimpangan dengan sengaja bahwa Upt. Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Kediri melakukan pemalsuan tanda tangan absen, realisasi proyek swakelola Tahu 2016 dsb.			1		1		1			1	Tembusan, Bukan Tupoksi BPK	
	Penyampaian gaji berkala dari dosen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Nusa Cendana, Kupang NTT.			1		1	AKN III		1		1	Disampaikan ND ke Auditorat III.C	
Februari	Penyampaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI TA 2015 pada BSML Regional II Yogyakarta dan BSML Regional IV Makassar			1		1	AKN II		1		1	Disampaikan kepada Kaod II.C sebagai informasi	
	Pengaduan terkait untuk meminta BPK memeriksa harta kekayaan para pejabat, yang kekayaannya melonjak dalam waktu yang tidak terlalu lama dan minta dipidanakan apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan.			1		1		1				1	Bukan tupoksi BPK dan identitas pengadu tidak ada
	Pengaduan tembusan terkait perilaku oknum pegawai di BNN Trenggalek			1		1		1				1	Bukan tupoksi BPK, identitas pengadu tidak jelas, BPK sebagai tembusan
	Pengaduan terkait penetapan dan pengangkatan sebagai CPNS di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diduga ada kolusi nepotisme dan tidak sesuai peraturan			1		1			1			1	Bukan tupoksi BPK, dibalas dengan surkel Karo Humas
	Pemberitahuan terkait akan dilaksanakannya survey ijin pajak sarang burung walet di Kota Palembang		1			1		1				1	Bukan tupoksi BPK, hanya merupakan pemberitahuan saja

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Februari	Pengaduan terkait nota palsu oleh PT Lancar Putra Jaya		1			1		1			1	Dibalas via email untuk melengkapi pengaduan dan dibuat kronologisnya
	Ketidakjujuran PNS pengangkatan pengawas P2UP melalui inpassing melanggar prosedur di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bandung	1				1		1			1	Bukti tidak lengkap dan sudah di balas lewat email untuk melengkapi bukti-bukti serta Bukan Tupoksi BPK
Maret	Penyampaian tentang kekuasaan pemerintah Negara RI dan kehakiman sebagai mana dimaksud			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK dan Isi Aduan Tidak jelas
	Pengaduan tentang tanah asing ex sekolah tionghoa yang dikuasai Sdr. Suryadi Tandio tanpa alasan bukti kepemilikan			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK dan hanya sebagai tembusan
	Pengaduan terkait penahanan gaji dan hak-hak pns lainnya a.n Halit Faisal, SE. M.Ec. Dev yaitu PNS Kab. Maluku Tenggara pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK dan hanya sebagai tembusan
	Pemberitahuan sekaligus permohonan tentang pernyataan pailit			1		1		1			1	Tembusan bukan tupoksi BPK
	Kontrak CV Versa Anugrah Abadi tidak juga dibatalkan atau ditender ulang. Diduga kuat telah dilindungi Pengguna Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			1		1		1			1	Tembusan
	Pengaduan terkait waspada bahaya komunis dari cina			1		1		1			1	Isi aduan tidak jelas identitas pengadu tidak ada

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Keabsahan Uang Rupiah Negara Republik Indonesia			1		1			1		isi aduan tidak jelas
		Tanggapan atas tindak lanjut pengadaan tanah di Cilacap			1		1			1		BPK sebagai tembusan
		Pengaduan pemberitahuan untuk mentaati dan menjalankan penetapan Nomor 51/G/2016/PTUN.SBY			1		1			1		BPK sebagai tembusan, bukan tupoksi BPK
		Permohonan perlindungan hukum dan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN			1		1			1		BPK sebagai tembusan
		Penyalagunaan biaya pengagnti jasa angkut LPG 3 kg di Kabupaten Sidoarjo			1		1			1		Identitas Pengadu Tidak Jelas, Bukan Tupoksi BPK
		Penyampaian petisi guru swasta madrasah se Kab. Indramayu			1		1			1		Bukan tupoksi BPK
		Pernyataan politik Anggota DPD RI terhadap pengaktifan kembali Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta yang bertentangan dengan undang-undang.			1		1			1		Bukan tupoksi BPK
	1	menemukan barang hilang berupa identitas pegawai BPK a.n Anita Frihatini					1			1		Sudah disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan dan sudah di balas Via Email kepada pengadu
		Evaluasi kinerja pinpinan KPK Tahun 2016			1		1			1		Hanya Sekedar Informasi dan Tembusan kepada BPK
		Saluran Udara Tegangan Tinggi yang dibangun PLN belum membayar biaya ganti rugi kepada masyarakat sesuai harga setempat			1		1			1		Bukan Tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Laporan tidak transparannya seleksi dan assesment direksi PT POS Indonesia			1		1			1	Identitas Pengadu Tidak Jelas, Bukan Tupoksi BPK
		Permohonan pemeeriksaan terhadap Kajari Melonguane			1		1			1	Identitas Pengadu tdk Jelas, bkn Tupoksi BPK
		Somasi II dan terakhir kepada Dinas Bina Marga dan Tata Runag Prov. Banten			1		1			1	BPK sebagai tembusan, bukan tupoksi BPK
		Permohonan Penahanan Invoice Berdasarkan Perjanjian Kontrak antara PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) dan Consortium PT Rekayasa Industri - PT worley Parson Indonesia (WPI) tentang Kontrak Rekayasa dan Manajemen Kontruksi Kontrak Jasa-jasa Konstruksi No. 82244 Tanggal 12 Januari 2012			1		1			1	BPK sebagai tembusan, ditunjukkan kepada Presiden Firektur PT. Chevron Pacific Indoensia serta bukan tupoksi BPK
		Surat tembusan permohonan audit permasalahan tukar menukar tanah di Desa Pegandon Tahun 1993			1		1			1	Bukan tupoksi BPK, BPK sebagai tembusan, alamat pengirim tidak jelas
		Pengaduan terkait kinerja Penyuluh Keluarga Berencana			1		1	AKN III		1	Kronologis pengaduan tidak jelas, identitas pengadu tidak jelas
		Surat tembusan Somasi Kedua kepada Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) dari Lembaga Bantuan Hukum Kebangkitan Indonesia Baru			1		1			1	BPK sebagai tembusan, bukan tupoksi BPK, dan bersifat pribadi
		Surat tembusan Somasi yang ditunjukkan kepada Walikota Tual dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia			1		1			1	BPK sebagai tembusan, bukan tupoksi BPK, dan bersifat pribadi
	1	kurang terawatnya pagar pembatas fisik di area keamanan terbatas bandar udara Atung Bungsu kota Pagar Alam					1			1	Bukan tupoksi BPK

	Pengaduan terkait usulan penggabungan Setkab ke dalam Kementerian Setneg		1			1		1				1	Bukan tupoksi BPK, sebagai tembusan, ditujukan kepada Presiden
	Pengaduan terkait pengangkatan dan pembayaran tenaga honorer yang tidak sesuai aturan pada Dinas Pendidikan Kab. Toraja Utara		1			1		1				1	Kronologis aduan tidak jelas, identitas tidak jelas, dibalas via email untuk melengkapi aduan
	Pengaduan terkait penipuan transfer uang dari Malaysia		1			1		1				1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan terkait penetapan pemenang lelang di Kemenhub		1			1		1				1	Bukan tupoksi BPK, dibalas via email untuk menyampaikan ke pihak terkait
	Pengaduan terkait pembatas fisik bandar udara Atung Bungsu, Kota Pagar Alam		1			1		1				1	Kronologis tidak jelas, dibalas via email untuk melengkapi aduan
	Pengaduan terkait kepemimpinan dan pungutan oleh Kepala SMA Negeri 1 Sojol Donggala, dan meminta BPK untuk mengauditnya		1			1		1				1	Dibalas via email bahwa BPK tidak melakukan pemeriksaan atas personal, dapat disampaikan kepada pihak terkait
	Laporan hasil audit menyeluruh TA 2016 ITJEN Kemenpu dan PR pada satker SKPD TP OP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara			1		1	AKN.VI.B	1				1	Hanya sebagai tembusan
	Tembusan Pengaduan terkait Somasi pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dan impasing pada Kementerian Agama Kab. Jember			1		1	AKN.V	1				1	BPK sebagai tembusan serta bukti pendukung tidak lengkap
	kekurangan pembayaran gaji pegawai tenaga tidak tetap pada Dinas Perhubungan Kota Palopo	1				1		1				1	buktitidak lengkap dan bukan tupoksi BPK karena permasalahan Internal

April	Permohonan konsultasi terkait kegiatan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran dari dana Bantuan Keuangan Provinsi TA 2012 agar dapat dilaksanakan pada TA 2017			1		1			1			1	Disampaikan kepada Kaod V.B untuk ditindaklanjuti, status selesai karena bukan pengaduan, tetapi permohonan konsultasi
	Pembayaran denda dan uang pengganti dari Mohammad Bahalwan/ PT. Mapna Indonesia taas korupsi PLTGU 2.1 dan 2.2 PLN Pembangkit Belawan Sumatera Utara			1		1		1				1	BPK sebagai tembusan
	Sanggahan pengumuman pemenang lelang pekerjaan preservasi rehabilitasi jalan Padang Sidempuan-Jembatan Merah-Ranjau Batu Sumut			1		1		1				1	BPK sebagai tembusan
	Permohonan pengajuan pagelaran wayang kulit dalam rangka ruwatan bagi seluruh jajaran personil BPK sekaligus ruwatan untuk menolak bala terhadap gangguan dan halangan yang merugikan oleh Paguyuban Spriritual dan Doa Ritual Songgo Bawono			1		1		1				1	Bukan Tupoksi BPK
	Pemberitahuan penetapan status Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungsang IV, Banyuasin			1		1		1				1	Bukan Tupoksi BPK dan BPK hanya sebagai Tembusan
	Pengaduan mengungkap rekayasa oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Yayasan BKKK Jl. Jahe No. 2 yang hendak menguasai lahan BKKK Tangerang			1		1		1				1	Bukan Tupoksi BPK
	Pengaduan terkait meminta ketegasan kepada Presiden, KPK, BPK, PPATK tentang tindak pidana korupsi yang ada di Pemda Karawang/ di BPKAD			1		1		1				1	Bukan Tupoksi BPK



	ND dari Kepala Auditorat V.B kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah terkait penyampaian pertimbangan usulan pinjaman daerah grobogan TA 2017, dispsosisi ketua BPK ke AKN V			1		1		1			1	Sebagai tembusan dan untuk diketahui Humas
	ND dari Tortama KN V kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur terkait penyampaian dokumen pengaduan masyarakat perihal penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di dalam kawasan Daerah Basis Angkatan Laut (DBAL) dan aset pemerintah kota surabaya di jalan Indragiri Nomor 6 Surabaya, dispsosisi ketua BPK ke AKN V			1		1		1			1	Sebagai tembusan dan untuk diketahui Humas
	Permohonan pembangunan tower jaringan pada Desa Martujuan	1				1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	permohonan melakukan pengecekan Penggunaan Sertifikasi Keahlian Bidang Geodesi	1				1		1			1	Hanya sebagai informasi dan bukan tupoksi BPK
	Korupsi bantuan transmigrasi pada kab. dumai, Provinsi riau	1				1	AKN III	1			1	Sudah Dibalas Via Email dan bukan Tupoksi BPK, Surat tidak jelas di tunjukkan ke siapa dan tanggal surat tahun 2015
	Tembusan pengaduan terkait permohonan penyelidikan RAB dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa Tahun 2016 dan program alokasi Dana Desa Tahun 2016 yang dialokasikan di desa sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jatim			1		1		1			1	Surat disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, dan bukan tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

April	Pengaduan tidak bisanya dibayarkan dana BOK pada Puskesmas Se-Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat bulan juli s.d desember 2016	1				1	AKN VI	1				1	Bukan tupoksi BPK
	Monopoli penyedia IPAL E-Katalog	1				1	AKN V	1				1	Bukan Tupoksi BPK
Mei	Penyelesaian permasalahan pertanahan di Kabupaten Rokan Hilir			1		1		1				1	Tembusan bukan tupoksi BPK
	Belum Di bayarkannya gaji tenaga keamanan PT Kartika Cipta indonesia oleh Rumah Sakit Otak Nasional	1				1		1				1	Bukan tupoksi BPK Kerena PT Kartika Cipta Indonesia Pihak Swasta
	Belum di inventarisir aset negara dalam pembangunan instalasi IPAL pada desa Adiwerna Kab. Tegal	1				1		1				1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan terkait kejahatan ITE di BPHN RI dan Kakanwil KumhamRI Jatim		1			1		1				1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan terkait dugaan suap di BPN Kab. Cirebon karena mengeluarkan sertifikat tanah dobel		1			1		1				1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan permasalahan tanah milik ahli waris yang dibeli oleh MTS Negeri Lawang, yang sampai sekarang belum diterima bagian penjualannya oleh ahli waris			1		1		1				1	Bukan tupoksi BPK, identitas tidak ada

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Juni	Permohonan untuk melakukan penelusuran asal usul uang kerohiman untuk pengusiran dan pengosongan paksa warga Komplek Perumahan Cijantung II	1			1		1			1	Sudah di balas melalui surat keluar bahwa hal tersebut bukan kewenangan BPK
	laporan pengaduan mengenai kekurangan biaya tugas belajar atas nama Titik Cahyani dkk di Pemda Kalimantan Timur dari Kantor Kuasa Hukum Anthony Lesnussa S.H			1	1		1			1	Sudah di balas melalui surat keluar bahwa hal tersebut bukan kewenangan BPK
	Pengaduan atas realisasi Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan HO di Kota Metro Lampung			1	1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	pengaduan terkait belum dikembalikannya sertifikat jaminan kredit Pada Bank BPRs Patriot Syariah Kota Bekasi	1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan untuk melakukan pemeriksaan pembuatan kwitansi kosong dalam pembelian jamuan makan	1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan masyarakat tentang keluarga Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi			1	1		1			1	Identitas Pengadu Tidak Jelas
	Pengaduan terkait adanya penjualan gas Elpiji di atas Harga Eceran Tertinggi pada agen gas rayon kabupaten kulonprogo PT. Putra Pertamina Jaya	1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Permasalahan pada proses penerimaan siswa baru (PPDB) di MTs Negeri Lawang, Malang, Jawa Timur			1	1		1			1	tidak ada dokumen pendukung, bukan tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Juni	Sengketa tanah yang dibeli oleh MTs Negeri Lawang (pemilik tanah sebelumnya belum mendapat bagian pembayaran pembelian tanah)			1		1		1			1	tidak ada dokumen pendukung, tidak ada identitas, bukan tupoksi BPK	
	Juli	Pengaduan dari pungutan liar dan ancaman yang terus kepada keluarga pengadu dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Maros Sulawesi Selatan			1		1	Biro Humas	1			1	Identitas Pengadu Tidak Jelas dan Bukan Tupoksi BPK	
		Kredit macet bank BUMN pada PT Dharmatama Megah Finance	1				1		1			1	Bukan Tupoksi BPK	
		Permohonan dispensasi dari BPK terkait keterlanjutan bayar tunjangan profesi Guru oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai a.n Zulkarnaen	1				1	AKN V	1			1	Bukan Tupoksi BPK	
		penyalahgunaan dana sekolah oleh bendahara dan ketua yayasan pendidikan harapan Medan	1				1		1			1	Bukan Tupoksi BPK	
		Surat tembusan permohonan dialog dari Serikat Pekerja Pos Indonesia kepada Menteri Negara BUMN				1		1	AKN VII	1			1	Hanya tembusan sebagai informasi, bukan tupoksi BPK
		Surat permohonan pindah antar instansi atas nama Sdr. Rudolf F.S, S.AP.				1		1	Biro SDM		1		1	Disampaikan ke satker terkait
		Penyampaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kementerian Agama Tahun 2016				1		1	AKN V			1	1	Disampaikan ke satker terkait
		Penyampaian laporan realisasi/daya serap DIPA TA 2017 Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya				1		1	AKN I			1	1	Disampaikan ke satker terkait

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Usul UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara harus diamandemen			1		1		1			1	Ditujukan ke DPR, bukan ke BPK. Ranah DPR
	Dugaan suap oknum majelis hakim yang diketuai oleh Sarah Louis S., SH. dalam perkara nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bks, nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bks			1		1	AKN V Biro Humas dan KSI (PPID)		1		1	Dibalas melalui surat PPID bahwa BPK tidak dapat menindaklanjuti pemeriksaan atas kasus yang telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga dapat disampaikan langsung kepada pihak-pihak yang berwenang
	Pengaduan terkait uang impassing guru swasta di Kediri di bawah naungan Kemenag		1			1	AKN V	1			1	Bukan Tupoksi BPK
	Pengaduan terkait pungli di RSUD/Puskesmas/Dinkes Kab. Ponorogo		1			1	AKN V	1			1	Bukan tupoksi BPK, dibalas via email untuk menyampaikan aduan kepada pihak terkait (Kemenkes)
	Permohonan fatwa dan perlindungan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan Bupati Cianjur		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK, hanya sebagai tembusan
	Pengaduan terkait kejanggalan dan ketidakadilan proses pemilihan rektor di IAIN Bengkulu		1			1	AKN V	1			1	Bukan tupoksi BPK, identitas pengirim tidak jelas
	Permohonan audit SMK swasta di Kab. bogor		1			1		1			1	Dibalas via email bahwa BPK memeriksa dana APBN/APBD
	Surat sanggahan Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan Tahap Finishing Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK, hanya sebagai tembusan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Pengaduan terkait pendidikan di Kupang		1			1	AKN VI	1				1	Aduan tidak jelas, dibalas via email untuk melengkapi aduan
	Pengaduan kepada Gubernur DKI terkait harapan untuk menyelesaikan pembangunan waduk rawa lindung pesanggrahan		1			1	AKN V	1				1	Bukan tupoksi BPK, hanya sebagai tembusan
	Pengaduan terkait pekerjaan double dosen STIE Lumajang		1			1		1				1	Aduan tidak jelas, bukan tupoksi BPK
	Perwujudan dan Pelaksanaan Hak Politik dan Hak Ekonomi Kedaulatan atas nama Yth. Bapak Mujais dan Kami yaitu Keabsahan "Yurisdiksi (Otonomi/ Kedaulatan) Pemberdayaan" dalam/ untuk menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia c.q. Hak konstitusional atas administrasi pengelolaan [Uang rupiah, tanah, (kekayaan dan keuangan) Negara] yang bebas dari hutang dan bebas dari campur tangan kekuasaan moneter dunia internasional c.q. bebas dari beban suku bunga Bank Indonesia hasil Produktifitas Sosial Ekonomi Pemberdayaan dengan sebutan " Program Dana Bergulir Serasi Berdaya ".			1		1		1				1	Pengaduan tidak jelas
	Penyimpangan prosedur pengangkatan, pelaksanaan tupoksi dan penetapan angka kredit pada Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kota Bandung			1		1				1		1	Tidak ada identitas

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Agustus	Permohonan penjelasan dan rekomendasi terkait penunjukan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPATK) Golongan II Staf Pelaksana pada Setwan DPRD Kalimantan Tengah	1				1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Dugaan korupsi pembelian buku administrasi Guru di UPTP Citeureup Kab. Bogor	1				1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Belum selesainya proyek waduk situ rawa lindung selama 6 tahun	1				1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Menanyakan tentang status pegawai negeri sipil a.n Neni Sahara Noerdin	1				1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Permohonan keadilan atas hak pensiun			1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan mengenai penyerobotan tanah milik negara pada area Tanah Pemakaman Umum Jatisari	1				1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Menggugat sistem elektronik dalam pelayanan perpajakan	1				1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Pali Sumatera Selatan			1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan terkait kondisi Pasar Cinde di Palembang		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan terkait praktek pungli di Disdik Langkat		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan terkait permasalahan dosen di Univ. Malikussaleh		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan terkait pencairan jaminan kecelakaan kerja kepada ahli waris		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Agustus	Pengaduan terkait pemecatan secara sewenang-wenang dosen & pegawai kontrak/tidak tetap/honoror oleh Rektor Univ. Jambi		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Permohonan pembayaran ganti rugi penggunaan tanah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon				1	1	AKN V	1			1	Bukan tupoksi BPK. Dokumen pengaduan diserahkan kepada Auditorat V.B
	Pengaduan terkait pembagian raskin di Pamekasan		1			1	AKN VII	1			1	Pengaduan tidak lengkap, dibalas via email untuk melengkapi pengaduan
	Permohonan konsultasi tugas sebagai administrator dan verifikator laporan dana BOS	1				1	AKN VI	1			1	Dibalas lewat email bahwa BPK tidak dpt memberikan konsultasi
September	Permohonan bantuan penyelesaian atas kesewenangan oknum PTP Mitra Ogan dan PT Rajawali Nusantara Indonesia			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK/ BPK Sebagai Tembusan
	Dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sudipo, S.Sos, MM selaku camat Prabon Kab Nganjuk			1		1		1			1	Identitas Pengadu tidak jelas dan bukan tupoksi BPK
	Permohonan konfirmasi sebagai tindak lanjut laporan dugaan indikasi perbuatan melawan hukum pada tata kelola limbah B3 serta permohonan konfirmasi sistem penilaian peringkat proper Kemelhk juga tata cara penerbitan izin pengelolaan limbah B3 di Kemenlhk			1		1		1			1	Identitas Pengadu tidak jelas dan bukan tupoksi BPK
	Permohonan agar aparat penegak hukum menindak tegas terkait kasus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Sejahtera			1		1		1			1	Kasus sudah diproses hukum, bukan tupoksi dan wewenang BPK



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Permohonan agar Menteri KKP membatalkan persyaratan teknis yang tidak sesuai dgn peraturan perundang-undangan, mengevaluasi penunjukan pemenang, serta memeriksa dan menindak tegas oknum staf teknis yang memasukkan persyaratan tersebut, dalam proses pengadaan Redundant Bandwith di KKP			1		1			1		1	BPK sebagai tembusan, bukan tupoksi BPK
		Tembusan pengaduan terkait penyerobotan tanah aset negara ex sekolah Tionghoa, memohon agar KPK bisa melakukan supervisi ke lingkungan kerja DJKN			1		1			1		1	BPK sebagai tembusan, bukan tupoksi BPK
		Permohonan penyelidikan dugaan yang menyebabkan kerugian uang negara karena belum dieksekusinya hasil putusan Mahkamah Agung yg telah berkekuatan hukum tetap			1		1			1		1	Bukan Tupoksi BPK
		Permohonan bantuan sumbangan pembangunan asrama dan renovasi gedung sekolah SMPK Swadaya Maukaro Kabupaten Ende NTT			1		1			1		1	Bukan Tupoksi BPK
	1	Penyelewangan dana banpol pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Grobogan					1			1		1	Bukan Tupoksi BPK
	1	Dugaan penyelewangan kegiatan lelang pada LPSE Kementerian Perindustrian					1			1		1	Bukan Tupoksi BPK
	1	Belum dibayarkannya tunjangan sertifikasi guru pada SMK NEgeri 1 Sulawesi Selatan					1			1		1	Bukan Tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

September	Pengaduan terkait sertifikasi guru yang belum cair		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK, diarahkan untuk menyampaikannya ke Kemendikbud
	Pengaduan terkait kepemimpinan otoriter di Unlam		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	Pengaduan terkait adanya Pemerasan dan Mafia Proyek RRDP di Kebumen Jawa Tengah		1			1		1			1	Bukan tupoksi BPK
Oktober	Dugaan oknum pegawai Bank DKI yang berbuat curang/ jahat dengan modus menjiplak nomor kartu ATM dan nomor PIN nasabah sehingga digunakan untuk kepentingan pribadi			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK & Identitas pengadu tidak jelas
	Permohonan segera tindakan langkah Presiden, Ketua MA, Ketua PTUN Bandung menelusuri surat 21 Agustus 2017 tentang surat oknum Bupati Karawang yg menolak dan tdk menerima Kep. MA			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK, Tembusan
	Surat tembusan terkait usul amandemen UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 dipadukan dengan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Anti Korupsi			1		1		1			1	Ditujukan kepada Presiden, BPK sebagai tembusan, bukan tupoksi BPK
	Pengaduan terkait permohonan pengembalian keberadaan tanah adat milik bersama dan tanah adat milik perseorangan serta hak-hak adat di atas tanah yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat adat dayak yang sudah digarap dan dikuasai oleh PT. Tapian Nadengan			1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

				1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK, dibalas ke pengadu
				1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK
				1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK, sudah dijawab melalui surat PPID
				1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK, sudah dijawab melalui surat PPID
				1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK, sudah dijawab melalui surat PPID
		1				1	AKN V	1			1	Isi aduan tidak jelas
		1				1	AKN VI	1			1	Dibalas via email untuk melengkapi aduan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

November	Tagihan indihome yang tidak jelas	1				1		1			1	Bukan Tupoksi BPK
	Kenaikan tagihan air pada PDAM Tirta Asasta Kota Depok	1				1		1			1	Bukan Tupoksi BPK
	Politisasi birokrasi pada Kementerian Agama			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK
	Pengajuan Penggantian Aset Pribadi Milik WNI eks Timor Timur di Wilayah Jawa Timur			1		1		1			1	Bukan Tupoksi BPK
	Tembusan laporan terkait tidak dibayarkannya gaji perangkat Desa Loloana'a Adanoi			1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK, BPK sebagai tembusan
	Permohonan pemeriksaan atas karyawan PT. Patra Drilling Contractor yang diduga melakukan mark-up			1		1		1			1	Dibalas surkel PPID bahwa bukan tupoksi BPK untuk memeriksa individu
	Pengaduan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara Pemilu di Banjarmasin			1		1	AKN VI	1			1	Bukan tupoksi BPK
	Tembusan surat keterangan status lahan terkait rencana Pemkab Sukabumi untuk membangun Kawasan Agro Wisata di Kec. Kadudampit			1		1	AKN V, AKN III	1			1	Bukan tupoksi BPK, BPK sebagai tembusan
	Tembusan surat pemberitahuan penetapan eksekusi tanah yang telah inkraacht dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada PT Bumi Bintang Bersatu			1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK, BPK sebagai tembusan
	Pembayaran gaji untuk dokter spesialis yang tidak tepat pada RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, kab. Flores Timur, Prov. NTT	1				1		1			1	Bukan Tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

November	Pengaduan masyarakat terkait kondisi Pasar Tunjungan Surabaya			1		1		1			1	Bukan tupoksi (dijawab melalui surat PPID)
	Pengaduan terkait tidak tertibnya penggunaan lahan perkebunan Goalpara Kec. Sukalarang, Kab. Sukabumi dan permohonan untuk mengembalikan lahan tersebut kepada petani.			1		1		1			1	Termbusan, bukan tupoksi
	Somasi (teguran keras) terkait pengadaan mebeulair rangka besi pada Dinas Pendidikan Kab. Bekasi			1		1		1			1	Termbusan, bukan tupoksi
	Pengaduan kebocoran dan penyelewengan pajak oleh beberapa PT			1		1		1			1	Bukan tupoksi, tidak ada alamat
	Permohonan perlindungan hukum terkait masalah KPR			1		1		1			1	Termbusan, bukan tupoksi
	Permasalahan pinjaman PT Fastrade Internasional pada Bank Papua			1		1		1			1	Termbusan, bukan tupoksi
	Pengaduan atas Kepala Desa Semelako II terkait pembangunan di Desa Semelako II yang tidak jelas			1		1		1			1	Termbusan, tidak ada identitas, tidak ada dokumen pendukung
	Permohonan klarifikasi terkait tanah milik Leonard Equin Smith/Patemah	1				1		1			1	Hanya tembusan dan bukan tupoksi BPK
	Desember	Pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia			1		1		1			1
Pengaduan terkait hukum tata acara tata usaha militer				1		1	AKN I	1			1	Bukan Tupoksi BPK, Identitas pengadu tidak jelas
Spekulasi dan manipulasi atas tanah adat di kota jayapura yang merugikan negara				1		1	AKN VI	1			1	Bukan Tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

		Dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh di Kota Bengkulu oleh Dirjen Cipta karya Kementerian PUPR			1		1	AKN IV	1			1	Bukan Tupoksi BPK, Disampaikan Surkel PPID ke Pengadu
		Permohonan untuk melakukan eksekusi hasil keputusan Mahkamah Agung			1		1	Biro Humas	1			1	Bukan Tupoksi BPK, Disampaikan Surkel PPID ke Pengadu
		Permohonan pengembalian keberadaan tanah adat milik bersama dan tanah adat milik perseorangan, serta hak-hak di atas tanah adat yang dimiliki secara turun temurun yang sudah digarap dan dikuasai oleh PT. Tapian Nandengan di Desa Kawan Batu, Kecamatan Kuala Kuayan Mentaya Hulu, Kota Warigin Timur Sampit			1		1	Biro Humas	1			1	Bukan Tupoksi BPK, Identitas pengadu tidak jelas
		Dugaan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum karyawan Bank DKI kepada nasabahnya			1		1	Biro Humas	1			1	Identitas pengadu tidak jelas dan bukan tupoksi BPK
		Penyaluran kredit PT Bank BRI kepada perseroan PT Bakti Persada Agrobisnis yang diduga anggaran dasar perseroan tidak sesuai UU No. 40 tahun 2007 serta adanya kredit macet			1		1		1			1	Bukan tupoksi BPK
	1	Penyalahgunaan wewenang jabatan a.n saudara Eman Sulaeman pada PT. KAI DAOP 4 Semarang					1		1			1	Bukan tupoksi BPK

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

	Pengaduan oknum diplomat Kinibalu yang diduga berbuat kriminal, bully, misi perkara diri, pungli, spj fiktif, penipuan, gratifikasi		1			1	AKN I	1				1	Aduan tidak jelas, dibalas via email untuk melengkapi aduan sesuai syarat
	Pengaduan terkait pembangunan oleh Balai Besar XVIII Jayapura		1			1	AKN VI	1				1	Aduan tidak jelas, dibalas via email untuk melengkapi aduan sesuai syarat
	Pengaduan terkait pencairan tunjangan guru non PNS		1			1		1				1	Bukan tupoksi BPK, dibalas via email untuk menyampaikannya kepada Kemendikbud
	Pengaduan tentang Bupati Kabupaten Pulau Taliabu		1			1	AKN VI	1				1	Aduan tidak jelas, dibalas via email untuk melengkapi aduan sesuai syarat
	Somasi kepada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) terkait penyelesaian pembayaran pengadaan barang/jasa.			1		1	AKN VII			1		1	Tembusan disampaikan ke satker terkait
	Permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			1		1	AKN II			1		1	Tembusan disampaikan ke satker terkait
	<b>JUMLAH</b>	<b>122</b>	<b>63</b>	<b>305</b>	<b>17</b>	<b>507</b>		<b>286</b>	<b>134</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>429</b>	